

PENGEMBANGAN DESA PESISIR TANGGUH (PDPT) TAHUN 2013 DAN
TAHUN 2014 DALAM MENYIAPKAN DESA TAMBAKREJO KABUPATEN
MALANG-JAWA TIMUR DALAM MENDUKUNG MASYARAKAT EKONOMI
ASEAN (MEA) 2015

SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN

OLEH
JUITA SUKMA KURNIANINGSIH
NIM. 115080400111086



FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

PENGEMBANGAN DESA PESISIR TANGGUH (PDPT) TAHUN 2013 DAN
TAHUN 2014 DALAM MENYIAPKAN DESA TAMBAKREJO KABUPATEN
MALANG-JAWA TIMUR DALAM MENDUKUNG MASYARAKAT EKONOMI
ASEAN (MEA) 2015

SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan
di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

OLEH
JUITA SUKMA KURNIANINGSIH
NIM. 115080400111086



FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Tahun 2013 Dan Tahun 2014
Dalam Mempersiapkan Desa Tambakrejo Dalam Mendukung Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA) 2015 Di Desa Tambakrejo Kabupaten Malang
Jawa Timur

Oleh:

Juita Sukma Kurnianingsih
NIM. 115080400111086

Telah dipertahankan didepan dosen penguji
Pada tanggal 3 Juli 2015
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Dosen Penguji 1

Dosen Pembimbing 1

Dr. Ir. Agus Tjahjono, MS

NIP.19630820 198802 1 001

Tanggal :

Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP

NIP. 19630604 199002 2 002

Tanggal :

Dosen Penguji 2

Dosen Pembimbing 2

Dr. Ir. Edi Susilo, MS

NIP. 19591205 198503 1 003

Tanggal :

Wahyu Handayani, S.Pi, MBA, MP

NIP. 19750310 200501 2 001

Tanggal :

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP.

NIP.19610417 199003 1 001

Tanggal

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Malang, 1 Juli 2015

JUITA SUKMA KURNIANINGSIH

RINGKASAN

Juita Sukma Kurnianingsih. 115080400111086. Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (Pdpt) Tahun 2013 Dan Tahun 2014 Dalam Mendukung Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 Di Desa Tambakrejo Kabupaten Malang-Jawa Timur. **Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP dan Wahyu Handayani, S.Pi, M.B.A, MP**

Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) merupakan salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program tersebut bertujuan untuk menjadikan desa-desa pesisir menjadi lebih tangguh terhadap bencana dan perubahan perekonomian. Desa Pesisir yang mendapatkan program tersebut untuk wilayah Malang Jawa Timur yaitu Desa Sitarjo, Desa Sidoasri, dan Desa Tambakrejo. Tahun 2015 sedang berlangsung Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Tujuan dari MEA menciptakan pasar tunggal, menuju kawasan regional ekonomi berdaya saing tinggi, menuju kawasan pembangunan yang merata, dan menuju integrasi penuh pada ekonomi global. PDPT merupakan salah satu cara pemerintah dalam menyiapkan desa pesisir dalam mendukung MEA 2015.

Peneliti melihat bagaimana PDPT menyiapkan Desa Tambakrejo agar bisa mendukung MEA 2015. Tujuan penelitian ini antara lain: 1) mengetahui dan mempelajari profil Desa Tambakrejo Kabupaten Malang meliputi lokasi geografi, monografi desa, kesejahteraan, keadaan umum kegiatan perikanan, infrastruktur, organisasi, mapping desa, bagan kelembagaan, dan bagan mobilisasi yang berguna dalam membantu kelancaran terselenggaranya PDP, 2) mengetahui peranan lembaga-lembaga di Desa Tambakrejo terhadap masyarakat dalam mendukung MEA, dan 3) PDPT dalam mempersiapkan Desa Tambakrejo yang tangguh dalam mendukung MEA.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan sample *purposive sampling* dan dalam menentukan sample menggunakan stratifikasi random sampling. Teknik pengambilan data menggunakan metode wawancara, kuisisioner, *focus group discussion*, studi pustaka, partisipasi aktif, observasi, dan dokumentasi. Data-data yang telah didapatkan dianalisis dengan menggunakan indikator-indikator yang ada pada matriks yang telah dibuat dan menggunakan ENACT Model. Indikator-indikator tersebut didapat dengan cara studi pustaka. ENACT model merupakan suatu pendekatan terhadap suatu komunitas dengan metode partisipasi aktif. ENAVT model ini bertujuan untuk mengenali kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh desa baik dari segi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya kelembagaan, dan prasarana dan sarana.

Hasil dari penelitian yang pertama adalah tentang profil Desa Tambakrejo. Berdasarkan profil Desa Tambakejo didapatkan hasil bahwa Desa Tambakrejo resmi didirikan pada tahun 1909 yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Penduduk disana mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dan sebagaian besar pula penduduk tamat sekolah SD. Dilihat dari usia jumlah penduduk yang sudah memasuki usia kerja sangat banyak. Komoditas unggulan pertanian berupa kayu dan padi sawah, sedangkan komoditas perikanan tangkap unggulan berupa ikan cakalang dan ikan tuna serta komoditas peternakan unggulan berupa sapi, kambing, dan ayam kampung. Selain sumberdaya alam yang dimiliki, Desa Tambakrejo juga memiliki banyak tempat pariwisata seperti Pantai Tamban Indah, Pantai Sendiki, Pantai Clungup, dan Wana Wisata Sendangbiru. Diagram mobilisasi berguna dalam melihat potensi konflik yang

disebabkan oleh pergerakan penduduk keluar dan masuk desa yang berasal dari berbagai macam wilayah. Diagram mobilisasi dibuat dengan menggunakan ENACT model. Kondisi jalan-jalan yang ada di Desa tambakrejo masih dalam kondisi yang buruk, berbanding terbalik dengan kondisi jembatan disana dalam kondisi yang baik. Selain itu selalu terjadi pemadaman listrik. Namun kondisi sarana baik pendidikan, lembaga keuangan, kantor administrasi desa mempunyai bangunan yang baik. Petik laut merupakan kebudayaan Desa Tambakrejo. Petik laut ini adalah sebagai rasa syukur masyarakat kepada Tuhan YME atas berkah dan rahmat yang telah diberikan. Kerusakan sumberdaya alam berdasarkan hasil FGD yaitu terjadi kerusakan degradasi habitat fisik dan pencemaran yang disebabkan oleh penebangan pohon. Hasil perancangan secara FGD tentang kedekatan lembaga dengan masyarakat dihasilkan bahwa lembaga-lembaga yang dekat dengan masyarakat antara lain kelompok nelayan, komunitas gereja, POKMASWAS, koperasi, dan kelompok pengajian. Pemanfaatan dana PDPT dalam kegiatan bina siaga bencana dan perubahan iklim menghabiskan dana sebesar Rp 136.377.000, kegiatan bina infrastruktur dan lingkungan menghabiskan dana Rp 449.439.500, kegiatan bina sumberdaya alam menghabiskan dana Rp 89.030.000 dan kegiatan bina usaha menghabiskan dana Rp 69.987.000. Kegiatan-kegiatan tersebut membawa perubahan positif yang baik terhadap kualitas Desa Tambakrejo. Namun masih belum bisa dalam menyiapkan Desa Tambakrejo dalam mendukung MEA 2015 sehingga perlu kerjasama dengan pihak-pihak luar lainnya untuk pembangunan Desa Tambakrejo agar bisa mendukung MEA 2015.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Tahun 2013 Dan Tahun 2014 Dalam Mempersiapkan Desa Tambakrejo Dalam Mendukung Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 Di Desa Tambakrejo Kabupaten Malang Jawa Timur sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP selaku dosen pembimbing 1 dan yang telah memberi kepercayaan untuk menangani suatu proyek sehingga terciptanya skripsi ini.
2. Wahyu Handayani, S.Pi, MBA, MP sebagai dosen pembimbing 2 dan dosen PKL serta guru dalam berbagi pengalaman
3. Dr. Ir. Agus Tjahjono, MS sebagai dosen penguji 1
4. Dr. Ir. Edi Susilo, MS sebagai dosen penguji 2
5. Dr. Ir. Nuddin Harahap, Mp sebagai ketua jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan juga sebagai dosen pembimbing akademik.
6. Bapak Sunyoto dan Ibu Indrawati sebagai orang tua hebat yang telah mendoakan kami sehingga mendapat kelancaran dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi.
7. Amanda Ruth D sebagai teman dalam satu proyek dalam berpikir
8. Masyarakat Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang

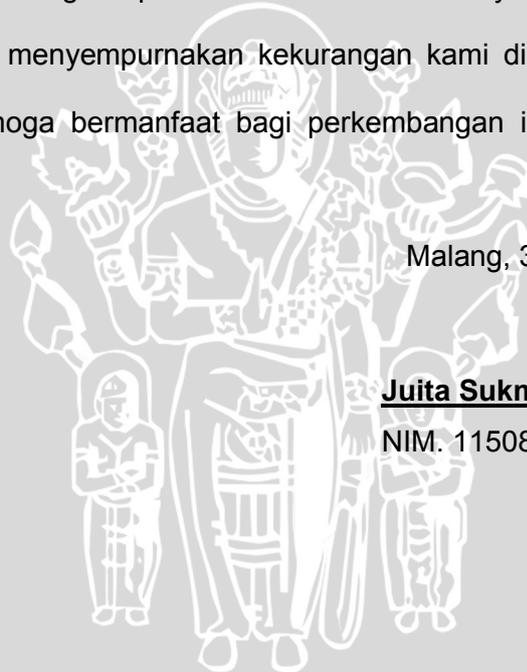
9. Keluarga besar Bapak Enggar Desa Sitarjo Kabupaten Malang Jawa Timur yang telah menjadi keluarga baik selama saya penelitian dan juga banyak membantu dalam penelitian ini.
10. Seluruh civitas akademik yang membantu demi kelancaran penyusunan skripsi.
11. Teman-teman Agrobisnis Perikanan 2011 yang telah membantu baik secara langsung dan tidak langsung

Akhirnya dengan segala keterbatasan serta pengetahuan, kami menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan komentar yang dapat dijadikan masukan dalam menyempurnakan kekurangan kami di masa yang akan datang dan semoga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Malang, 3 Juli 2015

Juita Sukma Kurnianingsih

NIM. 115080400111086



DAFTAR ISI

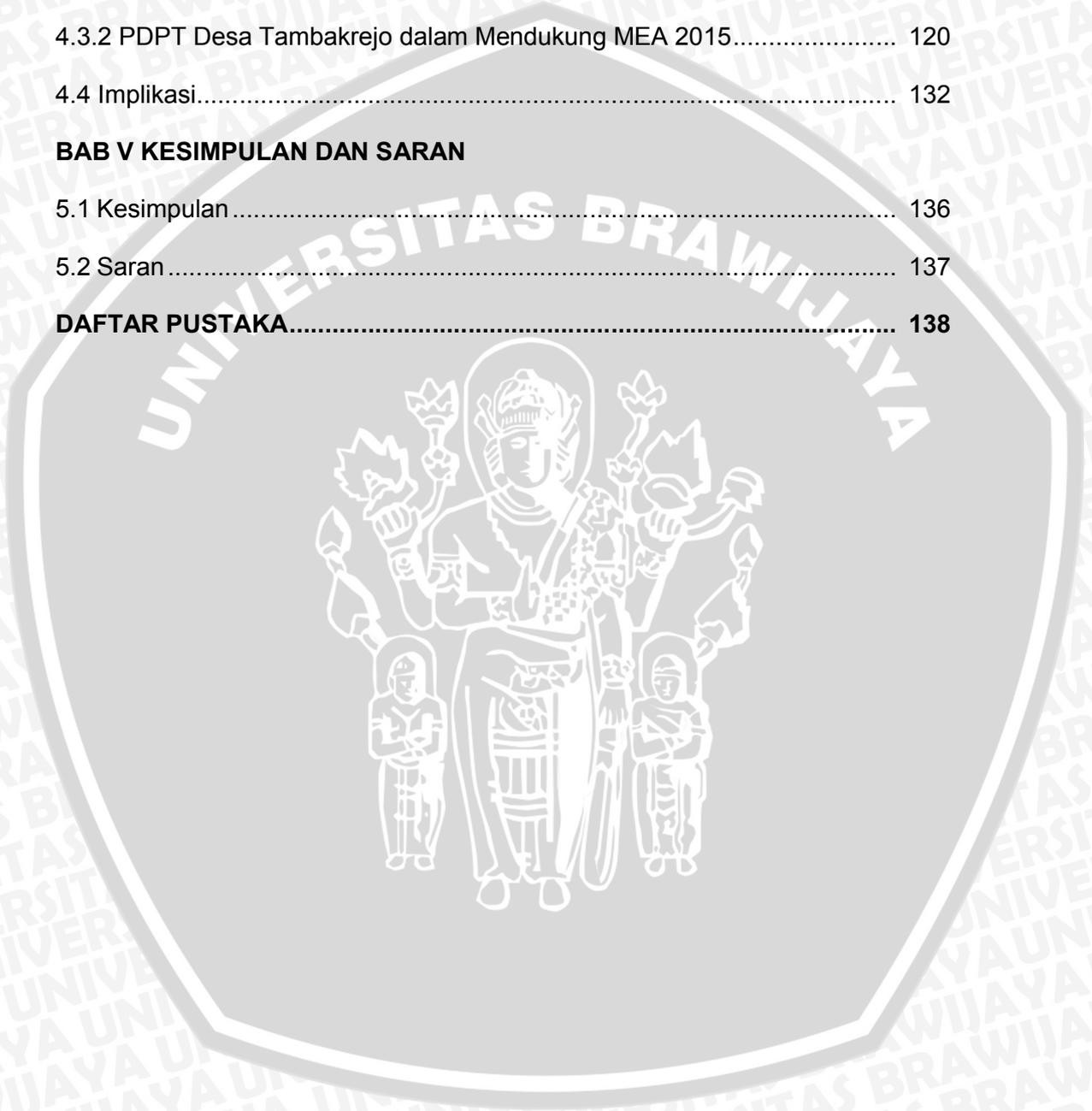
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
RINGKASAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)/ASEAN Economic Community (AEC).....	8
2.2 Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).....	18
2.3 ENACT (<i>Enabling Community Action</i>) Model.....	24
2.4 Lembaga dan Kelembagaan.....	26
2.5 Profil Desa.....	29
2.6 Kriteria Kesejahteraan.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.2 Obyek Penelitian.....	35
3.3 Jenis Penelitian.....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	36



3.4.1 Wawancara.....	36
3.4.2 Observasi	37
3.4.3 <i>Focus Group Discussion</i> (FGD).....	37
3.4.4 Studi Pustaka.....	39
3.4.5 Partisipasi Aktif.....	39
3.4.6 Kuisisioner.....	40
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.5.1 Data Primer.....	41
3.5.2 Data Sekunder.....	41
3.6 Populasi dan Sampel.....	42
3.6.1 Populasi.....	42
3.6.2 Sampel	42
3.7 Teknik Pengumpulan Sampel	43
3.8 Analisa Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Profil Desa Tambakrejo.....	51
4.1.1 Sejarah Desa Tambakrejo	51
4.1.2 Pemerintahan Desa Tambakrejo.....	51
4.1.3 Keadaan Geografi dan Topografi Desa Tambakrejo	55
4.1.4 Potensi Sumberdaya Alam Desa Tambakrejo.....	56
4.1.5 Keadaan Demografi Desa Tambakrejo	58
4.1.6 Mobilisasi Penduduk Desa Tambakrejo	61
4.1.7 Prasarana dan Sarana Desa Tambakrejo.....	63
4.1.7.1 Prasaran	64
4.1.7.2 Sarana	71
4.1.8 Pariwisata	76
4.1.9 Budaya Desa Tambakrejo.....	82



4.1.10 Kebencanaan.....	82
4.2 Lembaga-Lembaga di Desa Tambakrejo	90
4.3 PDPT Desa Tambakrejo dalam Mendukung MEA 2015.....	97
4.3.1 Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Desa Tambakrejo	97
4.3.2 PDPT Desa Tambakrejo dalam Mendukung MEA 2015.....	120
4.4 Implikasi.....	132
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	136
5.2 Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	138



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Implementasi AEC berdasarkan scorecard bulan Desember 2011.....	9
2. Strategi menuju AEC 2015.....	11
3. Capaian pelaksanaan MEA oleh negara-negara anggota ASEAN	12
4. Fokus kegiatan PDPT	20
5. Struktur organisasi pemerintahan Desa Tambakrejo tahun 2011	53
6. Diagram mobilitas masyarakat Desa Tambakrejo	62
7. Kondisi jalan Desa Tambakrejo.....	65
8. Komdisi ruas-ruas jalan Desa Tambakrejo.....	66
9. Kondisi jalan menuju Pantai Tamban Indah	67
10. Jembatan di Desa Tambakrejo	68
11. Jembatan yang didanai PDPT dan swadaya tahun 2013	68
12. TK Dharmawanita Tambakrejo.....	71
13. TK Dharmawanita 02 Tambakrejo.....	71
14. SDN Tambakrejo II	71
15. SDN Tambakrejo I	71
16. SD Nelayan Sendangbiru.....	71
17. SMPN Tambakrejo.....	72
18. SMP TPN Sendangbiru.....	72
19. Kopdit Petitis Sae.....	72
20. KUD Minajaya.....	72
21. Bank BRI.....	72
22. Masjid di Dusun Tamban	73
23. Mushola di Dusun Tamban	73
24. Masjid di Dusun Sendangbiru	73

25. Masjid Alfalah di Dusun Sendangbiru.....	73
26. Gereja di Dusun Tamban.....	73
27. GKJW Tambakrejo di Dusun Tamban.....	73
28. GKJW Sendangbiru	73
29. Kantor Kepala Desa Tambakrejo	74
30. Balai Dusun Sendangbiru	74
31. Puskesmas Sendangbiru	74
32. POSKESDES Permata Hati di Dusun Tamban	74
33. Kantor Polisi Sendangbiru.....	74
34. Pos TNI-AL Sendangbiru	74
35. Kegiatan pelelangan ikan di TPI baru Sendangbiru.....	75
36. Kegiatan berdagang ikan di TPI lama Sendangbiru	75
37. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas TPI Sendangbiru.....	75
38. Kantor Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Pondok Dadapam Sendangbiru	75
39. Wana Wisata Sendangbiru	76
40. Pantai Tamban Indah.....	77
41. Pantai Clungup	78
42. Lahan mangrove di Pantai Clungup.....	78
43. Pantai Gatra.....	79
44. Pulau tempat bertelur penyu	80
45. Pantai Tiga Warna	80
46. Pantai Sendiki.....	81
47. Kegiatan Petik Laut.....	82
48. Hasil FGD kerusakan sumberdaya alam Desa Tambakrejo	83
49. Hasil FGD Penyebab kerusakan sumberdaya alam Desa Tambakrejo ...	84
50. Kondisi Pantai Tamban Indah	85



51. Kondisi kerusakan hutan Desa Tambakrejo bulan April 2015.....	87
52. Kondisi hutan yang baru dibuka bulan April 2015.....	88
53. Peta potensi Desa Tambakrejo Kabupaten Malang	89
54. Diagram kedekatam lembaga-lembaga Desa Tambakrejo dengan masyarakat Desa Tambakrejo.....	92
55. Kondisi awal jembatan I sebelum direnovasi.....	100
56. Kondisi jembatan I setelah direnovasi	100
57. Kondisi jembatan II sebelum direnovasi	101
58. Kondisi jembatan II setelah direnovasi	101
59. Kondisi TPA sebelum direnovasi.....	102
60. Kondisi TPA setelah direnovasi.....	102
61. Kondisi MCK sebelum direnovasi.....	102
62. Kondisi MCK setelah direnovasi.....	102
63. Kondisi jalan sebelum dipaving.....	103
64. Kondisi jalan setelah dipaving.....	103
65. Kondisi awal drainase	104
66. Kondisi drainase setelah direnovasi.....	104
67. Kondisi pos pantau sebelum direnovasi	104
68. Kondisi pos pantau setelah direnovasi	104
69. Pengadaan barang-barang untuk pos pantau	105
70. Kondisi awal sebelum dibuat plengsengan.....	105
71. Kondisi setelah dibuat plengsengan.....	105
72. Kondisi sebelum dibangun jembatan mangrove	106
73. Jembatan mangrove yang sudah dibangun.....	106
74. Mangrove.....	107
75. Alat komunikasi HT	108
76. Genset diesel listrik.....	108

77. Genset diesel listrik.....	109
78. Rambu evakuasi di Desa Tambakrejo.....	109
79. Lahan sebelum dibangunnya pembuatan tendon air.....	110
80. Tendon air yang sudah jadi.....	110
81. MCK yang masih dalam pengerjaan.....	110
82. Septic tank dari dana PDPT.....	111
83. Dermaga perahu kecil.....	111
84. Pengadaan MCK.....	112
85. Tandon air di Pantai Clungup.....	112
86. Kondisi sebelum dibangunnya jembatan mangrove.....	113
87. Jembatan mangrove.....	113
88. Pengadaan solar cell di Pantai Gatra.....	114
89. Pengadaan solar cell di Pantai Clungup.....	114
90. Perahu kenting.....	115
91. <i>Life jacket</i>	116
92. Peralatan snorkling.....	116
93. Peralatan selam.....	117
94. Mesin daur ulang limbah.....	117
95. Peralatan camping.....	118
96. Pemanfaatan dana kegiatan PDPT tahun 2013 dan tahun 2014 Desa Tambakrejo.....	120

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kegiatan utama pada buku pedoman MEA 2015.....	14
2. Pedoman penyusunan profil desa dan kelurahan.....	30
3. Indikator-indikator kesejahteraan keluarga berdasarkan BKKBN.....	33
4. Indikator-indikator untuk membuat profil desa	44
5. Kedekatan lembaga dan peran lembaga desa.....	45
6. Indikator-indikator dalam mendukung MEA 2015	46
7. Daftar nama-nama stakeholder pemerintah Desa Tambakrejo tahun 2011	54
8. Lembaga-lembaga di Desa Tambakrejo tahun 2015	55
9. Luas wilayah menurut pemanfaatan lahan/kawasan tahun 2011	56
10. Hasil komoditas pertanian Desa Tambakrejo tahun 2011	57
11. Hasil komoditas perikanan tangkap Desa Tambakrejo tahun 2011.....	57
12. Hasil komoditas peternakan tahun 2011.....	58
13. Jumlah penduduk berdasarkan usia tahun 2011	59
14. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2011.....	59
15. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian tahun 2011	60
16. Indikator standar pelayanan minimal jalan.....	65
17. Sarana-sarana yang ada di Desa Tambakrejo.....	71
18. Hasil FGD tentang kedekatan lembaga dengan masyarakat Desa Tambakrejo.....	94
19. Susunan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) Desa Tambakrejo.....	98
20. Rincian penggunaan dana PDPT tahun 2013 dan tahun 2014 di Desa Tambakrejo	119
21. Indikator kemiskinan berdasarkan BKKBN	123



22. Analisis kesiapan infrastruktur Desa Tambakrejo

dalam Mendukung MEA 2015 123



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal pendiriannya, ASEAN ditujukan pada kerjasama politik untuk perdamaian dan keamanan Asia Tenggara. Namun dengan berjalannya waktu, untuk menjawab tantangan dalam menghadapi kerjasama regional dan dan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, maka disepakati *vision* ASEAN 2020 yang bertempat di Kuala Lumpur pada tanggal 15 Desember 1997 yang mencakup tiga hal antara lain:

- Menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi dengan ditandainya arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi,
- Mempercepat liberalisasi perdagangan dibididang jasa, dan
- Meningkatkan pergerakan tenaga professional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan.

Pada tahun 2003, diadakannya kembali Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 yang diadakan di Bali (Bali Concord II), menyepakati pembentukan komunitas ASEAN (ASEAN Community) yang terdiri dari ASEAN *Political-Security Community* (APSC), ASEAN *Economic Community* (AEC), dan ASEAN *Socio-Culture Community* (ASCC). Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN)/ASEAN *Economic Community* (AEC) adalah merupakan salah satu program final ASEAN yang disebut *Vision 2020*. Tujuan dari AEC ini meliputi 2011 menuju *single market*, menuju kawasan regional ekonomi berdaya saing

tinggi, menuju kawasan pembangunan yang merata, dan menuju integrasi penuh pada ekonomi global. Pelaksanaan program tersebut dipercepat akan dilaksanakan pada tahun 2015. Untuk menuju AEC negara-negara anggota ASEAN melalui 3 tahap dalam mempersiapkan AEC yaitu pada tahap awal tahun 2008-2009, tahap kedua yaitu tahun 2010-2011, dan tahap ketiga yaitu 2012-2013.

Indonesia saat ini menjadi negara produsen perikanan ke-2 terbesar di dunia setelah China. Meskipun Indonesia menduduki peringkat kedua penghasil perikanan namun masih kalah dalam bidang ekspor produk perikanan dibandingkan dengan negara-negara yang produksi ikannya jauh di bawah Indonesia. Indonesia menduduki peringkat kedua belas di dunia dalam hal ekspor produk olahan perikanan. Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan, Soenoto mengatakan bahwa ekspor produk olahan perikanan nilai tambahnya masih rendah sehingga sulit untuk bersaing dengan negara-negara lain seperti Thailand dan Vietnam (SCTV, 2014).

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada 2010 volume ekspor perikanan ke Afrika hanya sebesar 24.000 ton dengan nilai 58 juta dolar AS. Angka tersebut meningkat menjadi 29.000 ton dengan nilai 81 juta dolar AS pada 2011, sedangkan hingga Agustus 2012, ekspor pada tahun ini juga menunjukkan peningkatan cukup tajam dengan volume yang mencapai 23 ribu ton dengan nilai 56 juta dolar AS. Hal serupa juga terjadi pada angka ekspor ke kawasan Timur Tengah, yaitu dari 13.000 ton dengan nilai 30 juta dolar AS pada 2011 hingga mencapai 14.000 ton dengan nilai 40 juta dolar AS pada 2012, meski baru tercatat hingga bulan Agustus. Perluasan pasar kedua kawasan tersebut dinilai cukup bagus yang juga menyokong pada surplus neraca perdagangan komoditas perikanan yang mencapai hampir 78 persen pada tahun 2012 ini (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan bahwa 50% produk olahan tuna kaleng yang ada di Saudi Arabia berasal dari Jawa Timur (Portal Nasional Republik Indonesia, 2012). Beliau juga mengatakan bahwa industri pengolahan hasil perikanan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu basis produksi dan industri perikanan nasional karena ada sekitar 130 Unit Pengolahan Ikan (UPI), 63 UPI diantaranya berorientasi ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa produk perikanan dari Jawa Timur mempunyai daya saing yang cukup tinggi sehingga mampu bersaing di pasar ekspor. Nilai ekspor nasional hasil perikanan Indonesia pada tahun 2011 sebesar US\$ 3,5 miliar, naik sebesar 22,95 persen dari nilai ekspor tahun 2010 dimana dari total nilai ekspor tersebut diperkirakan 24 persennya berasal dari Jawa Timur, yakni sebesar 827 juta dolar pada 2011 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014).

Dalam mempersiapkan Indonesia menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan kesiapan dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan melalui program-program pengembangan desa khususnya di wilayah pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan akhir-akhir ini sedang melaksanakan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). PDPT ini mempunyai tujuan yaitu untuk menata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa pesisir dengan menjadikannya lebih tangguh terhadap bencana dari pada sebelumnya dengan basis sosial ekonomi masyarakat pesisir. Menurut UU RI no 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 4 bahwa kegiatan pengelolaan wilayah pesisir mempunyai tujuan: a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. memperkuat peran serta

masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Program ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan PNPM-Mandiri Kelautan dan Perikanan yang berada dibawah coordinator kementerian koordinkesejahteraan rakyat.

Dalam pelaksanaan PDPT, tidak semua desa pesisir yang ada di Indonesia ini akan mendapatkan program ini. Hanya ada beberapa desa pesisir saja yang akan mendapatkan program PDPT ini yang dianggap memasuki minimal tiga kriteria-kriteria yang telah ditentukan seperti desa pesisir yang rawan bencana, keadaan pemukiman yang kumuh, mempunyai produk local yang bernilai tinggi, dan kriteria-kriteria lainnya. Ada tiga tahapan pelaksanaan PDPT yaitu tahap pertama pada tahun 2013, tahap kedua 2014, dan tahapan ketiga tahun 2015 (sedang berlangsung). Ada tiga desa dalam tahun pertama ini yang telah ditetapkan untuk program PDPT untuk kawasan Malang Raya yaitu Desa Sidoasri, Desa Tambakrejo, dan Desa Sitarjo yang berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Malang post, 2013). Desa-desa tersebut saling berdekatan dan mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain seperti jika Desa Sitarjo mengalami banjir sehingga berdampak terhadap kegiatan ekonomi Desa Sidoasri dan Desa Tambakrejo sehingga dengan terpilihnya tiga desa tersebut diharapkan akan semakin tangguh bila dibandingkan hanya terpilih satu desa saja.

Desa Tambakrejo ini terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Tamban dan Dusun Sendangbiru. Desa Tambakrejo merupakan desa yang terletak di kawasan pesisir yang rawan bencana alam. Kerwanan bencana ini bisa meliputi

bencana banjir, tsunami, dan tanah longsor Dusun Tamban memiliki dua pantai yaitu pantai Tamban dan pantai Sendiki sedangkan di Dusun Sendangbiru ada pantai Sendangbiru, Clungup, Tiga warna, Gatra, dan masih banyak lainnya yang belum terekplorasi. Desa Tambakrejo dikelilingi beberapa pantai yang berada di Samudra Hindia. Keadaan geografis Desa Tambakrejo yang berada di pesisir menjadikan masyarakat sekitar bekerja sebagai nelayan. Tangkapan yang dihasilkan adalah ikan tuna, cakalang, dan berbagai jenis ikan besar lainnya. Selain itu, Desa Tambakrejo juga memiliki potensi besar dibidang wisata pantai berbasis edukasi seperti salah satunya adalah Pantai Clungup.

Namun, wisata-wisata pantai tersebut masih banyak memerlukan perbaikan-perbaikan infrastruktur seperti masih banyaknya jalan rusak, listrik yang tidak bisa sepenuhnya digunakan 24 jam, dan perbaikan lingkungan rusak yang diakibatkan oleh alam seperti abrasi dan masih banyak lainnya. Abrasi ini terjadi di Pantai Tamban yang berada di Dusun Tamban. Abrasi ini mengakibatkan penggerusan lahan pantai sedalam ± 2 meter dari bibir pantai. Bila tidak segera ditanggulangi akan berdampak terhadap kegiatan perekonomian masyarakat sekitar yang mayoritas adalah penjual ikan untuk wisatwan dan penjual-penjual makanan lainnya. Tidak dapat kita pungkiri bahwa infrastruktur merupakan hal penting yang memberikan dampak besar terhadap perkembangan kemajuan perekonomian suatu wilayah.

Mengingat bahwa saat ini telah berlangsungnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) 2015 dimana pasar akan lebih bebas terbuka sehingga perlu adanya penguatan-penguatan sumberdaya manusia, kelembagaan, produk local, dan lainnya yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan perekonomian desa agar Indonesia dapat menjadi subyek dalam AEC bukan menjadi obyek belaka. Melalui program-program yang ada pemerintah berusaha menjadikan setiap wilayah bagian-bagian Indonesia

menjadi tangguh dalam mendukung AEC. Dengan adanya penelitian ini, peneliti akan meneliti sejauh manakah Desa Tambakrejo ini siap dalam mendukung AEC dan diharapkan penelitian ini bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan sebelum diambilnya keputusan akan suatu kebijakan-kebijakan dikemudian hari. Peneliti menyajikan data yang diambil dari masyarakat yang menjadi subjek dari program PDPT sehingga akan memunculkan data kebutuhan masyarakat yang nantinya berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat *bottom up* (berdasarkan kebutuhan masyarakat). Dengan harapan ketika suatu kebijakan diambil, maka kebijakan tersebut tepat sasaran dan tepat guna karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, berikut merupakan rumusan-rumusan masalah yang telah ditetapkan peneliti antara lain:

1. Bagaimana profil Desa Tambakrejo Kabupaten Malang dilihat dari segi geografi, demografi, dan topografi dalam mendukung PDPT?
2. Bagaimana peranan dan kedekatan lembaga-lembaga yang ada di Desa Tambakrejo terhadap masyarakat sekitar agar dapat mendukung Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015?
3. Sejauh mana program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Desa Tambakrejo dapat mendukung Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yang sedang berlangsung saat ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Mempelajar profil Desa Tambakrejo Kabupaten Malang untuk mendukung PDPT yang meliputi lokasi geografi, monografi desa, kesejahteraan, keadaan umum kegiatan perikanan, infrastruktur,

organisasi, mapping desa, bagan kelembagaan, dan bagan mobilisasi yang berguna dalam membantu kelancaran terselenggaranya PDPT

2. Mengetahui peranan dan kedekatan lembaga-lembaga di Desa Tambakrejo terhadap masyarakat agar dapat mendukung MEA
3. Mengetahui peranan Program PDPT dalam mempersiapkan Desa Tambakrejo yang tangguh dalam mendukung MEA

1.4 Kegunaan Penelitian

- Masyarakat
Menambah wawasan dan *softskill* dalam mempersiapkan diri terhadap perdagangan bebas internasional.
- Pemerintah
Sebagai bahan evaluasi dalam melakukan kebijakan-kebijakan perikanan dan informasi mengenai keadaan perikanan khususnya di Desa Tambakrejo Kabupaten Malang
- Peneliti
Sebagai studi penelitian lebih lanjut mengenai Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

BAB II

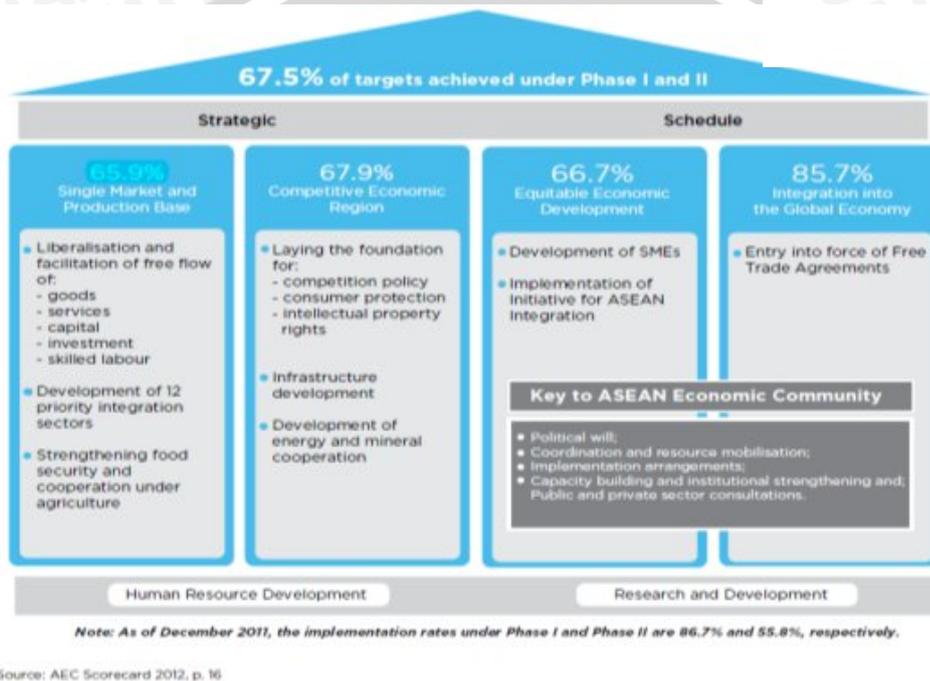
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)/ASEAN Economic Community (AEC)

Deklarasi Bangkok merupakan awal kerjasama ekonomi ASEAN pada tahun 1967 yang mempunyai tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan social dan pengembangan budaya serta bekerjasama dalam peningkatan pemanfaatan pertanian dan industry (Departemen Perdagangan RI, 2004). Pada tahun 1997, terjadi kesepakatan Vision ASEAN 2020 antara negara Asia Tenggara untuk mewujudkan kawasan yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata dengan ditandai adanya penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan social ekonomi. Pada tahun 2003, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang ke-9 yang diadakan di Bali (Bali Concord II) dibentuk dan disepakatai tiga pilar untuk mewujudkan ASEAN Vision 2020 yang dipercepat menjadi 2015, yaitu *ASEAN Economic Community (AEC)*, *ASEAN Political Security Community*, dan *ASEAN Socio Cultural Community*.

Pada bulan Januari 2007 disepakati percepatan *ASEAN Economic Community (AEC)* yang awalnya tahun 2020 dipercepat menjadi tahun 2015 dimana terbentuknya AEC blueprint sebagai dari kesepatan bersama. AEC *blueprint* merupakan pedoman rancangan kerja strategis bagi negara-negara AEC *blueprint* merupakan masterplan bagi pembentukan AEC 2015 sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang harus memberikan perlakuan sama atas produk, jasa, investasi, dan tenaga kerja professional yang berasal dari negara anggota ASEAN (Burmansyah, 2014). Asia Tenggara dalam melaksanakan percepatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). AEC *blueprint* ini

ditandatangani beramaan dengan dengan Piagam ASEAN, 20 November 2007 Pada KTT ke-13 di Singapura. Adapun pilar-pilar AEC dalam *blueprint* yaitu menuju *single market*, menuju kawasan regional ekonomi berdaya saing tinggi, menuju kawasan pembangunan yang merata, dan menuju integrasi penuh pada ekonomi global (Arifin, 2008).



Gambar 1. Implementasi AEC berdasarkan *scorecard* AEC pada bulan Desember 2011
Sumber: *Cimb ASEAN Research Institute*, 2013

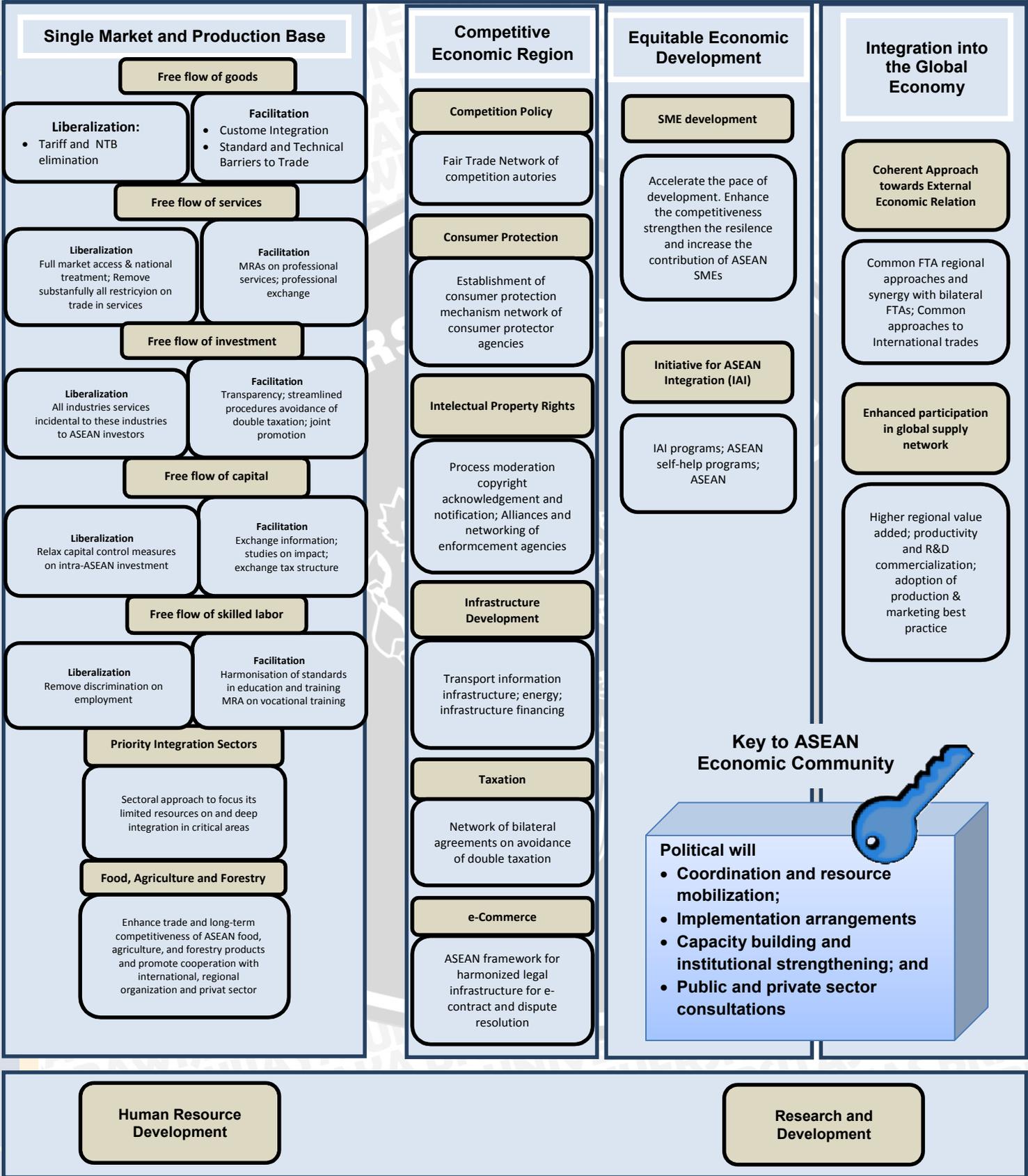
Pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, diadakan pertemuan para menteri ekonomi ASEAN untuk membahas capaian target implementasi AEC 2015 yang menghasilkan *Scorecard* (kartu penilaian) sebagai alat untuk mengukur kemajuan dan hambatan AEC 2015 dan sebagai penerapan disiplin pada anggota ASEAN agar sungguh-sungguh dalam melaksanakan target-target AEC 2015. Persiapan para negara anggota ASEAN dalam menyongsong AEC terdapat tiga fase yaitu Fase I (2008-2009), Fase II (2010-2011) dan Fase III

(2012-2013). Implementasi scorecard AEC pada bulan Desember 2011 masing-masing sebesar 86,7% dan 55,8% telah dicapai pada fase I dan fase II.



ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

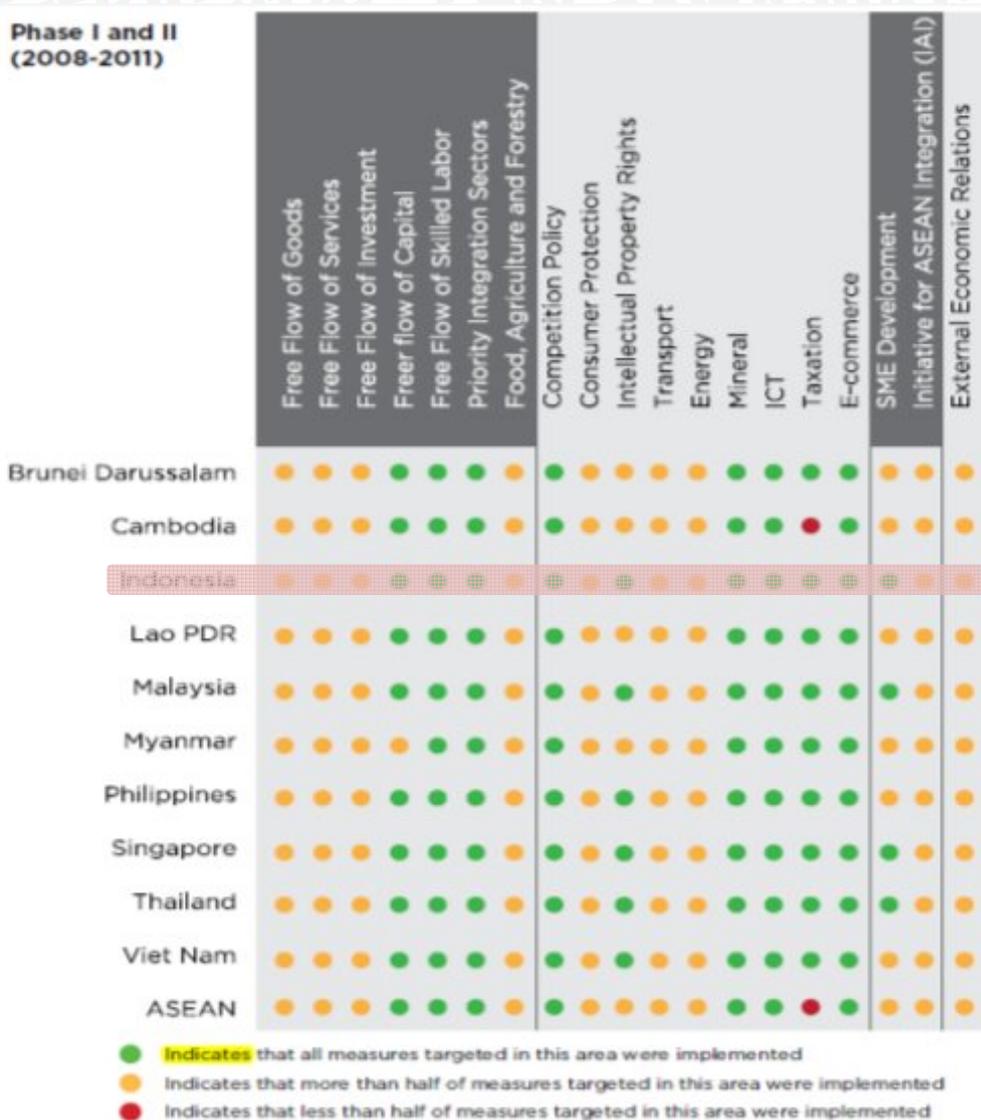
Strategic Schedule



Gambar 2. Strategi Menuju AEC 2015
sumber: ASEAN Economic Community blueprint, 2008



Phase I and II
(2008-2011)



Gambar 3. Capaian pelaksanaan MEA oleh negara-negara anggota ASEAN berdasarkan scorecard (sumber: Cimb ASEAN Research Institute, 2013)

Pada grafik lalu lintas di atas, terdapat tiga warna sebagai indikator untuk mengukur capaian pelaksanaan masing-masing negara. Warna hijau mengindikasikan bahwa semua target sudah terimplementasikan, warna oranye mengindikasikan bahwa lebih dari setengah dari target telah diimplementasikan dan warna merah mengindikasikan kurang dari setengah dari target sudah diimplementasikan. Capaian pelaksanaan MEA oleh Indonesia adalah lebih dari setengah target pada bidang aliran bebas barang, aliran bebas pelayanan, aliran bebas investasi, produk makanan, agrikultur, dan kehutanan, perlindungan

konsumen, transportasi, energi, hubungan ekonomi luar dan inisiatif untuk integrasi ASEAN telah terimplementasikan. Adapula beberapa target yang sudah terimplementasikan yaitu pada bidang aliran bebas modal, aliran bebas kemampuan tenaga kerja, integrasi sektor prioritas, kompetisi kebijakan, mineral, teknologi informatika dan komunikasi, perpajakan, e-perdagangan, pengembangan SME dan hak properti intelektual.

Ada 12 integrasi sektor prioritas yaitu produk-produk berbasis pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, produk berbasis kayu, perjalanan udara, e-ASEAN, kesehatan, pariwisata, dan logistic (Burmansyah, 2014). Pada rekomendasi awal yang dirumuskan oleh *High Level Task Force* (HLTF) untuk mempercepat 12 sektor integrasi prioritas di atas maka dibentuk coordinator-koordinator antara lain:

1. Indonesia : produk berbahan kayu dan automotif
2. Malaysia : produk berbahan karet, tekstil dan produknya
3. Myanmar : produk berbasis pertanian dan perikanan
4. Filipina : elektronik
5. Singapura : e-ASEAN dan perawatan kesehatan
6. Thailand : perjalanan udara dan turis

Proses pendekatan integrasi di sektor prioritas bertujuan untuk memadukan kekuatan masing-masing negara yang berguna untuk keuntungan kawasan, memfasilitasi dan mendukung investasi *intra-ASEAN*, mempromosikan produk dan jasa "*made in ASEAN*" (Arifin,dkk, 2008). Produk-produk pangan, agrikultur, akuakultur dan kehutanan juga diatur dalam table kegiatan utama di bawah ini untuk bisa berkompetisi di pasar ASEAN dan pasar dunia. Sanitasi, phytosanitasi, keamanan pangan, dan sertifikat-sertifikat yang harus dilengkapi merupakan salah satu cara ASEAN menyiapkan produk-produknya agar bisa bersaing di dalam dan di luar pasar ASEAN. Tabel tersebut juga mengatur waktu

serta kegiatan-kegiatan yang diimplementasikan secara perlahan namun pasti untuk mencapai Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Tabel 1. Kegiatan Utama Pada Buku Pedoman Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Pendekatan Strategi	Kegiatan Utama			
	2008-2009	2010-2011	2012-2013	2014-2015
Pengembangan Infrastruktur				
1. Rencana Kegiatan Transportasi a. <i>Singapore-Kunming Rail Link (SKRL)</i> b. Persyaratan Keselamatan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan rel penghubung Poipet-Sisophon (2009) 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan rencana kegiatan keselamatan jalan 5 tahun wilayah ASEAN 	<ul style="list-style-type: none"> Negara-negara anggota ASEAN mengembangkan standar pengukuran untuk keselamatan jalan 	
2. Kesepakatan Kerangka Kerja ASEAN Angkutan Multimodal	<ul style="list-style-type: none"> Para negara anggota telah membuat perundang-undangan kebutuhan domestik yang mulai berlaku pada kerangka kerja tentang Angkutan Multimodal ASEAN (<ul style="list-style-type: none"> Setidaknya minimal dua negara anggota melaksanakan Kesepakatan Kerangka Kerja tentang Angkutan Multimodal ASEAN 	<ul style="list-style-type: none"> ASEAN memperluas pelaksanaan Kesepakatan Kerangka Kerja tentang Angkutan Multimodal ASEAN 	
3. Kesepakatan Kerangka Kerja ASEAN Fasilitas Barang di Transit (ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Goods In Transit)	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Kesepakatan Kerangka Kerja ASEAN tentang Fasilitas Barang di Transit (ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Goods In Transit) untuk Transportasi Jalan Operasi 	Menyimpulkan dan menandatangani protocol 6 (Railway Borders dan Stasiun Interchane dari FAGIT ASEAN) Pemasangan Route penomoran tanda-tanda		Pelaksanaan penuh Kesepakatan Kerangka Kerja ASEAN tentang Fasilitas Barang di Transit (Jalan dan Rail Transport operasi)

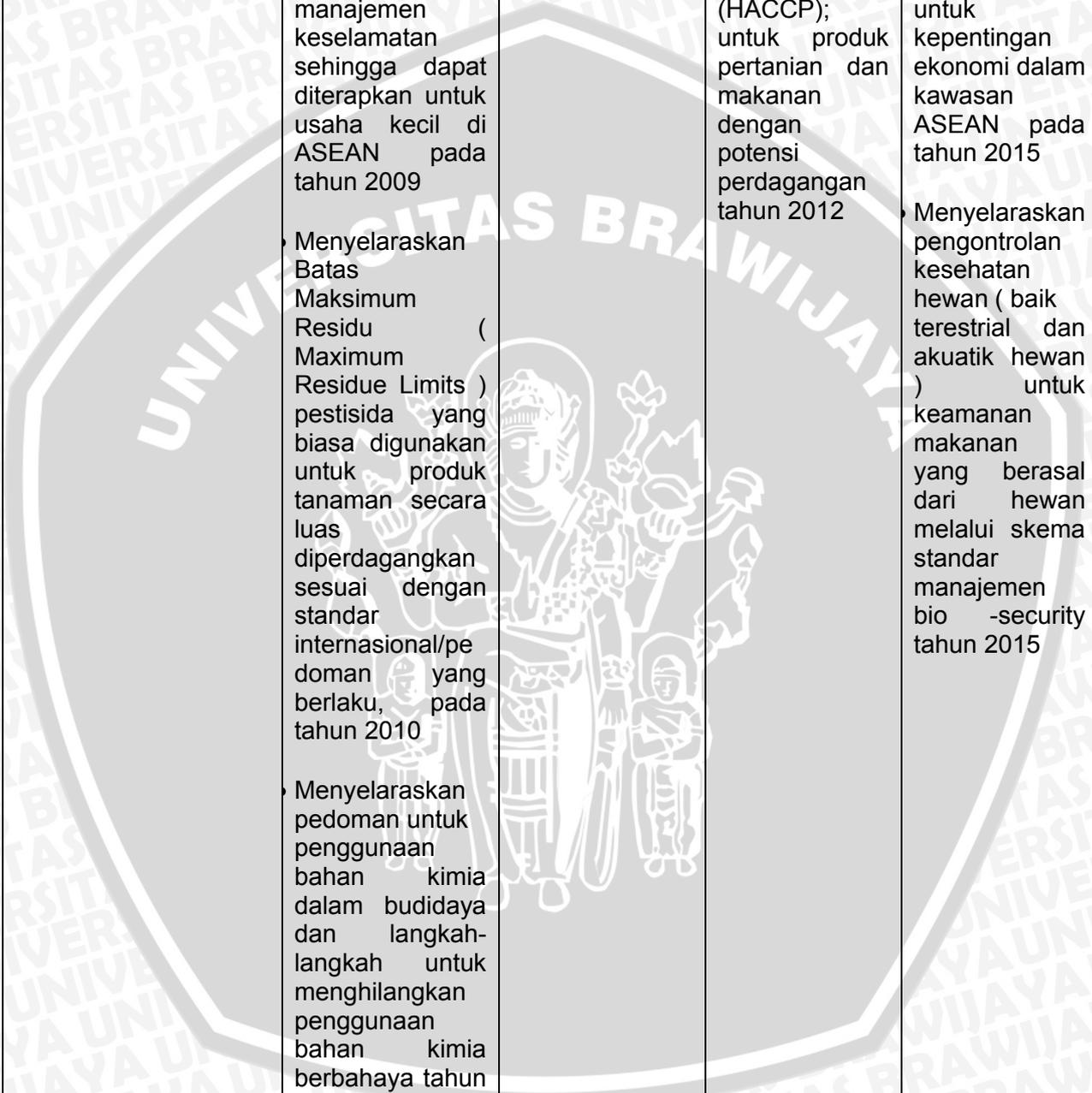
Tabel 1. Kegiatan Utama Pada Buku Pedoman Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (lanjutan)

	<p>Kontingen berdasarkan Kesimpulan Protokol 2 (Pelabuhan Perbatasan) dan Protokol 7 (Transit Bea Cukai)</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan pembangunan jalan/perbaikan kelas bawah jalan III bagian dari Protokol 1 Rute Transportasi Transit ASEAN dari Jaringan Jalan Raya yaitu Poipet-Sisophon (48 km) dan Kratie Stung Treng (198 km) 	<p>ditunjuk Transit Transportasi Rute (TTRs) di bawah Protokol 1 dari Kerangka Kerja ASEAN Perjanjian tentang Fasilitas Barang di Transit</p>		
<p>4. Peta menuju Transportasi Maritim Terpadu dan Kompetitif di ASEAN dengan memperkuat dan mempromosikan perkapalan dan pelayanan antar negara anggota ASEAN</p>	<p>Mengembangkan strategi untuk Pasar Tunggal Perkapalan ASEAN</p>	<p>Melaksanakan peta transportasi maritim</p>	<p>Melaksanakan peta transportasi maritim</p>	<ul style="list-style-type: none"> Meninjau peta transportasi maritim untuk 3-5 tahun ke depan
<p>5. Infrastruktur Penerangan</p> <p>a. Brunei merencanakan kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan ASEAN Telecommunication Regulator Council (ATRC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk penilaian kesesuaian peralatan 	<ul style="list-style-type: none"> ASEAN-mempeluas pelaksanaan dari MRA ASEAN untuk penilaian kesesuaian peralatan telekomunikasi 		

Tabel 1. Kegiatan Utama Pada Buku Pedoman Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (lanjutan)

<p>Fokus Teknologi Informasi Komunikasi</p>	<p>komunikasi</p> <p>Mempromosikan dan memperdalam kebijakan dan regulasi untuk menghadapi peluang dan tantangan di bidang jaringan pada masa selanjutnya (termasuk isu penetrasi broadband dan komunikasi di daerah pedesaan, dll)</p>	<p>Menerapkan langkah-langkah regional untuk memperluas konektivitas , kapasitas dan akses dalam dan antara anggota negara melalui jaringan kecepatan tinggi</p> <p>Antara infrastruktur informasi nasional</p> <p>Mengaktifkan interoperabilitas produk / jasa , sistem informasi dan jaringan , dalam lingkungan konvergensi</p>		
Produk Makanan, Agrikultur, dan Produk Kehutanan				
<p>Meningkatkan daya saing perdagangan baik dalam maupun luar ASEAN dalam jangka panjang tentang produk pangan, agrikultur dan produk kehutanan atau komoditi-komoditi ASEAN lainnya</p>	<p>Mengembangkan dan menerapkan system manajemen mutu perikanan yang menjamin keamanan pangan dan mendukung posisi kompetitif dari produk perikanan ASEAN di pasar dunia melalui implementasi, validasi, verifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) - dan</p>	<p>Menyelaraskan prosedur karantina dan pemeriksaan/sampling tahun 2010</p>	<p>Membangun Praktek Agriculture/Aquaculture Dengan baik(Good Agriculture/Aquaculture Practice) ,Praktek Beternak dengan baik (Good Animal Husbandry Practice), Praktek Higinitas dengan baik (Good Hygine Practice), Praktek Pabrik dengan baik</p>	<p>Tindakan Sanitasi dan fitosanitari (SPS) untuk produk pertanian, makanan dan kehutanan pada tahun 2015</p> <p>Menyelaraskan kerangka peraturan untuk produk pertanian yang berasal dari bioteknologi modern pada tahun 2015</p> <p>Menyelaraskan</p>

Tabel 1. Kegiatan Utama Pada Buku Pedoman Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (lanjutan)

<p>meningkatkan praktek laboratorium dan mengadaptasi kualitas dan sistem manajemen keselamatan sehingga dapat diterapkan untuk usaha kecil di ASEAN pada tahun 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyelaraskan Batas Maksimum Residu (Maximum Residue Limits) pestisida yang biasa digunakan untuk produk tanaman secara luas diperdagangkan sesuai dengan standar internasional/pedoman yang berlaku, pada tahun 2010 Menyelaraskan pedoman untuk penggunaan bahan kimia dalam budidaya dan langkah-langkah untuk menghilangkan penggunaan bahan kimia berbahaya tahun 2009 		<p>(Good Manufacturing Practice), dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP); untuk produk pertanian dan makanan dengan potensi perdagangan tahun 2012</p>	<p>standar keamanan dan kualitas untuk produk hortikultura dan produk pertanian untuk kepentingan ekonomi dalam kawasan ASEAN pada tahun 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyelaraskan pengontrolan kesehatan hewan (baik terestrial dan akuatik hewan) untuk keamanan makanan yang berasal dari hewan melalui skema standar manajemen bio -security tahun 2015
---	---	--	--

Sumber: ASEAN Economic Community blueprint, 2008

2.2 Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT)

Desa adalah perpaduan antara masyarakat dan lingkungan yang menghasilkan kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang saling berinteraksi (Bintarto, 1983). Pemberian nama desa ditentukan berdasarkan topografi desa itu sendiri seperti yang dijelaskan oleh Kartohadikoesoemo (1984) bahwa desa dibagi menjadi beberapa desa antara lain:

- a. Desa pertanian merupakan desa yang terdiri dari masyarakat pertanian yang membuka lahan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan bahan-bahan makanan.
- b. Desa perikanan dan pelayaran merupakan desa yang berada di tepi laut dengan hasil komoditas ikan yang bisa diperjual belikan kepada orang lain. Masyarakat yang ada di sana bekerja sebagai nelayan dan pengangkut ikan.
- c. Desa pasar (dagang) adalah suatu desa dengan masyarakat yang heterogen yang bertenu untuk menjual dan membeli dari masyarakat sekelilingnya.
- d. Desa istirahat (mengaso) adalah desa yang dijadikan tempat untuk beristirahat bagi para masyarakat yang mengadakan perjalanan jauh. Pada jaman dahulu desa mengaso ini digunakan para masyarakat untuk beristirahat dan memberi makanan kepada ternak mereka.
- e. Desa tambangan (penyeberangan) merupakan desa dengan masyarakat yang bekerja sebagai tukang penyeberang kendaraan-kendaraan dan orang menggunakan perahu. Desa ini berada di tepi sungai-sungai besar.
- f. Desa Tambakan berasal dari orang yang menemukan bibit ikan laut yang dapat dipelihara di daratan dalam air asin.

Desa pesisir adalah desa yang berada di kawasan peralihan antara daratan dan laut. Masyarakat desa pesisir ini mayoritas bekerja sebagai nelayan, pedagang ikan, dan pengangkut ikan. Hal ini terjadi karena kondisi fisik wilayah

merupakan wilayah pesisir yang mempunyai potensi komoditas pesisir (ikan, gurita, cumi, dan lain sebagainya) sehingga mempengaruhi profesi masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) merupakan salah satu program yang dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang memiliki tujuan yaitu mendorong desa pesisir yang ada di Indonesia untuk berkembang. Pengembangan Desa Pesisir Tangguh merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang menjadi satu kesatuan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Munculnya program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh bersumber dari empat permasalahan pokok antara lain:

- a. tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir yang mencapai 7,8 jiwa pada tahun 2011 (BPS, 2010 dalam KKP 2014),
- b. kerusakan sumberdaya pesisir yang semakin meluas (KKP 2014),
- c. rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan berkurangnya nilai-nilai budaya local (KKP 2014), dan
- d. rendahnya infrastruktur desa dan kesehatan pemukiman (KKP 2014).

Pengembangan Desa Pesisir Tangguh ini merupakan salah satu implementasi kebijakan Presiden mengenai peningkatan dan perluasan program yang pro-rakyat, dan wujud dari intervensi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam beberapa hal antara lain:

1. Menata desa pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir
2. Menghasilkan output yang dapat memberikan manfaat secara nyata bagi masyarakat pesisir sesuai dengan skala prioritas kebutuhan
3. Menjadikan masyarakat pesisir menjadi mandiri dalam memecahkan permasalahan
4. Mendorong masyarakat pesisir sebagai agen pembangunan.

Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh merupakan salah satu program yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di pesisir dan memanfaatkan sumberdaya pesisir yang ada. Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh ini berfokus pada lima kegiatan antara lain:



Gambar 4. Fokus kegiatan PDPT
Sumber: <http://pdpt-kkp.org>

1. **Bina Manusia**, yaitu kegiatan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat baik formal maupun informal, memperluas dan meningkatkan kerja sama, memperbaiki budaya kerja, gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan hemat serta menghilangkan sifat negatif boros dan konsumtif
2. **Bina Usaha**, yaitu kegiatan yang mencakup peningkatan keterampilan usaha, perluasan mata pencaharian alternatif, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan teknologi. Selain itu, program ini meningkatkan dan mempermudah akses terhadap sumber daya, teknologi, modal, pasar, dan informasi pembangunan. Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan

terbangun kemitraan dengan pelaku usaha dan terbangunnya sistem insentif administrasi serta pendanaan secara formal dan informal;

3. **Bina Sumberdaya**, yaitu upaya memperkuat kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya, revitalisasi hak ulayat dan hak masyarakat lokal, penerapan monitoring, controlling and surveillance dengan prinsip partisipasi masyarakat lokal, penerapan teknologi ramah lingkungan, mendorong pengembangan teknologi asli, merehabilitasi habitat, konservasi, dan memperkaya sumber daya;
4. **Bina Lingkungan atau Infrastruktur**, yaitu kegiatan yang mencakup pembangunan infrastruktur, rehabilitasi vegetasi pantai dan pengendalian pencemaran melalui pendekatan perencanaan dan pembangunan secara spasial dalam rangka mendorong peningkatan peran masyarakat pesisir dalam penataan dan pengelolaan lingkungan sekitarnya;
5. **Bina Siaga Bencana atau Perubahan Iklim**, yaitu kegiatan yang mencakup usaha-usaha pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim, rencana aksi desa dalam pengurangan risiko bencana, penyadaran masyarakat, latihan secara reguler, memudahkan akses data dan informasi bencana, pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (antara lain jalur evakuasi, shelter, struktur pelindung terhadap bencana, fasilitas kesehatan, dan cadangan strategis desa) yang menekankan pada partisipasi dan keswadayaan dari kelompok-kelompok sosial yang terdapat pada masyarakat/komunitas pesisir.

Pemerintah telah menetapkan beberapa kriteria-kriteria dalam pemilihan desa pesisir yang akan mendapatkan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh. Adapun setidaknya 3 kriteria yang harus dipenuhi agar mendapatkan Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh, kriteria-kriteria tersebut antara lain:

1. Lokasi desa pesisir rawan bencana dan perubahan iklim. Yang dimaksud bencana adalah suatu peristiwa yang diakibatkan oleh alam, perbuatan manusia, dan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia dan alam serta penyebab lainnya yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerusakan prasarana-sarana dan fasilitas umum, dan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat (Permen Mendagri No 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana)
2. Memiliki potensi ekonomi lokal yang unggul
3. Masyarakat pesisir miskin namun potensial aktif dan memiliki motivasi untuk memperbaiki kehidupannya
4. Kondisi pemukiman yang kumuh
5. Terjadi degradasi lingkungan pesisir, dan
6. Tingkat pelayanan dasar rendah.

Setelah terpenuhinya minimal 3 kriteria-kriteria di atas, kemudian ditetapkan desa pesisir oleh bupati atau walikota.

Kegiatan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh ini terdiri dari beberapa komponen-komponen antara lain:

1. Sosialisasi

Program PDPT ini disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui penyusunan bahan publikasi dan pertemuan di tingkat kabupaten/kota yang melibatkan Pemda, DKP, SKPD terkait, tim teknis, camat, perangkat desa/kelurahan, serta pemangku kepentingan yang lainnya.

2. Rencana Pengembangan Desa Pesisir

Rencana pengembangan desa pesisir (RPDP) merupakan pedoman untuk melaksanakan program pengembangan desa pesisir tangguh

selama 5 tahun yang telah ditetapkan kepala desa dengan mempertimbangkan profil desa, rencana jangka menengah desa (RPJM-Desa), hasil musyawarah perencanaan pengembangan desa (musrenbangdes) dan rencana tata ruang wilayah/rencana zonasi kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, PDPT ini dilaksanakan dengan adanya pendampingan dan dilaksanakan secara partisipatif.

3. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Dalam peningkatan kapasitas masyarakat desa bisa dilakukan dengan diberikannya kegiatan-kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan oleh fasilitator untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Sasaran kegiatan adalah KMP penerima BLM

4. BLM

BLM PDPT adalah stimulant program yang terdiri dari komponen:

- a. Penyediaan prasarana dan sarana siaga bencana atau perubahan iklim. Prasarana dan sarana siaga bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan serta upaya untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana (Permen Mendagri No 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana)
- b. Peningkatan dan atau perbaikan ekosistem pesisir
- c. Pembangunan dan atau perbaikan lingkungan atau infrastruktur
- d. Penyediaan sarana kegiatan usaha sekunder

Pengalokasian dana untuk kegiatan Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim, Bina Sumberdaya, dan Bina Lingkungan dan Infrastruktur sebesar 80% dari total dana BLM sedangkan 20%nya dialokasikan untuk kegiatan Bina Usaha.

5. Lokakarya Program

Lokakarya PDPT bertujuan untuk menyampaikan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan guna mendapatkan saran yang dapat menyempurnakan kegiatan di masa depan dan juga sebagai pendorong kegiatan pengembangan desa pesisir tangguh lainnya.

2.3 ENACT (*Enabling Community Action*) Model

Analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan ENACT (*Enabling Community Action*) Model. ENACT model merupakan salah satu pendekatan dalam memahami komunitas dengan ikut berpartisipasi aktif yang digunakan dalam menyusun rencana aksi masyarakat (Riniwati, 2014). Dalam model ini akan dilakukan pemetaan desa, peta kekuatan orang/lembaga yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan aksi masyarakat. Diagram Ven merupakan salah satu metode atau alat yang digunakan dalam ENACT model ini.

Diagram Ven sebagai alat ukur untuk melihat mobilitas masyarakat dalam bekerja. Mobilitas masyarakat dalam penelitian ini juga dilihat. Dengan mengetahui mobilitas masyarakat akan diketahui seberapa besar ancaman terhadap masyarakat yang berasal dari luar daerah penelitian. Semakin banyak dan jauh mobilitas masyarakat maka semakin besar pula ancaman yang berasal dari luar daerah tempat masyarakat tersebut berada. Selain itu, diagram ven juga digunakan untuk mengetahui seberapa besar kedekatan lembaga-lembaga baik formal maupun informal yang ada di sekitar masyarakat. Hal ini berguna sebagai sarana dalam melaksanakan suatu rencana aksi masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Menurut Kartasmita (2003), dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dapat menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1. upaya itu harus terarah (*targetted*). Ini yang secara populer disebut pemihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan

program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.

2. program mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.
3. menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu seperti telah disinggung di muka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan dipelihara secara sating menguntungkan dan memajukan.

Dengan mengetahui seberapa besar kedekatan masyarakat dengan lembaga-lembaga tersebut berfungsi sebagai salah satu cara untuk mendekati masyarakat dengan melalui lembaga yang dianggap dekat dalam melakukan suatu rencana aksi sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga merupakan jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan pihak luar yang akan melakukan suatu rencana aksi. Disamping itu, kedekatan lembaga dengan masyarakat merupakan indikator dalam mengukur baik atau buruknya suatu kinerja lembaga sehingga dapat dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan. Peningkatan kapasitas kelembagaan ini berfungsi dalam mendukung Masyarakat Ekonomi Asean.

Dengan meningkatkan kapasitas lembaga diharapkan dapat meminimalkan kekurangan dan memperkuat Desa Tambakrejo dalam mendukung Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yang sedang berlangsung saat ini dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

2.4 Lembaga dan Kelembagaan

Lembaga merupakan pola perilaku yang selalu berulang dan bersifat kokoh serta dihargai oleh masyarakat (Huntington, 1965 dalam Hendayana 2011). Menurut Uphoff (1986) dalam Hendayana (2011). lembaga adalah sekumpulan norma dan perilaku yang telah berlangsung dalam waktu yang lama dan digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Kelembagaan adalah suatu jaringan yang terdiri dari sejumlah orang atau lembaga untuk tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur (Hendayana, 2011). Dalam hal ini Lembaga dapat memiliki struktur yang tegas dan formal, dan lembaga dapat menjalankan satu fungsi kelembagaan atau lebih. Kelembagaan maupun lembaga mempunyai empat komponen, yaitu ; komponen pelaku, komponen kepentingan, komponen norma, serta komponen struktur. Kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga, negara, agama dan mendapatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan serta tempat perlindungan (Hendayana, 2011). Suatu lembaga dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga lembaga mempunyai fungsi. Selain itu, lembaga merupakan konsep yang berpadu dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya (Roucek dan Warren, 1984 dalam Anantayu 2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 menjelaskan yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat

sesuai dengan kebutuhan mempunyai tugas membantu pemerintah desa atau lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

Menurut Esman 1986 dalam Anantayu 2011 bahwa di dalam lembaga terdapat beberapa unsur sebagai indikator dalam penilaian kapasitas suatu lembaga yakni:

1. kepemimpinan, yang menunjuk pada kelompok orang yang secara aktif berkecimpung dalam perumusan doktrin dan program dari lembaga tersebut dan yang mengarahkan operasi-operasi dan hubungan-hubungannya dengan lingkungan tersebut.
2. spesifikasi nilai-nilai, tujuan-tujuan, dan metode-metode operasional yang mendasari tindakan sosial anggota.
3. program, menunjuk pada tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan dari fungsi-fungsi dan jasa-jasa yang merupakan keluaran dari lembaga tersebut.
4. sumberdaya-sumberdaya, yaitu masukan-masukan keuangan, fisik, manusia, teknologi dan penerangan dari lembaga tersebut. Terbentuknya struktur intern, yaitu struktur dan proses-proses yang diadakan untuk bekerjanya lembaga tersebut dan bagi pemeliharaannya.

Anantanyu (2009) menjelaskan beberapa indikator-indikator yang bisa digunakan dalam melihat pencapaian dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan antara lain:

1. Tujuan kelembagaan kelompok petani tercapai, artinya: adanya kejelasan tujuan, adanya kesesuaian tujuan dengan kebutuhan anggota, dan tingkat pemenuhan kebutuhan anggota oleh kelembagaan tinggi.

2. Fungsi dan peran kelembagaan berjalan, meliputi: adanya kemampuan memperoleh, mengatur, memelihara, dan mengerahkan informasi, tenaga kerja, modal, dan material, serta kemampuan mengelola konflik;
3. Adanya keinovatifan kelembagaan, meliputi: adanya peran kepemimpinan dalam kelembagaan, fungsi kepemimpinan dalam kelembagaan berjalan, adanya nilai-nilai yang mendasari kerjasama, adanya pembagian peran anggota, adanya pola kewenangan dalam kelembagaan, adanya komitmen anggota terhadap kelembagaan, tersedia sumber-sumber pendanaan, tersedia anggota memadai, dan adanya teknologi yang sesuai.
4. Keberlanjutan kelembagaan, meliputi: sentimen anggota baik, kesadaran anggota tinggi, kekompakan anggota terjadi, kepercayaan anggota besar, tersedia bantuan luar, pola komunikasi antar anggota dua arah, dan adanya kerjasama dengan pihak lain.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan bahwa terdapat unsur-unsur pengikat kelembagaan pelaku utama perikanan antara lain:

1. adanya kepentingan yang sama;
2. adanya motivasi untuk berkembang diantara mereka;
3. adanya saling mengenal dengan baik antara sesama anggotanya, akrab, dan saling percaya mempercayai;
4. adanya sentra/kluster/kawasan/areal/zona yang menjadi tanggungjawab bersama diantara anggotanya; adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas;
5. adanya pengelolaan administrasi, sarana dan prasarana serta keuangan secara bersama;

6. adanya kader yang berdedikasi untuk menggerakkan para pelaku utama dan kepemimpinannya diterima oleh sesama pelaku utama lainnya;
7. adanya kegiatan yang dapat memberi manfaat bagi sebagian besar anggotanya; adanya dorongan dari tokoh masyarakat setempat untuk mendukung program yang telah ditentukan;
8. adanya jejaring kerja/usaha serta akses terhadap kelembagaan keuangan dan pasar; memiliki akses terhadap teknologi dan informasi; dan unsur pengikat lainnya.

Sedangkan pada KEP.14/MEN/2012, peningkatan kelembagaan pelaku utama kegiatan perikanan dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan yaitu:

- a. Peningkatan peran lembaga dalam memajukan usaha anggotanya;
- b. Peningkatan kemampuan keterampilan berproduksi bagi pelaku utama yang
- c. bergabung sebagai anggota;
- d. Peningkatan kemampuan administrasi usaha, yaitu mencatat semua transaksi
- e. bisnisnya;
- f. Peningkatan kemampuan bernegosiasi dan berinteraksi dalam bisnis bidang
- g. kelautan dan perikanan; dan
- h. Peningkatan kemampuan berorganisasi dan bekerjasama antar lembaga.

2.5 Profil Desa

Desa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan yang dimaksud dengan profil desa dan kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber

daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007). Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat profil desa dan kelurahan sebagai berikut:

Tabel 2. Pedoman Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan

Jenis Data	Keterangan
Keluarga	Data dasar keluarga berisikan gambaran menyeluruh potensi dan perkembangan keluarga yang meliputi: a.potensi sumber daya manusia; b.perkembangan kesehatan; c.perkembangan pendidikan; d.penguasaan aset ekonomi dan sosial keluarga; e.partisipasi anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;f.berbagai permasalahan kesejahteraan keluarga; dan g.perkembangan keamanan dan ketertiban di lingkungannya.
Sumberdaya alam	Data sumberdaya alam berisikan gambaran menyeluruh potensi dan perkembangan sumberdaya alam yang meliputi: a. potensi umum yang meliputi batas dan luas wilayah, iklim, jenis dan kesuburan tanah,orbitasi, bentangan wilayah dan letak; b. pertanian; c. perkebunan; d. kehutanan; e. peternakan; f. perikanan; g. bahan galian; h. sumber daya air; i. kualitas lingkungan; j. ruang publik/taman; dan k. wisata.
Sumberdaya manusia	Data sumberdaya manusia berisikan gambaran menyeluruh potensi dan perkembangan sumberdaya manusia yang meliputi: a.jumlah; b. usia; c. pendidikan; d. mata pencaharian pokok; e. agama dan aliran kepercayaan; f. kewarganegaraan; g. etnis/suku bangsa; h.cacat fisik dan mental; dan i.tenaga kerja
Sumberdaya kelembagaan	Data sumberdaya kelembagaan berisikan gambaran menyeluruh potensi dan perkembangan kelembagaan yang meliputi: a. lembaga pemerintahan desa dan kelurahan; b. lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan; c. lembaga social kemasyarakatan; d. organisasi profesi; e. partai politik; f. lembaga perekonomian; g. lembaga pendidikan; h.lembaga adat; dan



Tabel 2. Pedoman Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan (lanjutan)

	i. lembaga keamanan dan ketertiban
Prasarana dan sarana	Data prasarana dan sarana berisikan gambaran menyeluruh potensi dan perkembangan prasarana dan sarana yang meliputi: a. transportasi; b. informasi dan komunikasi; c. prasarana air bersih dan sanitasi; d. prasarana dan kondisi irigasi; e. prasarana dan sarana pemerintahan; f. prasarana dan sarana lembaga kemasyarakatan; g. prasarana peribadatan; h. prasarana olah raga; i. prasarana dan sarana kesehatan; j. prasarana dan sarana pendidikan; k. prasarana dan sarana energi dan penerangan; l. prasarana dan sarana hiburan dan wisata; dan m. prasarana dan sarana kebersihan

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007

PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 65, bahwa perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dimana salah satu bentuknya adalah profil desa.

2.6 Kriteria Kesejahteraan

Pada tahun 2000 BPS melakukan Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin (SPKPM 2000) untuk mengetahui karakteristik-karakteristik rumah tangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual (pendekatan 16 Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008 kebutuhan dasar/garis kemiskinan). Hal ini menjadi sangat penting karena pengukuran makro (basic needs) tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga/penduduk miskin di lapangan. Informasi ini berguna untuk penentuan sasaran rumah tangga program pengentasan kemiskinan (intervensi program). Cakupan wilayah studi meliputi tujuh provinsi, yaitu Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

Dari hasil SPKPM 2000 tersebut, diperoleh 8 variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan rumah tangga miskin di lapangan. Skor 1 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan kemiskinan dan skor 0 mengacu

kepada sifat-sifat yang mencirikan ketidakmiskinan. Kedelapan variabel tersebut adalah:

1. Luas Lantai Perkapita :

- ≤ 8 m² (skor 1)
- > 8 m² (skor 0)

2. Jenis Lantai :

- Tanah (skor 1)
- Bukan Tanah (skor 0)

3. Air Minum/Ketersediaan Air Bersih :

- Air hujan/sumur tidak terlindung (skor 1)
- Ledeng/PAM/sumur terlindung (skor 0)

4. Jenis Jamban/WC :

- Tidak Ada (skor 1)
- Bersama/Sendiri (skor 0)

5. Kepemilikan Asset :

- Tidak Punya Asset (skor 1)
- Punya Asset (skor 0)

6. Pendapatan (total pendapatan per bulan) :

- ≤ 350.000 (skor 1)
- > 350.000 (skor 0)

7. Pengeluaran (persentase pengeluaran untuk makanan) :

- 80 persen + (skor 1)
- < 80 persen (skor 0)

Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008 17

8. Konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam) :

- Tidak ada/ada, tapi tidak bervariasi (skor 1)
- Ada, bervariasi (skor 0)

Kedelapan variabel tersebut diperoleh dengan menggunakan metode stepwise logistic regression dan misklasifikasi yang dihasilkan sekitar 17 persen. Skor batas yang digunakan adalah 5 (lima) yang didasarkan atas modus total skor dari domain rumah tangga miskin secara konseptual. Dengan demikian apabila suatu rumah tangga mempunyai minimal 5 (lima) ciri miskin maka rumah tangga tersebut digolongkan sebagai rumah tangga miskin.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1999 dengan melakukan pendataan keluarga dan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III-Plus).

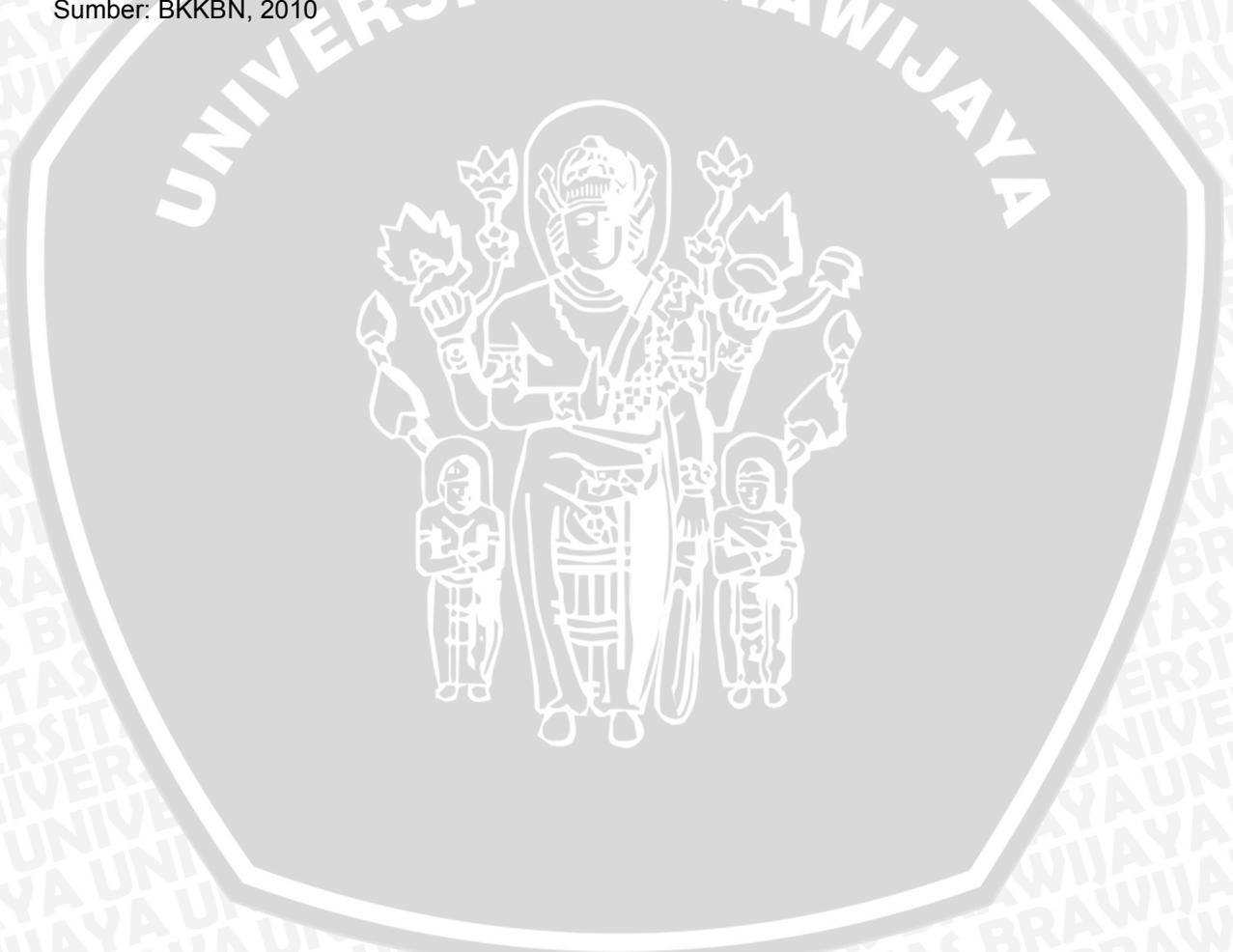
Tabel 3. Indikator-indikator kesejahteraan keluarga berdasarkan BKKBN

Indikator Kategori	Indikator-Indikator		Keterangan
	Ekonomi	Non-ekonomi	
Keluarga Pra Sejahtera (Sangat Miskin)	a. Makan dua kali atau lebih b. Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas c. Bagian terluas lantai bukan dari tanah	a. Melaksanakan ibadah b. Bila sakit ke sarana kesehatan	Tidak terpenuhinya satu atau lebih indikator
Keluarga Sejahtera I (Miskin)	a. Makan daging/ ikan/telur sekali dalam seminggu b. Memiliki satu stel pakaian dalam setahun	a. Ibadah teratur b. Tidak sakit-sakitan dalam tiga bulan terakhir c. Berpenghasilan tetap d. Usia 10-60 tahun dapat membaca dan menulis huruf latin e. Usia 6-15 tahun bersekolah f. Anak lebih dari dua dan berKB	Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih indikator karena alasan ekonomi
Keluarga Sejahtera II	a. Memiliki tabungan keluarga b. Rekreasi bersama 6 bulan sekali c. Menggunakan sarana transportasi d. Memperoleh berita dari	a. Makan bersama sambil berkomunikasi b. Mengikuti kegiatan masyarakat	Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih indikator karena alasan ekonomi

Tabel 2. Indikator-indikator kesejahteraan keluarga berdasarkan BKKBN (lanjutan)

	surat kabar, radio, TV, dan majalah		
Keluarga Sejahtera III	Terpenuhi indikator :	Belum terpenuhinya indikator:	
	a. Memiliki tabungan keluarga b. Rekreasi bersama 6 bulan sekali c. Menggunakan sarana transportasi d. Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah	a. Aktif memberikan sumbangan material secara teratur b. Aktif sebagai pengurus organisasi	
Keluarga Sejahtera III Plus	Sudah terpenuhinya indikator: a. Aktif memberikan sumbangan material secara teratur b. Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan		

Sumber: BKKBN, 2010



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang berjudul Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Tahun 2013 Dan Tahun 2014 Dalam Menyiapkan Desa Tambakrejo Kabupaten Malang-Jawa Timur Dalam Mendukung Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 berlokasi di Desa Tambakrejo Kabupaten Malang bagian selatan. Penelitian dilakukan pada bulan Maret-April 2015.

3.2 Obyek Penelitian

Pada penelitian ini obyek dari penelitian adalah masyarakat Desa Tambakrejo, masyarakat yang ikut andil dalam program PDPT baik secara langsung maupun tidak langsung, dan lembaga-lembaga yang berada dalam naungan desa. Namun, untuk mendalami kondisi lokasi penelitian, peneliti juga membutuhkan informasi mengenai infrastruktur tempat tersebut, keadaan geografi yang berkaitan dengan PDPT dan MEA.

3.3 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2012), metode penelitian kualitatif atau *naturalistik* adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah tanpa adanya setingan dan data yang dihasilkan bersifat kualitatif sehingga hasil dari analisa penelitian ini juga bersifat kualitatif. Berdasarkan cara pengumpulan data, metode kualitatif terdiri dari tiga cara pengumpulan data: (1) wawancara mendalam dengan format pertanyaan terbuka; (2) observasi langsung; dan (3) pemanfaatan dokumen tertulis yang berasal dari pertanyaan terbuka saat wawancara, buku harian seseorang maupun catatan program (Patton, 2009).

Menurut *Patton* (2009), metode kualitatif secara khusus menampilkan kekayaan informasi tentang banyak jumlah orang yang terbatas dan kasus. Perincian dan kekayaan informasi didapat dari kutipan langsung dan deskripsi yang teliti tentang kejadian, program, orang, interaksi dan perilaku yang diamati oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif tidak bisa menentukan hipotesa-hipotesa akan hasil yang dicapai mengingat penelitian kualitatif merupakan penelitian yang secara alamiah tanpa adanya scenario-skenario sehingga hasil bisa dicapai ketika data-data yang ada dilapang terkumpul dan data bersifat real/ tanpa adanya rekayasa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau metode yang digunakan dalam mendapatkan dan mengumpulkan data-data/informasi-informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Berikut adalah teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini:

3.4.1 Wawancara

Menurut *Black* (2001); *Patton* (2009), wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi antara peneliti dan narasumber. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian. Wawancara langsung dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan dengan berhadapan secara langsung kepada narasumber sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan tertulis yang diberikan kepada narasumber untuk dijawab secara tertulis misal kuisioner. Dalam pemberian pertanyaan bisa dilakukan dengan pertanyaan secara terbuka maupun tertutup. Pertanyaan terbuka memberikan jawaban secara

mendalam sedangkan pertanyaan tertutup memberikan alternatif-alternatif jawaban yang dapat memberi bantuan narasumber untuk menjawab. Wawancara dilakukan dengan masyarakat desa yang secara langsung ikut dalam pengerjaan PDPT dan masyarakat desa yang tidak langsung ikut dalam pengerjaan PDPT. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuisisioner.

3.4.2 Observasi

Menurut *Black* (2001), observasi adalah mengamati (*watching*) dan mendengar (*listening*) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap berbagai kegiatan dan keadaan di lokasi penelitian yang terkait dengan tujuan penelitian. Peneliti dituntut untuk lebih peka dalam menangkap informasi-informasi/pesan-pesan *non-verbal* dengan melihat perilaku dan kejadian-kejadian yang ada di lapangan secara alamiah selama kurun waktu yang telah ditentukan.

Wawancara dan observasi merupakan teknik yang saling memperkuat sebagai jembatan dalam memahami tema terutama saat menganalisa data (*Patton*, 2009). Observasi menghasilkan data-data rinci dan mendalam dari apa yang dilakukan selama di lapangan karena peneliti terlibat secara langsung sehingga mampu memahami karakteristik baik perilaku masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Observasi yang dilakukan adalah mengobservasi tentang keadaan geografi lapangan, perilaku masyarakat Desa Tambakrejo, prasarana dan sarana yang ada di Desa Tambakrejo.

3.4.3 Focus Group Discussion (FGD)

Focus group discussion (FGD) merupakan suatu teknik pengumpulan data mengenai suatu permasalahan dengan diskusi suatu kelompok (Irwanto, 1988 dalam Suhaimi 1999). Menurut Paramita (2013), FGD merupakan

teknik pengambilan data pada penelitian kualitatif yang bertujuan menemukan makna pada suatu permasalahan tertentu berdasarkan pemahaman kelompok. Dalam proses FGD, peneliti menjadi moderator yang bersifat netral dan pasif dengan tidak memihak dan lebih banyak mendengar dari pada mengarahkan peserta FGD. Teknik pengambilan data secara FGD ini memiliki kelebihan antara lain menghemat biaya dan waktu sedangkan kekurangan dari FGD ini adalah menyatukan anggota-anggota dalam suatu kelompok pada waktu dan tempat yang sama.

Kegiatan FGD ini diikuti oleh beberapa perwakilan anggota kelompok masyarakat (ketua dan anggota) dan perwakilan dari masyarakat yang diwakili berdasarkan mata pencaharian serta beberapa perangkat desa. Pada penelitian ini FGD yang dilakukan adalah membahas tentang permasalahan kerusakan sumberdaya alam beserta penyebabnya dengan memberikan rangking 1-3 pada kerusakan sumberdaya alam dan penyebabnya yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti. Selain itu pada kegiatan FGD juga dilakukan perangkingan tentang kedekatan responde dengan lembaga apa saja. Hasil FGD tentang kerusakan sumberdaya alam beserta penyebabnya berguna dalam menemukan permasalahan sumberdaya alam beserta penyebabnya yang lebih dahulu diselesaikan. Mengingat keterbatasan biaya yang dimiliki desa yang tidak bisa secara bersama-sama menyelesaikan semua permasalahan kerusakan sumberdaya alam. Hasil dari kegiatan tersebut disajikan dalam bentuk tabel yang berisikan tentang hasil perengkingan kerusakan sumberdaya alam beserta penyebabnya.

Sedangkan hasil FGD mengenai kedekatan masyarakat dengan lembaga-lembaga yang ada di desa baik formal maupun non formal berguna dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan sumberdaya manusia melalui lembaga yang dianggap dekat oleh masyarakat dengan

harapan jika nantinya ada program pemberdayaan manusia dan peningkatan kapasitas kelembagaan bisa berjalan dengan lancar. Hasil dari kegiatan FGD tentang kedekatan masyarakat dengan lembaga disajikan dalam bentuk diagram vens.

3.4.4 Studi Pustaka

Pustaka merupakan berbagai kumpulan-kumpulan informasi baik dalam bentuk buku, *e-book*, artikel, maupun jurnal-jurnal. Studi pustaka adalah mengumpulkan dan mempelajari informasi-informasi yang bersangkutan dengan penelitian bersumber dari buku, jurnal, dan artikel dimana informasi-informasi tersebut dapat mendukung atau menentang data-data dalam penulisan penelitian skripsi sehingga memungkinkan ada atau tidaknya kesesuaian teori yang telah ada selama ini dengan data yang didapat. Informasi-informasi tersebut digunakan sebagai acuan, pedoman, atau bahkan pembandingan data untuk diperolehnya suatu kesimpulan sehingga dapat menjawab tujuan dari penelitian yang dilakukan dan juga bisa didapatkan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait.

3.4.5 Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif adalah teknik observasi dimana *observer* (pengamat) ikut aktif berpartisipasi dalam aktivitas. Partisipasi aktif dilakukan dengan mengikuti rangkaian kegiatan sehari-sehari masyarakat sekitar untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan penulisan skripsi (Rahayu, 2010). Partisipasi aktif sangat dibutuhkan dalam metode kualitatif. Partisipasi aktif merupakan metode pendekatan dalam menggali informasi-informasi yang sifatnya rahasia.

Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sehari-hari dari narasumber diharapkan adanya interaksi antara narasumber dengan peneliti secara informal sehingga didapatkan data yang lebih rinci dan mendalam. Adanya

interaksi/perbincangan secara informal antara peneliti dan narasumber merupakan suatu tanda bahwa narasumber mulai membuka diri terhadap peneliti sehingga memungkinkan peneliti untuk menanyakan hal-hal bersifat rinci dan rahasia yang biasanya sulit untuk didapatkan dalam waktu singkat. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan membuat peta potensi Desa Tambakrejo, *focus group discussion* (FGD), dan membuat diagram vens kedekatan lembaga dan mobilisasi dengan menggunakan ENACT model.

3.4.6 Kuisiонер

Kuisiонер adalah teknik pengumpulan data pada suatu penelitian dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan- pertanyaan secara tertulis untuk diberikan dan dijawab oleh narasumber (Sugiyono, 2012). Tujuan utama dari kuisiонер adalah memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan memperoleh informasi dengan validitas dan realibilitas tertinggi (Effendi, 1989).

Jenis pertanyaan yang digunakan untuk menyusun adalah jenis pertanyaan terbuka. Menurut Effendi,dkk (1989), pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang variasi jawabannya belum ditentukan terlebih dahulu sehingga narasumber bebas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber dengan tidak memberikan pilihan jawaban terhadap respon dengan kata lain narasumber dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan jawaban narasumber. Pertanyaan terbuka memberikan kebebasan terhadap narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Pada penelitian ini jenis pertanyaan yang digunakan dalam kuisiонер adalah jenis pertanyaan terbuka. Peneliti membebaskan narasumbernya

untuk menuliskan jawabannya sesuai dengan informasi yang narasumber miliki. Peneliti menginginkan adanya kerincian dan kedalaman atas informasi yang didapat dari narasumber.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data berasal dari mana saja data-data yang didapat. Data-data bisa didapat dari buku, keterangan orang, dan masih banyak lainnya. Berikut adalah jenis dan sumber data pada penelitian ini:

3.5.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung dikumpulkan sendiri oleh peneliti di lapang. Dalam memperoleh data primer ini peneliti telah mencatat dan mengamati dari hasil wawancara dan observasi. Data primer dalam penelitian skripsi meliputi prasarana dan sarana yang ada di desa, pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, lembaga-lembaga yang ada di sana, dan lain sebagainya yang didapat melalui pengisian kuisioner. Data primer lainnya berupa hasil wawancara dengan narasumber, foto dan rekaman kegiatan-kegiatan masyarakat sekitar yang digunakan sebagai bukti nyata untuk mendukung pernyataan-pernyataan yang tertulis dalam penulisan skripsi.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang pengumpulannya dilakukan oleh pihak lain. Metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan studi pustaka. Dalam penelitian ini, data sekunder yang akan diambil adalah keadaan topografi, demografi, dan geografi yang didapatkan dari Kantor Kepala Desa Tambakrejo, Laporan akhir PDPT, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des), dan teori-teori

yang sudah ada bisa dijadikan acuan dalam menganalisis data-data yang didapatkan dari lapang.

3.6 Populasi dan Sampel

Dalam melakukan penelitian kualitatif, perlu diketahui dan ditentukan populasi dan sampel yang akan diteliti. Berikut adalah populasi dan sampel dalam penelitian ini:

3.6.1 Populasi

Populasi adalah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai karakteristik yang sudah ditentukan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012). Jadi obyek/subyek bukan saja orang tetapi juga berupa benda yang seluruh karakteristiknya dipelajari oleh peneliti. Populasi atau universe adalah jumlah dari keseluruhan unit analisa yang mempunyai ciri khusus untuk diduga (Effendi, dkk. 1989). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Tambakrejo yang terdiri dari berbagai jenis profesi dan masyarakat baik yang ikut dalam beberapa kelompok-kelompok masyarakat seperti POKMASWAS, PKK, LPMD, komunitas gereja, komunitas pengajian, dan lain sebagainya maupun yang tidak ikut sama sekali dengan kelompok-kelompok yang dimaksud seperti di atas.

3.6.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2012), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika populasinya besar maka peneliti hanya mengambil sebagian dari yang dimiliki populasi tersebut untuk diteliti. Peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik stratifikasi random sampling. Stratifikasi yang dimaksud adalah stratifikasi berdasarkan jenis mata pencaharian masyarakat Desa Tambakrejo sedangkan yang dimaksud dalam random sampling adalah dari setiap jenis mata pencaharian diambil

dua narasumber secara acak. Hal tersebut dilakukan karena data yang dihasilkan cenderung sama antara narasumber satu dengan yang lainnya. Sample yang menggunakan metode stratifikasi random sampling meliputi masyarakat Desa Tambakrejo secara keseluruhan dengan berdasarkan mata pencaharian.

3.7 Teknik Pengumpulan Sampel

Teknik pempulan sampel merupakan suatu teknik untuk mendapatkan sampel. Untuk menentukan sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti telah menetapkan objek yang sebelumnya sudah dipertimbangkan terlebih dahulu untuk diteliti. Menurut Sugiyono (2012), *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pada metode ini, peneliti secara sengaja menentukan sendiri sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian. Purposive sampling yang dimaksud adalah kelompok-kelompok desa (POKMASWAS, kelompok nelayan, kelompok tani, dan lain sebagainya) dan perangkat desa (kepala desa, kepala dusun, sekretaris desa, RT, dan RW). Dalam mendapatkan informasi dari narasumber peneliti mendatangi narasumber dan melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan pada kuisisioner.

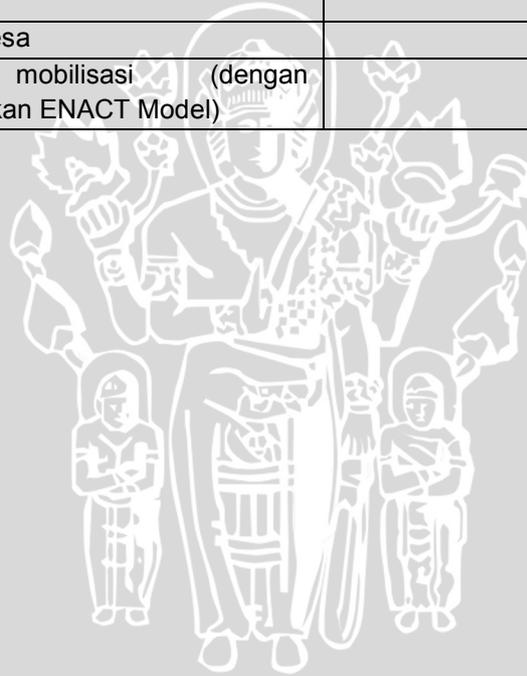
3.8 Analisa Data

Analisa data digunakan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah ditentukan. Berikut adalah indikator yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang telah dipaparkan pada lembar sebelumnya:

1. Untuk menjawab tujuan yang pertama tentang profil desa dapat diketahui indikator-indikator di bawah ini:

Tabel 4. Indikator untuk membuat profil desa

No	Indikator	Fakta
1.	Geografi	
2.	Monografi desa	
3.	Keadaan umum kegiatan perikanan	
4.	Infrastruktur	
5.	Organisasi	
6.	Mapping desa	
7.	Bagan mobilisasi (dengan menggunakan ENACT Model)	



2. Untuk menjawab tujuan kedua mengenai kedekatan dan peran lembaga-lembaga masyarakat di Desa Tambakrejo

Tabel 5. Kedekatan lembaga dan peran lembaga desa

Rangking	Jenis lembaga	Peran dan Fungsi	Keterangan
1	Kelompok nelayan		Penilaian kedekatan masyarakat dengan lembaga berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan: 1. Kepentingan yang sama; 2. Motivasi untuk maju; 3. Saling mengenal dengan akrab, dan saling percaya; dan 4. Rasa tanggung jawab 5. Kemandirian 6. Partisipasi 7. Kemitraan usaha 8. Pengaambilan keputusan secara musyawarah mufakat Serta ditambahkannya beberapa indikator penilaian lainnya yaitu: 1. Terciptanya keharmonisan 2. Memiliki harkat dan martabat yang baik
2	Komunitas gereja		
3	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		
4	Koperasi		
5	Kelompok pengajian		
6	Water Rescue		
7	PUSKESMAS		
8	Polisi		
	Dan seterusnya		

Setelah dilakukannya perangkingan kedekatan lembaga-lembaga tersebut, kemudian hasil perangkingan tersebut disajikan menggunakan diagram ven yang termasuk dalam metode ENACT model.

3. Untuk menjawab tujuan yang ketiga, PDPT Desa Tambakrejo dalam mendukung MEA 2015 dapat diketahui indikator-indikator di bawah ini yaitu:

Tabel 6. Indikator-indikator dalam mendukung MEA 2015

No	Indikator	Teori	Fakta
1.	Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> • BKKBN (2015) mengelompokkan beberapa kelompok keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya yaitu keluarga pra sejahtera (sangat miskin), keluarga sejahtera I (miskin), keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III, dan keluarga sejahtera III plus. • Sedangkan indikator-indikator kesejahteraan menurut BPS antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan 2. Semakin tinggi tingkat status pekerjaan maka semakin tinggi pula kesejahteraannya 3. Jenis lantai yang berasal dari bukan tanah menandakan tingginya tingkat kesejahteraan • Departemen kesehatan (2005) dalam Adisasmito (2008), menambahkan bahwa masyarakat sejahtera apabila; <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya tingkat akses pelayanan kesehatan 2. Tidak adanya masyarakat yang putus sekolah 3. Frekuensi makanan pokok minimal 2 kali sehari 4. Tidak adanya pemutusan hubungan kerja yang dialami kepala keluarga • Bappenas (2005) dalam Adisasmito (2008) menyatakan bahwa masyarakat yang sejahtera adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya akses dan layanan pendidikan 2. Tingginya kesempatan bekerja dan berusaha 3. Kondisi lingkungan hidup dan sumber daya 	

Tabel 6. Indikator-indikator dalam mendukung MEA 2015 (lanjutan)

			alam mendukung 4. Terciptanya rasa aman dan nyaman 5. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang ada sehingga mempermudah dalam perolehan informasi-informasi 6. Tingginya fasilitas sanitasi
2.	Infrastruktur	Jalan dan jembatan	Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan meliputi: 1. Aksesibilitas: jalan menghubungkan pusat kegiatan-kegiatan 2. Mobilitas: jalan memberikan kemudahan untuk pemakainya dalam berkegiatan sehari-hari 3. Keselamatan: jalan yang menjamin keselamatan para pengguna 4. Kecepatan: jalan dapat digunakan pada kecepatan yang telah direncanakan
		Listrik	Rendahnya gangguan dalam penggunaan listrik Kemudahan dalam mendapatkan sumberdaya listrik Tingginya ketersediaan sumberdaya listrik
		MCK	Memiliki dinding yang terbuat dari batu bata dan semen Lantai beralkas keramik Beratapkan genteng Memiliki pintu Ketersediaan sumberdaya air bersih yang cukup Terpeliharanya kebersihan MCK dan lingkungan sekitar

Tabel 6. Indikator-indikator dalam mendukung MEA 2015 (lanjutan)

	<p>Teknologi dan komunikasi</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi pasal 13c menyatakan bahwa pelaksana penyedia telekomunikasi wajib sekurang-kurangnya memenuhi layanan telekomunikasi dengan kemampuan dipanggil dan memanggil; Tingginya kemampuan masyarakat dalam penggunaan teknologi seperti handphone, computer, penggunaan internet. Konektivitas dan kapasitas.dengan tingginya tingkat kemudahan dalam mendapatkan jaringan dalam berkomunikasi dan kemudahan dalam pengaksesan informasi melalui internet yang dapat meningkatkan pengetahuan menunjukkan bahwa masyarakat dalam kondisi sejahtera.</p>	
	<p>Pariwisata</p>	<p>Menurut UNESCO (2009), komponen-komponen pendukung wisata antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transportasi dan infrastruktur • Daya tarik wisata • Akomodasi (penginapan) • Tempat makan • Jasa pendukung (pemandu, penjualan cendra mata, ketersediaan informasi, dan lain sebagainya) <p>Peraturan Pemerintah RI No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025, pariwisata memiliki komponen-komponen yang disebut saptapesona yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aman 2. Tertib 3. Bersih 4. Indah 5. Ramah, dan 	



Tabel 6. Indikator-indikator dalam mendukung MEA 2015 (lanjutan)

		6. Kenangan	
	Pelabuhan perikanan	<p>Berdasarkan KEP 294/ DJ-PSDKP/2010 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Pengawasan Sumberdaya Perikanan, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan seperti meliputi dermaga di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, kran-kran untuk bongkar muat barang, gudang laut (transito) dan tempat-tempat penyimpanan di mana kapal membongkar muatannya dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan.</p>	
	Tempat pemasaran dan pelelangan ikan	<p>Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi, tempat pemasaran ikan harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terlindung dan mempunyai dinding yang mudah untuk dibersihkan; b. mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan dan c. disanitasi, dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem pembuangan limbah cair yang higienis; d. dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan dan toilet dalam jumlah yang mencukupi. Tempat cuci tangan harus dilengkapi e. dengan bahan pencuci tangan dan pengering sekali pakai f. mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil 	

Tabel 6. Indikator-indikator dalam mendukung MEA 2015 (lanjutan)

		<p>perikanan;</p> <p>g. kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan berada dalam tempat pemasaran ikan/pasar grosir;</p> <p>h. dibersihkan secara teratur minimal setiap selesai penjualan</p> <p>i. dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok, meludah, makan dan minum, dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas</p> <p>j. mempunyai fasilitas pasokan air bersih dan atau air laut bersih yang cukup</p> <p>k. mempunyai wadah penampungan produk yang bersih, tahan karat, kedap air dan mudah dibersihkan dan</p> <p>l. mempunyai penampungan pengolahan limbah.</p>	
--	--	--	--



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Desa Tambakrejo

4.1.1 Sejarah Desa Tambakrejo

Desa Tambakrejo didirikan pada tahun 1887 oleh tiga rombongan yang terdiri dari Jogja, Mataram, dan Jombang yang dipimpin oleh Kyai Katam yang memimpin untuk membuka hutan Tamban dan Kyai Aser yang memimpin dalam membuka hutan Tambak Asri. Kata Tamban berasal dari bahasa Jawa yaitu tombo yang berarti obat. Pada tanggal 11 Februari tahun 1897 Desa Tambakrejo resmi dibuka dibawah pimpinan Bapak Boegiman/ Bapak Sumantri yang berakhir masa jabatannya pada tahun 1906. Kata Tambakrejo ini merupakan sebuah harapan jika nantinya ada tambak maka desa menjadi rejo. Kata rejo ini sendiri berasal dari bahasa jawa yang berarti ramai. Pada saat itu Desa Tambakrejo terdiri dari Dusun Tambak Asri dan Kecamatan Dampit. (Desa Tambakrejo, 2014).

Pada tahun 1907, diadakan pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Dusun Tambak Asri. Kemenangan itu salah satunya disebabkan oleh jumlah penduduk pada saat itu tinggal sedikit karena wabah penyakit malaria banyak penduduk desa yang keluar dari desa. Pada tahun 1909 Dusun Tambak Asri bergabung dengan Desa Sitarjo sedangkan Desa Tambakrejo bergabung dengan Dusun Sendang Biru (Desa Tambakrejo, 2014).

4.1.2 Pemerintahan Desa Tambakrejo

Dalam suatu pemerintahan khususnya desa, pastinya ada harapan atau cita-cita (visi) yang diinginkan oleh para penduduknya. Begitu pula dengan Desa Tambakrejo. Juga mempunyai cita-cita, harapan, visi yaitu **“terwujudnya Desa**

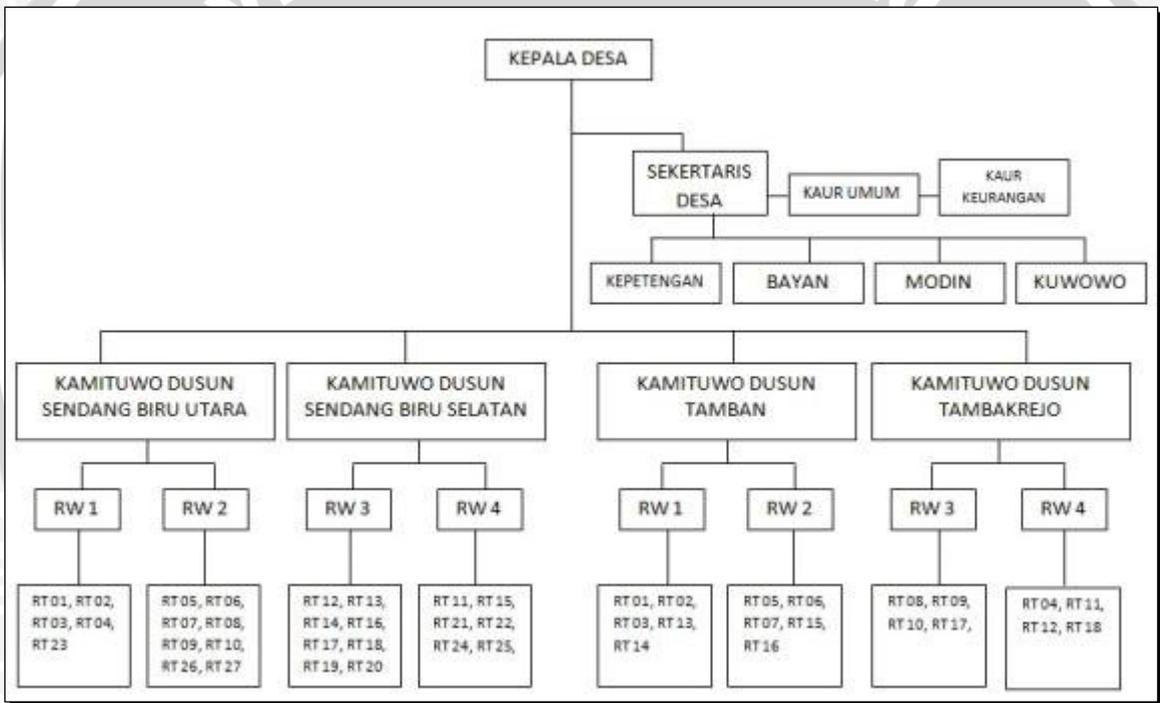
Tambakrejo yang rukun dan makmur serta terdepan dalam bidang pertanian dan perekonomian.”

Untuk mewujudkan visi Desa Tambakrejo maka diperlukan langkah-langkah yang diperlukan dalam pencapaian visi yang disebut dengan misi, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal maka disusunlah misi Desa Tambakrejo sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yang Maha Esa.
2. Mewujudkan kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama keyakinan, organisasi, suku, budaya, dan hal-hal lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun dan meningkatkan pelayanan hasil pengelolaan potensi yang ada secara optimal dan berkelanjutan.
4. Menata pemerintahan Desa Tambakrejo yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.
7. Menumbuhkembangkan kelompok-kelompok usaha yang ada dan memfasilitasi kelompok-kelompok tersebut untuk bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait maupun lembaga swasta.
8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
9. Luasnya pekarangan penduduk yang dapat ditanami buah-buahan, kayu untuk bangunan (sengon, jati,dll) untuk melestarikan lingkungan hidup
10. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses untuk seluruh warga yang mampu menghasilkan insan yang berintelektual, inovatif, dan berjiwa entrepreneur.

11. Membangun dan mendorong usaha-usaha pengembangan dan pengoptimalisasian sector-sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasil.

Pelaksanaan misi-misi di atas dipelukan para *stakeholder* yang ditunjuk oleh masyarakat yang dianggap mempunyai kemampuan dalam mewujudkan visi dengan misi-misi yang sudah ditetapkan. Para *stakeholder* ini merupakan perwakilan masyarakat yang bertugas untuk memandu masyarakat dalam meraih visi yang disepakati bersama. Berikut merupakan struktur organisasi Desa Tambakrejo:



Gambar 5. Struktur organisasi pemerintahan Desa Tambakrejo Tahun 2014-2019

Sumber: Desa Tambakrejo, 2013

Kepala desa bertugas mewakili desa baik di dalam desa maupun luar desa dan membina kehidupan warga desa. Sekretaris desa bertugas melayani warga desa dalam melakukan kegiatan administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP, akte kelahiran dan kegiatan admisnistrasi lainnya serta membantu kepala desa. Kaur umum bertugas membantu sekretaris desa dalam melaksanakan kegiatan

administrasi. Kaur keuangan bertugas melaksanakan pengelolaan terhadap dana yang dimiliki desa. Modin bertugas dalam pengurusan kematian, keagamaan, kesehatan, pemberian bantuan dan penggalangan dana sosial. Bayan bertugas melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan, informasi dan telekomunikasi, pariwisata, perkreditan desa, menyusun karang taruna dan tugas-tugas yang diberikan kepala desa. Kamituwo bertugas membantu kepala desa melaksanakan pemerintahan di bagian dukuh. Kuwowo bertugas dalam bidang tata ruang dan pembangunan desa. Kepetengan melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban desa.

Tabel 7. Daftar Nama *Stakeholder* Pemerintah Desa Tambakrejo Tahun 2011-2015

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1	Sudarsono	Sendang Biru, RT 08 / RW 02	Kepala Desa
2	Febriana Kristianti	Tamban, RT 01 / RW 01	Sekretaris Desa
3	Dwi Adi Yulianto	Sendang Biru, RT 09 / RW 02	Kaur Umum
4	Pramujo H. Satoto	Sendang Biru, RT 05 / RW 02	Kaur Keuangan
5	Nanot Eko Adi S	Tamban, RT 06 / RW 02	Kamituwo
6	Sukirno	Tamban, RT 01 / RW 01	Kuwowo
7	Sih Sukoreno	Tamban, RT 02 / RW 01	Kepetengan
8	Eriyo	Sendang Biru, RT 06 / RW 02	Kamituwo
9	Adi Candra Kartika	Sendang Biru, RT 03 / RW 01	Kebayan
10	Irfan Hidayat	Sendang Biru, RT 15 / RW 03	Modin

Sumber: Desa Tambakrejo, 2013

Desa Tambakrejo juga memiliki beberapa lembaga-lembaga yang berada dalam naungan pemerintahan desa baik yang bergerak di bidang lingkungan, ekonomi dan pemberdayaan sumberdaya manusia.

Tabel di bawah ini merupakan rincian lembaga-lembaga yang ada di Desa Tambakrejo:

Tabel 8. Lembaga-Lembaga di Desa Tambakrejo Tahun 2015

No	Nama Lembaga	Nama Ketua	
1	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Dusun Tamban	-
		Dusun Sendang Biru	Saptoyo
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	Soehartono	
3	Badan Perwakilan Desa (BPD)	Agus Hariyanto	
4	Komunitas gereja	-	
5	PKK	Salimi	
6	Kelompok Nelayan Bina Lestari (Dusun Tamban)	Sih Budi Ari	
7	Kelompok Nelayan Rukun Jaya (Dusun Sendang Biru)	H. Umar Hasan	
8	Kelompok Tani	Pudyohariyono	
9	Water Rescue	Adi Sih Pirno	
10	Koperasi Unit Desa Mina Sentosa	Pramudjo Haryo Saptoto	
11	Koperasi Kredit Patitis Sae	-	

Lembaga-lembaga yang ada pada tabel di atas sangat membantu dalam pengembangan desa terutama pengembangan dalam hal sumberdaya manusia. Lembaga-lembaga tersebut sebagai wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka. Lembaga juga sebagai media komunikasi yang menjembatani pemerintah dengan masyarakat desa.

4.1.3 Keadaan Geografi dan Topografi Desa Tambakrejo

Desa Tambakrejo terletak di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang bagian selatan. Desa Tambakrejo mempunyai dua dusun yaitu Dusun Tamban dan Dusun Sendangbiru. Secara geografis, Dusun Tamban terletak pada 8 24' 07.05" LS/ 112 43' 04.86" BT sedangkan letak geografis Dusun Sendangbiru adalah 8 25' 54.79" LS/ 112 40' 49.79" BT. Adapun batasan-batasan Desa Tambakrejo antara lain:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kedungbanteng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sitarjo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tambak Asri

Desa Tambakrejo dilihat secara topografi mempunyai ketinggian 75 mdpl dengan kemiringan lahan sebesar 15° dan memiliki curah hujan rata-rata harian sebesar 2400mm. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Desa Tambakrejo memiliki jenis tanah yang memerlukan tindakan khusus dan jenis tanaman yang cocok adalah tanaman semusim seperti rumput, padang rumput, hutan produksi, hutan lindung, dan suaka marga satwa (Wordpress, 2015)

4.1.4 Potensi Sumberdaya Alam Desa Tambakrejo

Desa Tambakrejo memiliki luas lahan yang dimanfaatkan untuk sektor perekonomian sebesar 2.950,7 Ha/m² yang dimanfaatkan oleh warga setempat sebagai lahan persawahan, sawah tadah hujan, sawah irigasi ½ teknis, ladang dan hutan produksi. Berikut adalah jenis pemanfaatan lahan di Desa Tambakrejo:

Tabel 9. Luas Wilayah menurut Pemanfaatan Lahan/Kawasan Tahun 2013

No.	Jenis Lahan	Luas Lahan (Ha/m ²)	(%)
1	Lahan Persawahan	292	9,9
2	Sawah Taddah Hujan	65	2,2
3	Sawah Irigasi ½ Teknis	112	3,8
4	Ladang	380	12,9
5	Hutan Produksi	2.101, 7	71,2
TOTAL		2.950,7 (Ha/m²)	

Sumber: Desa Tambakrejo, 2013

Dari jumlah total luas lahan yang dimanfaatkan, sebesar 71% lahan dimanfaatkan sebagai hutan produksi dengan jenis tumbuhan seperti kayu sengon (Desa Tambakrejo, 2013)

Luas lahan yang dimanfaatkan sebesar 1.310 Ha menghasilkan berbagai macam komoditas-komoditas seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Hasil Komoditas Pertanian Desa Tambakrejo Tahun 2013

No.	Jenis komoditas	Luas Lahan (Ha)	(%)	Hasil
1	Jagung	5	0,4	15 ton
2	Padi Sawah	292	22,3	876 ton
3	Ubi Kayu	2	0,2	10 ton
4	Kelapa	10	0,8	100 ton
5	Kopi	1	0,1	50 ton
6	Kayu	1.000	76,3	300 M ³ /Thn
	Total	1.310		

Sumber: Desa Tambakrejo, 2013

Pemanfaatan lahan sebesar 76,3% dimanfaatkan untuk menghasilkan komoditas kayu sebesar 300 m³/tahun. Desa Tambakrejo memiliki wilayah hutan yang luas dan berpotensi untuk dimanfaatkan sehingga komoditas kayu cocok sebagai bentuk pemanfaatan sumberdaya hutan (Desa Tambakrejo, 2013).

Desa Tambakrejo tidak hanya memiliki sumberdaya hutan, sumberdaya perikanannya pun juga memiliki potensi yang baik karena dekat dengan laut dan memiliki dermaga. Hal ini ditunjukkan dengan tabel hasil perikanan tangkapnya sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Komoditas Perikanan Tangkap Desa Tambakrejo Tahun 2013

No.	Jenis Komoditas	Hasil (Ton/Thn)	(%)
1	Ikan Tuna	999,321	41,9
2	Ikan Tongkol / Cakalang	1.225,801	51,4
3	Ikan Kakap	19,838	0,8
4	Cumi-Cumi	15,900	0,7
5	Ikan Sarden	18,710	0,8
6	Ikan Layur	103,337	4,3
	TOTAL	2.382,907	

Sumber: Desa Tambakrejo, 2013

Potensi laut yang dimiliki Desa Tambakrejo sangat besar dengan komoditas unggulannya ikan tongkol/cakalang. Ikan tersebut sangat mudah dijumpai di laut sendangbiru sehingga hasil tangkapannya pun mencapai 51,4% atau 1.225, 801

ton/tahun dari total penangkapan yang dilakukan sebesar 2.382,907 ton/tahun (Desa Tambakrejo, 2013).

Selain komoditas perikanan tangkap yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, Desa Tambakrejo pun memiliki komoditas peternakan yang terdiri dari sapi, kerbau, babi, ayam kampung, dan lain sebagainya yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Hasil Komoditas Peternakan Tahun 2013

No.	Jenis Ternak	Jumlah Pemilik (orang)	Jumlah Populasi (ekor)	(%)
1	Sapi	525	1155	31,6
2	Kerbau	4	12	0,3
3	Babi	100	200	5,5
4	Ayam Kampung	250	750	20,5
5	Kambing	210	990	27,1
6	Burung Wasset	3	300	8,2
7	Anjing	90	180	4,9
8	Kucing	75	75	2,1
TOTAL		1.257	3.652	

Sumber: Desa Tambakrejo, 2013

Jenis sapi merupakan komoditas paling banyak dengan persentase 31,6% atau 1.155 ekor dari total ternak yang ada di Desa Tambakrejo (Desa Tambakrejo, 2013)

4.1.5 Keadaan Demografi Desa Tambakrejo

Pada tahun 2013, jumlah penduduk Desa Tambakrejo sejumlah 8.424 jiwa yang terdiri dari laki-laki usia mulai dari 0 tahun sampai di atas 56 tahun sejumlah 4.320 jiwa sedangkan jumlah perempuan mulai dari 0 tahun sampai lebih dari 56 tahun sejumlah 4.104 jiwa.

Tabel 13. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2013

No	Usia	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	(%)
1	0 - 12 bulan	126	91	217	7,68
2	1 - 5 tahun	333	258	591	20,92
3	5 - 7 tahun	564	425	989	35,02
4	7 - 18 tahun	986	815	1801	21,74
5	18 - 56 tahun	1900	2117	4017	48,7
6	> 56 tahun	411	398	809	9,76
Total		4320	4104	8424	

Sumber: Desa Tambakrejo, 2013

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, usia yang diperbolehkan bekerja adalah 18 tahun, dimana usia-usia tersebut merupakan usia produktif. Berdasarkan tabel di atas, penduduk yang memasuki usia kerja sebesar 48,7%. Dengan demikian, Desa Tambakrejo mempunyai kekuatan tersendiri untuk membangun desa dengan jumlah usia produktif yang dimilikinya yang hamper mencapai 50% dari jumlah penduduknya (Desa Tambakrejo, 2013).

Adapun jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ditempuh sebagai berikut:

Tabel 14. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (jiwa)	(%)
1	Buta huruf	60	0,72
2	Usia pra-sekolah	304	3,66
3	Tidak tamat SD	80	0,96
4	Sekolah Dasar (SD)	3.178	38,4
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	438	5,28
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	170	2,05
7	Perguruan Tinggi (PT)/Akademi	67	0,9
8	Usia sekolah (SD – PT/Akademi)	826	9,97
Total		5.123	

Sumber: Desa Tambakrejo, 2013

Berdasarkan tabel di atas, sebesar 38,4% atau 3.178 jiwa merupakan penduduk yang menyelesaikan pendidikannya di tingkat sekolah dasar (SD). Sumberdaya manusia yang dimiliki masih rendah dan hanya 0,9% yang berpendidikan sampai

perguruan tinggi, dimana seharusnya pendidikan wajib yang ditempuh adalah 9 tahun SD sampai SMP (Desa Tambakrejo, 2013).

Berikut merupakan tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis mata pencahariannya:

Tabel 15. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2013

No	Mata Pencaharian	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Total	(%)
1	Petani	716	394	1110	24,87
2	Buruh tani	205	56	261	5,85
3	Buruh migran	83	104	187	4,19
4	Pegawai Negeri Sipil	8	4	12	0,27
5	Pengrajin Industri Rumah Tangga	12	4	16	0,36
6	Pedagang Keliling	9	7	16	0,36
7	Peternak	338	-	338	7,57
8	Nelayan	2.169	-	2.169	48,59
9	Montir	10	-	10	0,22
10	Bidan swasta	-	2	2	0,04
11	Perawat swasta	-	4	4	0,09
12	Pembantu Rumah Tangga	-	15	15	0,34
13	TNI	5	-	5	0,11
14	POLRI	4	-	4	0,09
15	Pensiunan (PNS, TNI, POLRI)	9	3	12	0,27
16	Pengusaha Kecil dan Menengah	99	18	117	2,62
17	Dukun Kampung Terlatih	8	-	8	0,18
18	Jasa Pengobatan Alternatif	3	-	3	0,07
19	Pengusaha Besar	15	3	18	0,4
20	Arsitek	1	-	1	0,02
21	Seniman/Artist	80	11	91	2,03
22	Karyawan Perusahaan Swasta	40	25	65	1,47
Total		3.814	650	4.464	

Sumber: Desa Tambakrejo, 2013

Mayoritas penduduk Desa Tambakrejo berprofesi sebagai nelayan dan petani. Hal ini dapat terlihat pada tabel di atas bahwa jumlah nelayan sebesar 2.169 jiwa (48,5%) sedangkan jumlah penduduk yang bertani pun juga banyak sebesar 11103 jiwa (24,87%) (Kantor Kepala Desa Tambakrejo, 2013). Hal ini dapat disimpulkan bahwa keadaan geografis suatu wilayah mempengaruhi jenis pekerjaan. Sumberdaya hutan dan laut yang melimpah menjadikan penduduk Desa Tambakrejo bertani dan menjadi nelayan. Di sisi lain, nelayan berganti profesi menjadi petani ketika musim paceklik antara bulan Januari sampai bulan April karena cuaca yang buruk seperti angin barat. Hal ini dilakukan sebagai

upaya untuk tetap bertahan hidup mengingat pekerjaan nelayan sangat bergantung pada musim. Di Desa Tambakrejo, mayoritas penduduk beragama Kristen dan Islam. Gereja yang ada di Desa Tambakrejo ada dua yang terdapat di Dusun Tamban dan Dusun Sendangbiru sedangkan jumlah masjid ada dua yang berada di Dusun Tamban dan Dusun Sendangbiru

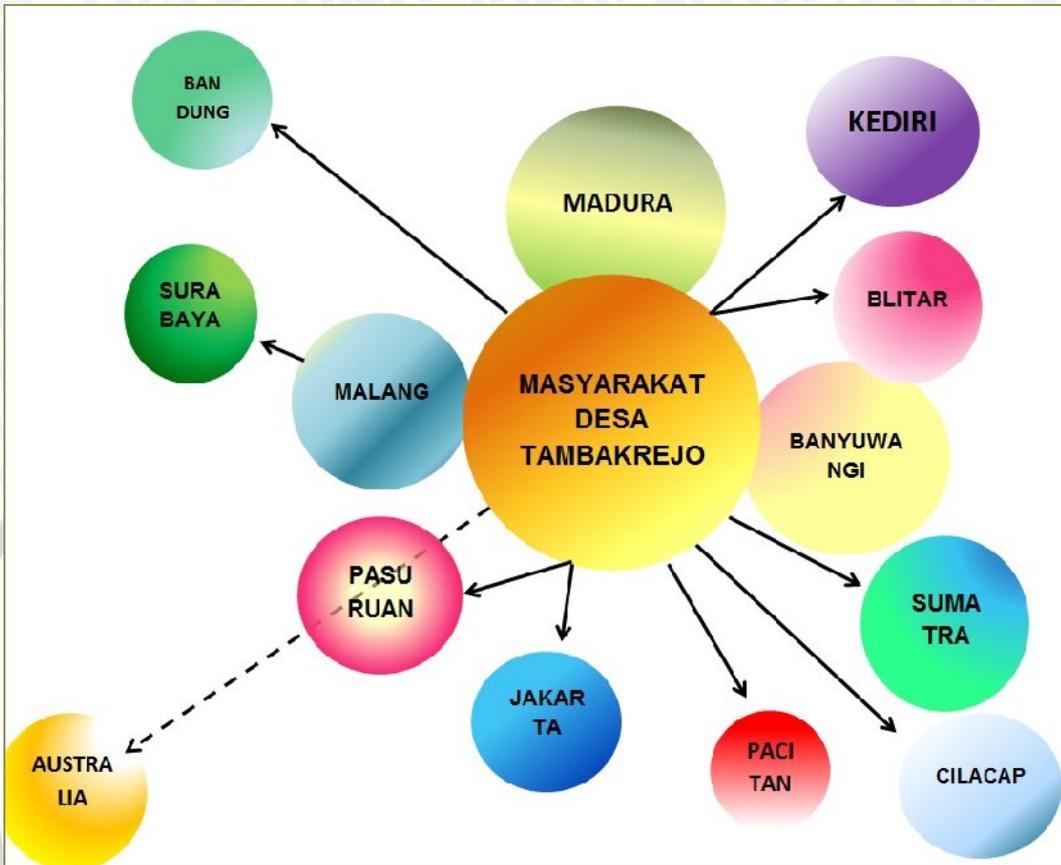
4.1.6 Mobilisasi Penduduk Desa Tambakrejo

Sumberdaya alam yang dimiliki Desa Tambakrejo ini membuat masyarakat luar desa ingin menikmati sumberdaya alam. Masyarakat yang ada di Desa Tambakrejo tidak hanya terdiri dari masyarakat asli Desa Tambakrejo tetapi ada pula masyarakat pendatang dan masyarakat andong. Masyarakat pendatang adalah masyarakat yang berasal dari luar Desa Tambakrejo dan menetap tinggal di Desa Tambakrejo sedangkan masyarakat andong adalah masyarakat yang berasal dari luar daerah Desa Tambakrejo yang bekerja di Desa Tambakrejo dan pulang kembali ke tempat asalnya setelah mendapatkan rejeki.

Masyarakat yang datang berasal dari berbagai penjuru dunia baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Keragaman asal masyarakat ini membuat adanya pengaruh budaya dari luar yang dibawa pendatang yang bisa mengakibatkan mengikisnya kebudayaan asli Desa Tambakrejo. Selain itu, tingkat kriminalitas juga bisa bertambah dengan banyaknya pendatang baru. Hal demikian merupakan ancaman bagi masyarakat Desa Tambakrejo.

Diagram mobilitas ini merupakan suatu metode untuk mengetahui ancaman yang dihadapi Desa Tambakrejo sebagai akibat dari perpindahan kegiatan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Survey dan wawancara digunakan untuk mengambil data tentang kota asal dari masyarakat sekitar dan seberapa intensitas masyarakat berpergian ke luar daerah. Hasil dari

survey dan wawancara tersebut divisualisasikan melalui sebuah diagram yang menggambarkan keadaan lapang yang diakibatkan mobilitas penduduk.



Gambar 6. Diagram mobilitas masyarakat Desa Tambakrejo

Pada diagram di atas, terdapat garis panah dan bulatan. Garis panah menandakan jauh dekatnya. Semakin panjang garis dari pusat (masyarakat Desa Tambakrejo) maka ancaman belum mengkhawatirkan dan sebaliknya. Garis panah dibedakan menjadi dua yaitu garis panah ada yang putus-putus dan juga garis panah yang tidak putus-putus. Garis panah putus-putus menandakan wilayah luar negeri sedangkan garis panah tidak putus-putus menandakan wilayah dalam negeri. Masyarakat yang berasal dari Madura, Banyuwangi dan Malang berpengaruh secara langsung terhadap Desa Tambakrejo dikarenakan mayoritas penduduk yang berada di dusun Sendangbiru berasal dari Madura, dan Banyuwangi.

Hal ini memberikan dampak terhadap kehidupan yang ada di Desa Tambakrejo antara lain:

1. banyaknya jenis bahasa yang masuk yang digunakan dalam berkomunikasi seperti bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Sunda,
2. terjadi keseimbangan jumlah penduduk beragama Islam dan Nasrani dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya
3. berpotensi terjadinya konflik antar masyarakat pribumi dengan masyarakat pribumi, masyarakat pendatang masyarakat pribumi, masyarakat sekitar dengan nelayan pendatang sebagai akibat dari keragaman budaya, adat dan latar belakang.

Keragaman bukanlah suatu masalah tetapi suatu karunia yang disyukuri dengan saling bertoleransi dan memahami satu sama lain sehingga tercipta kerukunan yang kuat diantara masyarakat. Jika kerukunan yang kuat sudah tercipta, maka masyarakat mampu menghadang segala bentuk efek negative dari pasar bebas yang akan segera berlangsung pada Masyarakat Ekonomi ASEAN.

4.1.7 Prasarana dan Sarana Desa Tambakrejo

Prasarana adalah komponen-komponen dalam menunjang tersediaannya sarana sedangkan sarana adalah komponen-komponen yang menunjang kegiatan-kegiatan masyarakat. Berikut merupakan prasarana dan sarana yang ada di Desa Tambakrejo antara lain:

4.1.8.1 Prasarana

A. Jalan

Jalan merupakan akses penting dalam menunjang kegiatan penduduk desa dan sangat berpengaruh dalam pengembangan suatu wilayah khususnya desa. Kondisi jalan juga mempengaruhi perkembangan perekonomian suatu wilayah. Jalan juga harus menjamin keselamatan dan kenyamanan pemakai jalan. UU RI no 34 Tahun 2004 tentang jalan pasal 1 menyebutkan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Selain jalan merupakan prasarana transportasi darat, jalan menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota, memberikan kemudahan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan perjalanan dan menjamin perjalanan dapat dilakukan dengan kecepatan yang direncanakan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 5). Berikut merupakan indikator-indikator standar pelayanan minimal jalan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal:

Tabel 16. Indikator Standar Pelayanan Minimal Jalan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Jenis Pelayanan Dasar			Indikator SPM
Jalan	Jaringan	Aksesibilitas	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota
		Mobilitas	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan
		Keselamatan	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat
Ruas jalan	Kondisi jalan	Kondisi jalan	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman
		Kecepatan	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.

Sumber: PERMEN PU NO 14 tahun 2010

Jalan utama Desa Tambakrejo merupakan jalan beraspal dengan kondisi baik. Meskipun ada lubang-lubang kecil, jalan ini masih berfungsi dengan baik dan masih terjaminnya keselamatan dan kenyamanan pemakai jalan. Jalan utama ini menghubungkan pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti kegiatan pelayanan desa, bangunan sekolah, gereja dan lain sebagainya.



Gambar 7 . a) Kondisi jalan utama Desa Tambakrejo, b) kondisi jalan menuju kantor kepala desa, dan c) jalan wilayah selatan

Berbanding terbalik dengan kondisi ruas-ruas jalan desa. Ruas-ruas jalan desa memiliki kondisi yang buruk bahkan jauh dari standar pelayanan minimal jalan yang telah ditetapkan pemerintah. Banyak ruas-ruas jalan yang sudah beraspal tetapi terdapat banyak lubang-lubang dan juga ada ruas-ruas jalan yang masih berbatu tajam.



Gambar 8 . Kondisi ruas-ruas jalan Desa Tambakrejo a) wilayah bagian selatan, b) wilayah bagian utara, c) dan d) wilayah bagian selatan

Kondisi buruk ruas-ruas jalan seperti pada gambar di atas dapat mengancam keselamatan para pengguna jalan apalagi ketika musim hujan.. Banyak lubang-lubang besar yang terisi air, dan hanya sedikit jalan yang tidak berlubang sehingga para pemakai jalan harus lebih waspada karena sulit untuk mengetahui kedalaman lubang karena terisi air dan lebih membahayakan lagi ketika malam datang. Keadaan yang gelap tanpa penerangan jalan memungkinkan terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan.

Begitu pula dengan kondisi jalan yang menuju ke wisata Pantai Tamban Indah. Tak berbeda jauh dengan kondisi ruas-ruas jalan desa yang rusak, kondisi jalan yang menuju ke tempat wisata tersebut pun juga dalam kondisi kurang

layak untuk dilewati para pemakai jalan. Lebih dari 50% jalan mengalami kerusakan seperti banyaknya lubang-lubang besar yang ada di jalan dan ada beberapa jalan yang terdiri dari batu-batu tajam.



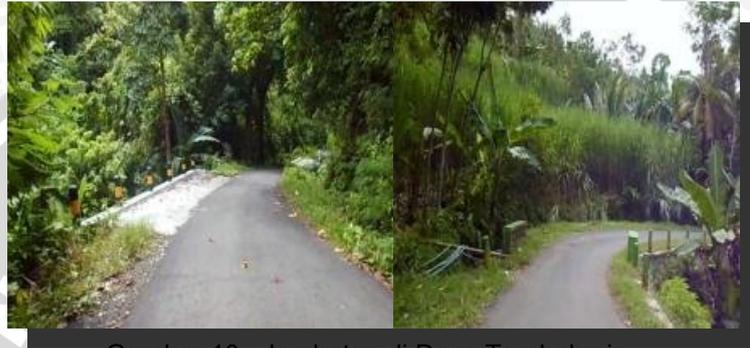
Gambar 9. Kondisi jalan menuju kawasan wisata Pantai Tamban Indah

Keadaan semacam ini sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah dalam hal wisata. Pendapatan asli daerah bisa menurun diakibatkan jalan yang rusak karena tidak memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang melakukan perjalanan ke wisata Pantai Tamban Indah. Wisata Pantai Tamban Indah juga merupakan salah satu tempat kegiatan ekonomi penduduk desa setempat. Jika kunjungan wisatawan berkurang maka pendapat penduduk desa setempat juga ikut berkurang.

B. Jembatan

Jembatan merupakan prasarana yang menghubungkan dua atau lebih daratan yang terpisah karena sungai, laut, jurang dan lain sebagainya. Permen No 34 Tahun 2006 tentang jalan pada pasal 86 ayat 3 yang dimaksud dengan “jembatan” adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah. Jembatan yang ada di Desa Tambakrejo merupakan jembatan permanen yang dicor dengan semen dan batu dan dilapisi dengan

aspal. Jembatan ini sangat membantu kelancaran kegiatan penduduk desa. Dana dalam pembangunan jembatan ini berasal dari swadaya masyarakat dan dana bantuan dari pemerintah melalui program-program pengembangan desa seperti salah satunya adalah program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) tahun 2013



Gambar 10. Jembatan di Desa Tambakrejo

Jembatan-jembatan yang ada di Desa Tambakrejo dalam kondisi sangat baik. Hanya sebagian kecil saja jembatan yang belum terlapisi oleh aspal namun kondisinya masih layak untuk digunakan sebagai jalur lalu lintas penduduk desa dalam berkegiatan.



Gambar 11. Jembatan yang didanai PDPT tahun 2013 dan swadaya

Pada gambar di atas merupakan jembatan yang dibangun dengan menggunakan dana dari program PDPT tahun pertama (tahun 2013) dan juga dana yang dikumpulkan oleh masyarakat setempat secara swadaya. Jembatan tersebut

nantinya sebagai akses menuju wisata Pantai Sendiki yang saat ini sedang dalam masa pembangunan.

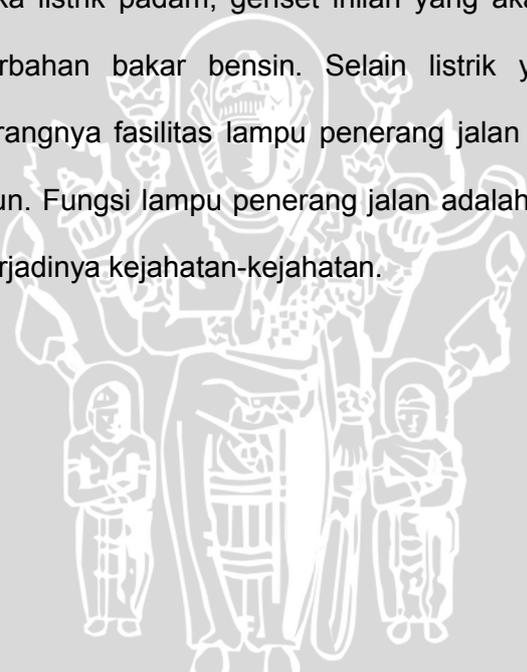
C. Sumberdaya Air

Sumberdaya air yang dimiliki Desa Tambakrejo yaitu sumberdaya air tawar yang berasal dari air tanah dan sumberdaya air asin yang berasal dari laut. Mayoritas penduduk desa menggunakan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, MCK, dan memasak. Penduduk desa menggunakan mesin sanyo untuk menghisap air tanah keluar melalui pipa-pipa yang dipasang yang kemudian digunakan. Meskipun ada beberapa took yang menyediakan air minum kemasan dalam bentuk galon, hanya sebagian kecil saja penduduk desa menggunakan air minum kemasan galon untuk kebutuhan konsumsi.

Desa Tambakrejo memiliki hutan yang luas yang bermanfaat sebagai daerah resapan air hujan sehingga menjaga volume air tanah cukup untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Agar hutan dapat menampung air hujan secara maksimal maka perlu dijaga kelestarian hutan agar terhindar dari kekeringan di saat musim kemarau. Pemanfaatan sumberdaya air asin yang berasal dari laut masih belum optimal sehingga perlu adanya ide-ide untuk bisa memanfaatkan air laut secara optimal dan kesejahteraan penduduk desa tetap terjaga

D. Listrik

Listrik merupakan prasarana yang penting dalam menunjang kehidupan penduduk Desa Tambakrejo. Namun sayangnya, listrik yang ada di Desa Tambakrejo ini belum bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya seperti di wilayah pada umumnya. Listrik tidak selalu dapat digunakan 24 jam karena selalu ada pemadaman dari PLN hingga berjam-jam. Biasanya pemadaman ini terjadi mulai pukul 13.00 WIB hingga 18.00 WIB. Dengan tarif listrik yang sama maka penduduk desa juga berhak memanfaatkan listrik selama 24 jam. Maka dari itu, penduduk desa yang berekonomi menengah ke atas selalu menyediakan genset di rumah. Ketika listrik padam, genset inilah yang akan menghidupkan listrik. Genset ini berbahan bakar bensin. Selain listrik yang tidak dapat digunakan 24 jam, kurangnya fasilitas lampu penerang jalan mengingat masih banyaknya kebun-kebun. Fungsi lampu penerang jalan adalah untuk menerangi jalan dan mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan.



4.1.8.2 Sarana

Berikut ini merupakan sarana-sarana yang ada di Desa Tambakrejo baik di Dusun Tamban maupun di Dusun Sendangbiru antara lain:

Tabel 17. Sarana-sarana yang ada di Desa Tambakrejo

Sarana Pendidikan	
TK	  <p>Gambar 12. TK Dharma Wanita Tambakrejo di Dusun Tamban</p> <p>Gambar 13. TK Dharma Wanita Tambakrejo di Dusun Sendang Biru</p>
SD	  <p>Gambar 14. SDN Tambakrejo II di Dusun Tamban</p> <p>Gambar 15. SDN Tambakrejo I di Dusun Sendang Biru</p>  <p>Gambar 16. SD Nelayan Sendangbiru</p>

Tabel 17. Sarana-sarana yang ada di Desa Tambakrejo (lanjutan)

SMP



Gambar 17. SMPN Tambakrejo di Dusun Tamban



Gambar 18. SMP TPN Sendang Biru

Sarana Lembaga Keuangan



Gambar 19. Koperasi kredit Petitis Sae di Dusun Tamban Tambakrejo



Gambar 20. KUD Mina Jaya di Dusun Sendang Biru Tambakrejo



Gambar 21. Bank BRI di Dusun Sendang Biru Tambakrejo

Tabel 17. Sarana-sarana yang ada di Desa Tambakrejo (lanjutan)

Sarana Keagamaan



Gambar 22. Masjid di Dusun Tamban



Gambar 23. Musholah di Dusun Tamban



Gambar 24. Masjid di Dusun Sendang Biru



Gambar 25. Masjid Alfalah di Dusun Sendang Biru



Gambar 26. Gereja di Dusun Tamban



Gambar 27. GKJW Tambakrejo di Dusun Tamban



Gambar 28. GKJW Sendang Biru

Tabel 17. Sarana-sarana yang ada di Desa Tambakrejo (lanjutan)

Sarana Kantor Administrasi Kependudukan



Gambar 29. Kantor Kepala Desa Tambakrejo di Dusun Tamban



Gambar 30. Kantor Dusun Sendang Biru

Sarana Kesehatan Masyarakat



Gambar 31. Puskesmas di Dusun Sendang Biru



Gambar 32. POSKESDES Permata Hati di Dusun Tamban

Sarana Keamanan Masyarakat



Gambar 33. Kantor Polisi Sendang Biru



Gambar 34. Pos TNI-AL Sendang Biru



Tabel 17. Sarana-sarana yang ada di Desa Tambakrejo (lanjutan)

Sarana Tempat Pelelangan Ikan



Gambar 35. Kegiatan pelelangan ikan di TPI baru Sendang Biru



Gambar 36. Kegiatan berdagang ikan di TPI lama Sendang Biru



Gambar 37. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pelelangan Ikan Sendang Biru



Gambar 38. Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Podok Dadapan Sendang Biru

4.1.8 Pariwisata

Desa Tambakrejo memiliki tempat-tempat wisata alam yang mengagumkan. Potensi laut yang luas menjadikan wilayah ini memiliki pantai yang layak dijadikan sebagai tempat wisata. Letak Desa Tambakrejo yang dekat pantai ini, menguntungkan Desa Tambakrejo memiliki tempat-tempat wisata yang berbasiskan *ecotourism*. Berikut adalah tempat-tempat wisata yang dimiliki Desa Tambakrejo:

A. Wana Wisata Sendangbiru



Gambar 39. Wana wisata Sendang Biru

Wana wisata sendang biru merupakan kawasan wisata yang terletak di Desa Tambakrejo Dusun Sendang Biru Kabupaten Malang bagian selatan. Wisata ini menyuguhkan pemandangan pantai yang indah dan kita bisa melihat Pulau Sempuh yang terletak di seberang wisata ini. Wisata ini juga menyiapkan beberapa perahu bagi para wisatawan yang ingin berkeliling laut dengan biaya ± Rp. 125.000/perahu yang bisa dinaiki 10 orang. Selain itu, terdapat banyak penjual pernak-pernik khas daerah Sendang biru yang bisa dijadikan buah tangan seperti berbagai macam kaos, kerajinan tangan, dan masih banyak lainnya

B. Pantai Tamban Indah



Gambar 40. Pantai Tamban Indah

Pantai Tamban Indah merupakan salah satu kawasan wisata yang berada di Desa Tambakrejo Dusun Tamban Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang bagian selatan. Pantai ini menyuguhkan pemandangan yang asri dengan deburan ombak yang tidak terlalu kuat. Di pinggiran pantai terdapat banyak penjual ikan segar bakar. Akses jalan untuk menuju ke kawasan tersebut cukup mudah karena disertai panduan jalan yang ada. Pantai tamban juga memiliki kawasan untuk bersnorkling dan lengkap ada peralatan snorkling yang disewakan.

C. Pantai Clungup



Gambar 41. Pantai Clungup

Pantai Clungup adalah salah satu wisata yang baru saja dibuka. Pantai clungup ini terdapat di Desa Tambakrejo Dusun Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang bagian selatan. Pantai ini masih bersih dan indah, masih belum adanya limbah-limbah, dan air yang masih jernih. Wisata ini memiliki beberapa tempat tracking yang ditawarkan seperti Pantai Gatra, Pantai Tiga Warna, dan masih banyak lainnya. Perbaikan infrastruktur wisata Pantai Clungup ini merupakan salah satu yang mendapatkan dana dari program PDPT.



Gambar 42. Lahan mangrove di Pantai Clungup

Dalam wisata ini juga disediakan kawasan yang bisa digunakan untuk bermalam dan disediakan beberapa tenda yang bisa disewa. Harga tiket masuk ke pantai ini Rp 6.000 dan kita mendapatkan 1 bibit mangrove untuk kita tanam di kawasan sekitar clungup sedangkan jika ingin tracking menambah biaya guide sebesar Rp 70.000/10 orang. Pantai Clungup merupakan salah satu wisata edukasi yang mengajarkan kepada setiap pengunjung untuk lebih peduli dan menjaga lingkungan.

D. Pantai Gatra



Gambar 43. Pantai Gatra

Pantai Gatra merupakan kompleks kawasan wisata Pantai Clungup. Pantai ini merupakan jalur tracking yang akan dilewati. Pantai ini tidak kalah bersihnya dengan pantai-pantai yang lain yang ada di Desa Tambakrejo. Di pantai ini, banyak orang mencari ikan kerapuh. Ikan kerapuh mudah dijumpai di pantai ini karena masih banyak karang yang menjadi tempat persembunyian ikan kerapuh.



Gambar 44. Pulau tempat bertelurnya penyu

Dari Pantai Gatra kita bisa melihat pulau pada gambar di atas. Pulau tersebut tepat berada di seberang. Pulau tersebut biasanya digunakan para penyu sebagai tempat bertelur di musimnya sehingga pulau tersebut tidak diperuntukkan sebagai kawasan wisata yang ditakutkan mengganggu habitat para penyu ketika bertelur. Daerah yang digunakan penyu untuk bertelur ditunjukkan oleh daerah yang diberi tanda lingkaran berwarna merah.

E. Pantai Tiga Warna



Gambar 45. Pantai Tiga Warna

Pantai tiga warna ini merupakan salah satu jalur tracking dari pantai clungup. Pantai tiga warna ini memiliki tiga gradasi warna indah yang pantas untuk dijadikan tempat wisata. Warna gradasi terlihat jelas saat cuaca terang.

F. Pantai Sendiki

Selain tempat-tempat pariwisata yang telah dijelaskan seperti di atas ada satu tempat pariwisata lagi yang akan dibuka yaitu Pantai Sendiki. Pantai Sendiki ini berlokasi di Dusun Tamban Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang bagian selatan.



Gambar 46 . Pantai Sendiki

Pantai Sendiki ini masih dalam perbaikan khususnya jalan. Jalan merupakan akses masuk ke tempat Pantai Sendiki. Jalan yang masih berupa tanah liat dan masih gembur yang jarang dilewati orang merupakan medan yang sulit jika dilewati oleh para wisatawan sehingga perlu adanya pengerasan jalan dan membuat jalan yang bisa dilewati. Perbaikan tempat wisata ini merupakan salah satu yang didanai oleh dana PDPT

4.1.9 Budaya Desa Tambakrejo

Petik laut merupakan kebudayaan masyarakat pesisir yang ada di Desa Tambakrejo. Petik laut merupakan bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas rejeki yang diberikan. Petik laut ini terdiri dari beberapa acara sub yang dimulai dari tanggal 23-26 September dan acara inti pada tanggal 27 September. Pada acara sub ini terdapat kegiatan-kegiatan hiburan masyarakat seperti pentas seni dangdut, pentas seni campur sari, acara keagamaan, dan ruwatan wayang kulit sedangkan acara inti petik laut sendiri adalah proses larung atau labuh.



Gambar 47 . Kegiatan Petik Laut
Sumber: Desa Tambakrejo, 2014

Prosesi ini dilaksanakan dengan membawa perlengkapan upacara (mancen wanita sebagai Nyi Loro Kidul dan pengiring laki-laki, patung Garuda, tumpeng nasi kuning dan saji, berbagai macam hasil bumi, dan miniature perahu) ke tengah laut menuju tempat yang telah ditentukan, biasanya tempat ditengah dua buah pulau karang berjajar yang bentuknya menyerupai gerbang yang kemudian perlengkapan-perengkapan tersebut dilarungkan ke laut

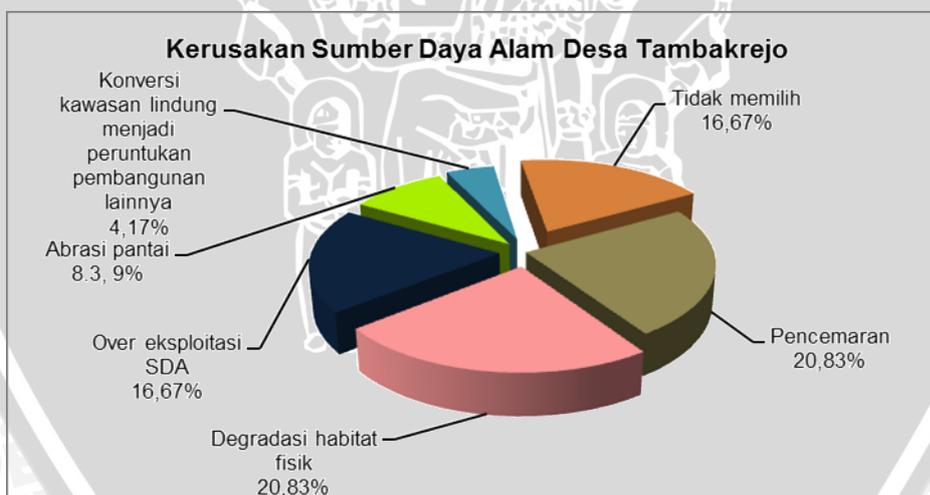
4.1.10 Kebencanaan

Wilayah Desa Tambakrejo banyak terdapat perbukitan-perbukitan dan dataran tinggi. Desa Tambakrejo dilihat secara topografi mempunyai ketinggian 75 mdpl dengan kemiringan lahan sebesar 15° dan memiliki curah hujan rata-

repository.ub.ac.id

rata harian sebesar 2400mm. Desa Tambakrejo pun memiliki kawasan pantai yang luas. Keadaan tersebut memungkinkan adanya potensi terjadinya bencana alam.

Permasalahan yang ada di Desa Tambakrejo khususnya dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam sangat banyak. Sebelum dilakukannya suatu rencana aksi maka perlu dilakukan mengetahui masalah yang ada dan penyebab terjadinya masalah tersebut. Peneliti telah mengumpulkan beberapa masalah-masalah sumberdaya alam yang ada di Desa Tambakrejo beserta dengan penyebab masalah. Selanjutnya dilakukan perangkingan masalah dan penyebabnya oleh para responden secara *Focus Group Discussion*. Perangkingan ini bertujuan untuk mengetahui jenis kerusakan sumberdaya alam yang terlebih dahulu harus dibenahi dengan membenahi melalui penyebab kerusakannya dari hasil perangkingan.

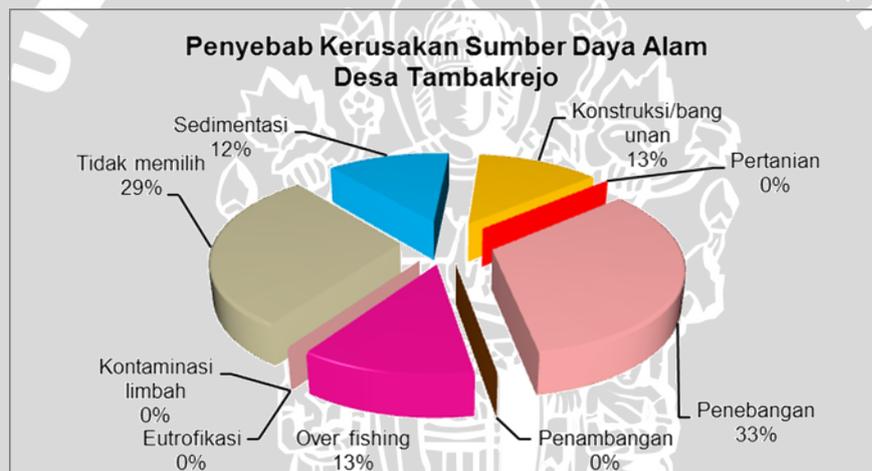


Gambar 48. Hasil FGD Kerusakan SDA Desa Tambakrejo

Bagan di atas adalah hasil perangkingan *focus group discussion* tentang permasalahan sumberdaya alam yang ada di Desa Tambakrejo. Sebanyak 20,83% narasumber memilih permasalahan pencemaran dan 20,83% memilih

permasalahan degradasi habitat fisik dimana kedua permasalahan tersebut yang harus diselesaikan terlebih dahulu, Permasalahan utama yang harus segera ditangani berdasarkan hasil FGD di atas adalah pencemaran, degradasi habitat fisik, dan over eksploitasi.

Adanya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kerusakan sumberdaya alam di Desa Tambakrejo, perlu adanya pengkajian tentang penyebab-penyebab yang menimbulkan kerusakan tersebut. Dengan melakukan metode *focus group discussion* yang mengikut sertakan masyarakat dalam menentukan alasan utama penyebab kerusakan sumberdaya alam yang sudah dijelaskan di atas, maka dihasilkan diagram seperti di bawah ini:



Gambar 49. Hasil FGD Penyebab Kerusakan SDA Desa Tambakrejo

Berdasarkan diagram di atas, sebanyak 12% responden memilih sedimentasi sebagai penyebab kerusakan, 13% responden memilih konstruksi/bangunan sebagai penyebab kerusakan, 33% dari responden memilih penebangan sebagai penyebab kerusakan alam, dan 13% dari responden memilih over fishing merupakan penyebab kerusakan alam serta 29% responden tidak memilih. Kegiatan penambangan dan pertanian, dan eutrofikasi tidak mempengaruhi kerusakan sumber daya alam. Berdasarkan *hasil focus group discussion* tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab utama kerusakan sumberdaya alam

adalah akibat dari kegiatan penebangan hutan sehingga dengan merangking penyebabnya, kerusakan sumberdaya alam dapat diselesaikan berdasarkan penyebabnya. Pada hasil FGD tertera adanya persentase dimana responden tidak memilih. Faktor-faktor yang menyebabkan responden untuk tidak memilih antara lain:

1. rendahnya kualitas SDM masyarakat Desa Tambakrejo
2. kurangnya kepekaan masyarakat akan kerusakan alam karena kerusakan yang terjadi belum berdampak pada kehidupan mereka
3. adanya perbedaan persepsi mengenai maksud dari kerusakan alam seperti banjir ada yang berpikir hal tersebut adalah kerusakan alam dan ada juga yang menganggapnya sebagai hal yang wajar yang bukan dianggap sebagai kerusakan alam

A. Banjir

Banjir sering kali terjadi di Dusun Tamban Desa Tambakrejo. Banjir ini disebabkan karena letak dataran Dusun Tamban yang lebih rendah dibandingkan dengan Dusun Sendang Biru.

B. Abrasi



Gambar 50. Kondisi Pantai Tamban Indah

Abrasi terjadi di Pantai Tamban Indah yang berada di Dusun Tamban Desa Tambakrejo. Abrasi disebabkan oleh deburan ombak yang keras yang langsung mengenai pantai. Abrasi ini telah mengikis permukaan pantai ± 2

meter. Jika hal ini tidak segera ditanggulangi dengan serius, maka abrasi akan berdampak terhadap pemukiman masyarakat yang ada disana karena jarak pemukiman dengan pantai adalah ± 5 meter. Hal tersebut juga akan mengganggu perekonomian masyarakat sekitar pantai Tamban. Pada gambar di atas terdapat pasir dan batu-batu besar yang terdapat disekitar pantai Tamban. Pasir-pasir dan batuan tersebut digunakan untuk mengurangi dampak abrasi yang telah terjadi untuk sementara waktu. Pengadaan pasir-pasir dan batuan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.

C. Tanah Longsor

Wilayah Desa Tambakrejo sebagian besar terdiri dari hutan yang ada di lereng-lereng gunung. Banyaknya lereng-lereng gunung ini bisa berpotensi terjadinya tanah longsor. Saat ini, banyak hutan-hutan yang ada di sepanjang jalan menuju Dusun Sendang Biru sudah mengalami perubahan status hutan yang semula adalah berstatus hutan lindung menjadi hutan produktif. Hal tersebut bermula dipicu karena beberapa masyarakat sekitar membuka sedikit lahan hutan untuk ditanami tumbuhan produktif seperti salak dan pisang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.



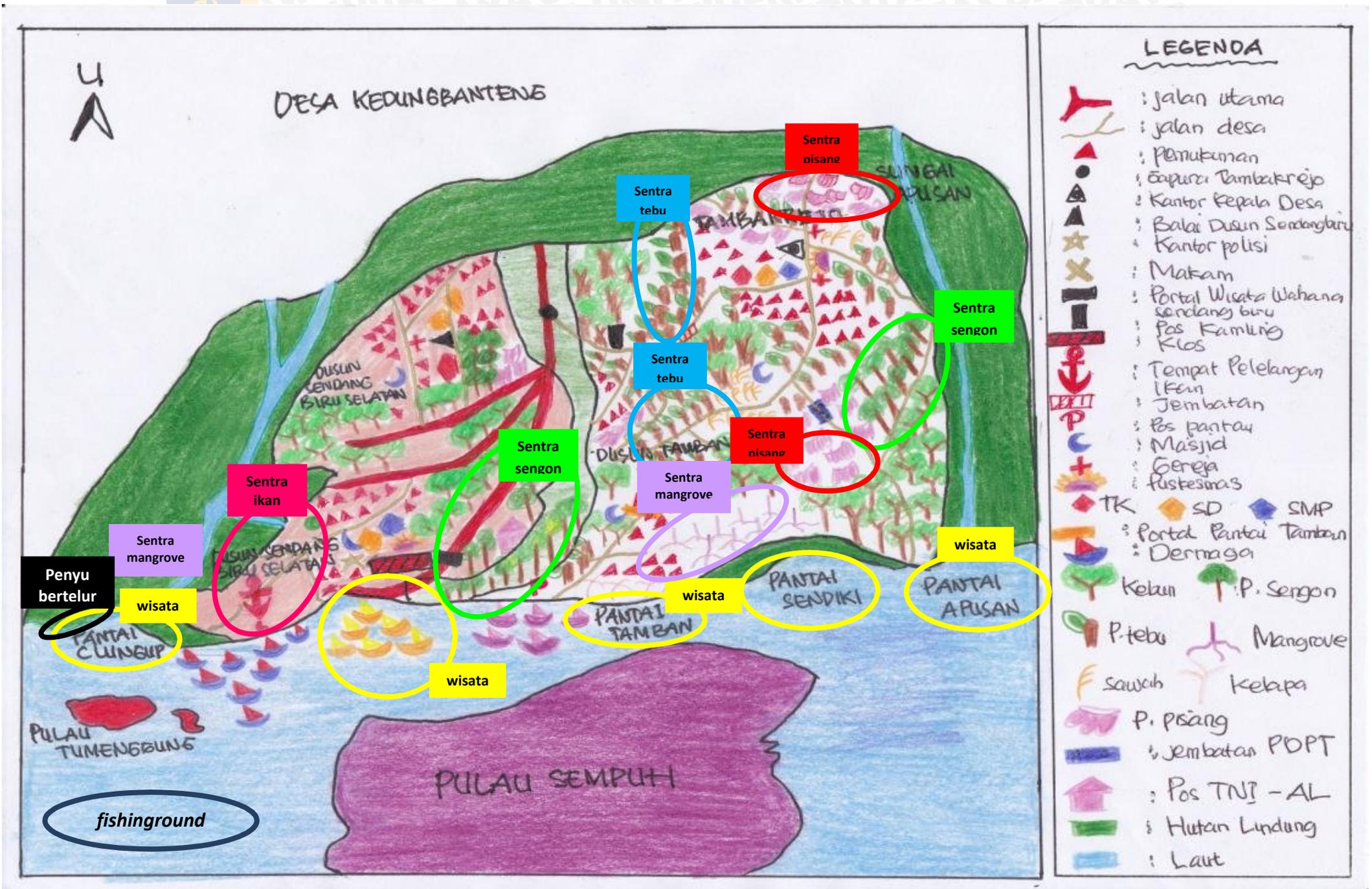
Gambar 51. Kondisi kerusakan hutan Desa Tambakrejo bulan April 2015

Pihak perhutani, melihat peluang dari kegiatan masyarakat tersebut yang akhirnya diubahnya status hutan tersebut. Perubahan status hutan menarik para pengusaha kayu untuk menjadikan lahan tersebut dijadikan tempat penanaman kayu seperti sengon sebagai usaha yang dapat meraih keuntungan banyak. Banyaknya penggunaan lahan tersebut dapat merusak habitat hutan dan struktur tanah yang bisa menyebabkan tanah longsor. Selain terjadinya peralihan status hutan, hutan-hutan yang ada di Desa Tambakrejo mulai kehilangan kelestariannya karena banyak kegiatan penebangan hutan yang menyebabkan hutan menjadi gundul. Jika hutan gundul maka akan berdampak pada penurunan volume air tanah. Ketika hujan, air hujan tidak dapat tertampung secara maksimal oleh tanah karena berkurangnya pohon yang ada di hutan. Sehingga air beserta pasir turun ke jalan yang berakibat terhadap keselamatan pengguna jalan.



Gambar 52 . Kondisi hutan yang baru dibuka di bulan April 2015

Semakin banyak saja lahan hutan yang dibuka seperti pada gambar di atas. Gambar di atas diambil pada bulan April 2015. Hutan tersebut tepat berada di samping pos TNI-AL yang berada di Dusun Sendang Biru Lahan di atas sebelumnya adalah hutan yang ditanami banyak pohon tetapi pada bulan April 2015 lahan tersebut rupanya akan digunakan.



Gambar 53. Peta Potensi Desa Tambakrejo Kabupaten Malang

4.2 Lembaga-lembaga di Desa Tambakrejo

Kemajuan dalam pengembangan sumberdaya manusia tidak lepas dari peran aktif lembaga yang ada di sekitar lingkungan. Lembaga-lembaga tersebut merupakan salah satu komponen yang dapat mengembangkan kemampuan kemandirian masyarakat untuk bisa menjadi lebih berdaya. Lembaga juga bisa berfungsi sebagai katalisator pengembangan masyarakat desa dan sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat, maka dari itu peran lembaga menjadi penting ketika lembaga ini dibutuhkan masyarakat dan adanya *feed back* yang baik dari masyarakat. Untuk mengetahui besar atau tidaknya peran suatu lembaga kepada masyarakat bisa diketahui dengan berdasarkan beberapa indikator berikut:

1. Memiliki kepentingan yang sama
2. Motivasi untuk maju menjadi lembaga yang unggul
3. Saling mengenal dengan akrab, dan saling percaya; dan
4. Rasa tanggung jawab kepada para anggotanya dan visi misi yang dilakukan
5. Kemandirian dalam pendanaan
6. Partisipasi yang tinggi
7. Kemitraan usaha
8. Pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat
9. Terciptanya keharmonisan antara lembaga dengan anggota, dan lembaga dengan masyarakat lainnya
10. Memiliki harkat dan martabat yang baik

Dalam suatu perencanaan pemberdayaan masyarakat, dibutuhkannya suatu yang dapat menjembatani dalam berkomunikasi antara penyuluh pemberdayaan dengan masyarakat yang diberdayakan. Hal yang bisa menjembatani penyuluh

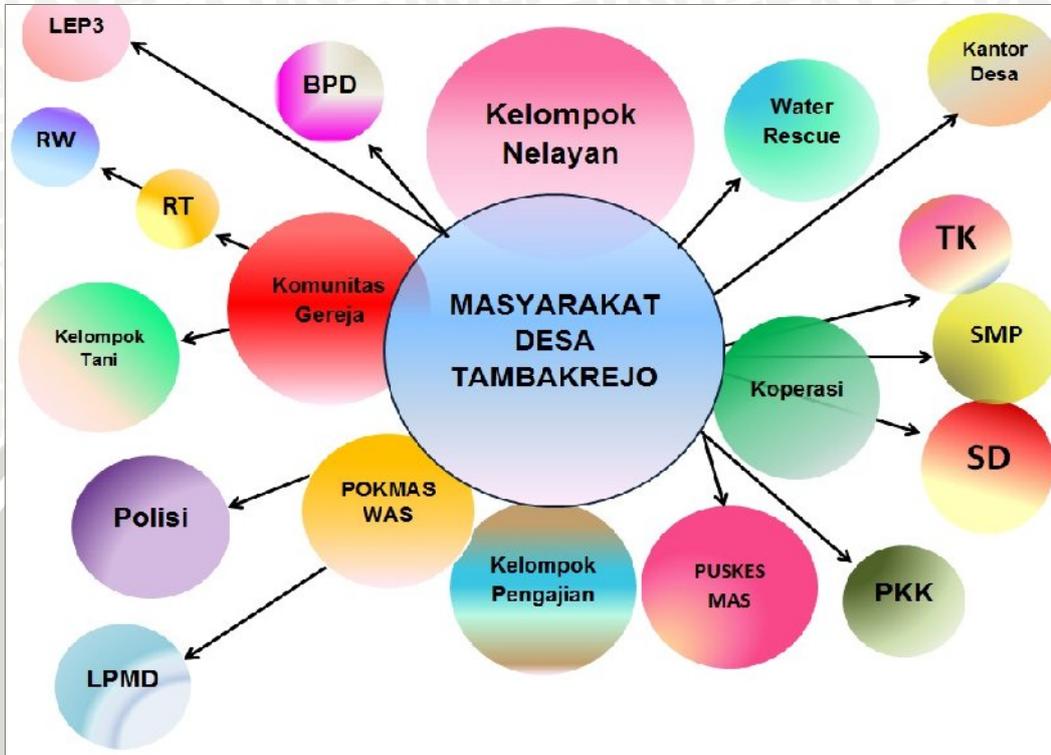
pemberdayaan dengan masyarakat yang akan diberdayakan bisa melalui lembaga-lembaga yang sudah ada di lingkungan masyarakat.

Lembaga-lembaga yang dimaksudkan adalah lembaga-lembaga yang memiliki hubungan kedekatan yang baik dengan masyarakat. Semua lembaga dapat menjadi jembatan baik lembaga formal seperti pemerintahan maupun lembaga non-formal seperti komunitas-komunitas pencinta alam, komunitas keagamaan, dan lain sebagainya. Desa Tambakrejo memiliki lembaga-lembaga baik formal maupun lembaga non-formal yang berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas dan peran masing-masing dalam pembangunan desa baik infrastruktur, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.

Peneliti melakukan survey dengan menggunakan kuisioner untuk mengetahui kedekatan lembaga-lembaga di atas dengan masyarakat desa pesisir Tambakrejo. Responden memberikan rangking terhadap lembaga-lembaga tersebut berdasarkan kedekatan responden dengan lembaga-lembaga. Perangkingan tersebut dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan hasilnya digambarkan dalam bentuk diagram Vens. Hal demikian dilakukan oleh peneliti berguna untuk mengetahui lembaga-lembaga mana saja yang dekat di hati masyarakat Desa Tambakrejo. Adanya kedekatan antara masyarakat Desa Tambakrejo dengan lembaga-lembaga yang ada di sana memberikan kemudahan jika nantinya diadakannya suatu rencana aksi yang bisa dilakukan dengan melalui pendekatan lembaga-lembaga yang dekat dengan masyarakat desa.



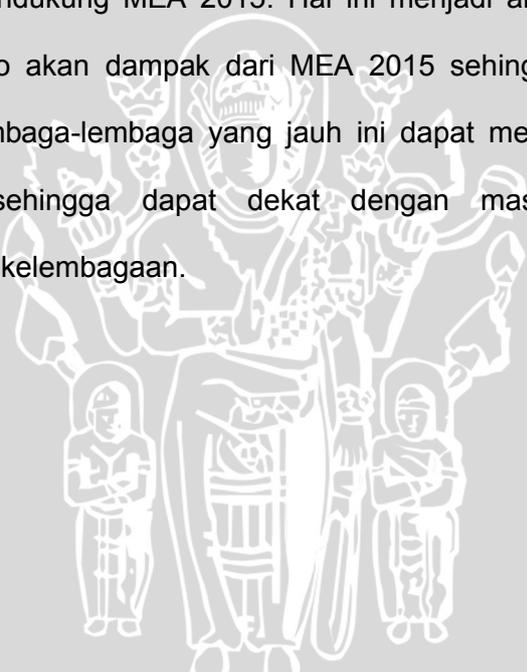
Berikut adalah hasil FGD mengenai kedekatan lembaga dengan masyarakat desa yang disajikan dalam bentuk diagram Vens.



Gambar 54. Diagram kedekatan lembaga-lembaga Desa Tambakrejo dengan masyarakat Desa Tambakrejo

Pada diagram di atas bahwa banyak lembaga-lembaga yang ada dikalangan masyarakat desa. Garis panah memiliki arti jauhnya jarak antara masyarakat dengan lembaga. Semakin panjang garis panah yang dibentuk dari pusat (masyarakat Desa Tambakrejo) maka semakin jauh pula masyarakat dengan lembaga tersebut dan sebaliknya. Diagram di atas menggambarkan bahwa komunitas gereja, POKMASWAS, kelompok nelayan, kelompok pengajian dan koperasi merupakan lembaga-lembaga yang dekat dengan masyarakat. Suatu rencana aksi dapat dilakukan dimana sasarannya adalah masyarakat Desa Tambakrejo bisa bekerja sama dengan kelompok nelayan, komunitas gereja, POKMASWAS dan kelompok pengajian dengan baik sebab kelompok nelayan, komunitas gereja dan kelompok pengajian merupakan lembaga yang dekat di

hati masyarakat Desa Tambakrejo. Lembaga-lembaga yang terpilih dekat dengan masyarakat menandakan bahwa lembaga-lembaga tersebut memenuhi semua indikator-indikator penilaian kedekatan lembaga yang sudah dipaparkan sebelumnya. Sebaliknya, semakin jauhnya lembaga-lembaga tersebut dari masyarakat menandakan bahwa semakin sedikitnya indikator-indikator penilaian yang terpenuhi. Jumlah lembaga yang dekat dengan masyarakat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah lembaga yang jauh dari masyarakat. Dalam mendukung MEA 2015 diperlukan peran serta lembaga. Berdasarkan kondisi lembaga-lembaga di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga-lembaga tersebut belum siap dalam mendukung MEA 2015. Hal ini menjadi ancaman tersendiri bagi Desa Tambakrejo akan dampak dari MEA 2015 sehingga perlu adanya usaha-usaha agar lembaga-lembaga yang jauh ini dapat memenuhi indikator-indikator penilaian sehingga dapat dekat dengan masyarakat dengan peningkatan kapasitas kelembagaan.



Tabel 18. Hasil FGD tentang kedekatan lembaga dengan masyarakat Desa Tambakrejo

Rangking	Jenis Kelembagaan	Peran dan Fungsi
1	Kelompok nelayan	Wadah aspirasi dan tempat bertukar pikir serta informasi antar masyarakat nelayan
2	Komunitas gereja	Wadah aspirasi, informasi dan pusat kegiatan-kegiatan kerohanian masyarakat beragama Kristen protestan
3	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Lembaga yang mengawasi perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam
4	Koperasi	Lembaga keuangan mikro yang membantu masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa barang dan jasa simpan pinjam
5	Kelompok pengajian	Tempat aspirasi, informasi dan pengadaan kegiatan-kegiatan keislaman
6	Water Rescue	Komunitas yang bertugas menjaga keselamatan wisatawan di laut.
7	PUSKESMAS	Melayani kesehatan masyarakat desa dan pusat informasi kesehatan masyarakat
8	Polisi	Aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketentraman kehidupan masyarakat
9	Kelompok tani	Wadah aspirasi dan tempat bertukar pikir serta informasi antar petani di Desa Tambakrejo
10	Taman Kanak-Kanak (TK)	Lembaga pendidikan formal yang berguna bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia
	Sekolah Dasar (SD)	Lembaga pendidikan formal yang berguna bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Lembaga pendidikan formal yang berguna peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang wajib ditempuh
11	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Wadah aspirasi dan kegiatan para ibu-ibu rumah tangga dalam pengembangan diri
12	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	Mitra kerja pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa dan menstimulasi masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa serta sebagai wadah menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat
13	Rukun Tetangga (RT)	Lembaga yang membantu masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan
14	Rukun Warga (RW)	Mengkoordinir beberapa RT dan membantu masyarakat desa
15	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Lembaga yang membantu dalam pelaksanaan musyawarah desa

Tabel 18. Hasil FGD tentang kedekatan lembaga dengan masyarakat Desa Tambakrejo (lanjutan)

16	LEP3	Lembaga perekonomian desa yang membantu masyarakat dalam melakukan simpan pinjam modal
17	Kantor Desa	Melayani masyarakat dalam kepentingan kependudukan secara administratif

FGD mengenai kedekatan lembaga dengan masyarakat yang dilakukan dengan cara memberikan rangking terhadap lembaga-lembaga yang masyarakat anggap dekat dihasilkan bahwa lembaga yang paling dekat dengan masyarakat yang pertama adalah kelompok nelayan. Terpilihnya kelompok nelayan sebagai lembaga yang terdekat dengan masyarakat dipengaruhi oleh mayoritas jenis mata pencaharian masyarakat Desa Tambakrejo adalah nelayan baik sebagai pemilik kapal maupun ABK. Selain itu, menandakan bahwa kelompok nelayan menjalankan fungsi dan tugas dengan baik dan dapat mewujudkan aspirasi-aspirasi khususnya anggota kelompok nelayan serta memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat desa akan adanya kelompok nelayan. Kemudian lembaga terdekat yang kedua adalah komunitas gereja. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat Desa Tambakrejo pemeluk agama nasrani dan komunitas ini sering kali mengadakan kegiatan-kegiatan yang diikuti dengan partisipasi aktif anggotanya. Lembaga terdekat ketiga adalah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). POKMASWAS ini sangat berperan aktif terhadap pengembangan pembangunan Desa Tambakrejo dalam hal keterpedulian akan sumberdaya alam yang ada seperti POKMASWAS merupakan pelaku utama dalam pengelolaan pariwisata berbasis konservasi dan ecowisata yang ada di Desa Tambakrejo.

Pada posisi rangking keempat adalah koperasi. Koperasi ini merupakan salah satu jenis lembaga perekonomian mikro yang sering digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik berupa simpanan maupun pinjaman. Tetapi hal tersebut hanya diakses oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas

seperti para pengambek, pemilik kapal, dan masyarakat ekonomi ke atas lainnya. Sedangkan untuk para masyarakat ekonomi ke bawah seperti para pedagang kecil, belantik, dan lainnya tidak berani untuk mengakses koperasi baik dalam bentuk simpanan maupun pinjaman dikarenakan adanya pelayanan yang berbeda yang diberikan karena adanya strata perekonomian, kerumitan dalam hal administrasi yang kurang disesuaikan dengan kondisi SDM yang ada, dan rendahnya pendapatan yang memberikan ketakutan masyarakat tidak bisa membayar uang yang dipinjami koperasi. Mereka lebih memilih untuk meminjam uang kepada “bank mingguan” yang memiliki administrasi jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat.

Lembaga terdekat yang kelima adalah kelompok pengajian islam. Kelompok pengajian islam ini juga aktif dalam menjalankan setiap pertemuan rutinnnya setiap hari kamis untuk mengadakan pengajian dan kegiatan-kegiatan keislaman lainnya. Lembaga-lembaga lainnya yang tidak memasuki rangking tersebut bukan berarti semua dari lembaga-lembaga tersebut jauh dari masyarakat tetapi ada beberapa factor yang mempengaruhi seperti pengaruh jenis mata pencaharian, itensitas kepentingan masyarakat dengan lembaga-lembaga tersebut, dan jenis peran yang dilakukan oleh masyarakat. Keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi berorganisasi masih rendah. Kelompok nelayan, komunitas gereja, POKMASWAS, koperasi dan kelompok pengajian islam adalah lembaga-lembaga yang memiliki kedekatan di masyarakat dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi terhadap keikutsertaan dalam lembaga antara lain:

1. rendahnya kekonsistenan lembaga dalam pengadaan kegiatan masyarakat. Ketika masyarakat sudah mulai terstimulus untuk mengikuti

kegiatan kinerja lembaga mulai menurun sehingga berkurangnya kegiatan yang diadakan atau bahkan tidak ada sama sekali.

2. rendahnya sumberdaya manusia yang mumpuni
3. masih terpetak-petaknya masyarakat berdasarkan status, golongan, dll dalam berkegiatan sehari-hari.
4. krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dianggap sebagai wadah inspirasi masyarakat, dan sumber informasi.

Partisipasi masyarakat desa perlu ditingkatkan agar lembaga-lembaga terdekat dapat berfungsi semakin baik dan lembaga-lembaga terjauh dapat menjadi dekat dan berfungsi dengan baik juga

4.3 PDPT Desa Tambakrejo dalam Mendukung MEA 2015

4.3.1 Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Desa Tambakrejo

A. Pelaku Kegiatan Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Desa Tambakrejo Tahun 2013 dan Tahun 2014

Pengembangan Desa Pesisir Tangguh merupakan salah satu program Kementerian Kelautan Perikanan yang menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan Perikanan telah memberikan dana sebesar Rp 461.000.000,- untuk setiap desa yang telah terpilih PDPT salah satunya adalah Desa Tambakrejo yang terletak di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Jawa Timur. Desa Tambakrejo memiliki dua dusun yaitu Dusun Tamban dan Dusun Sendang Biru.

Dalam pelaksanaan PDPT, Desa Tambakrejo membentuk beberapa kelompok-kelompok kerja yang memiliki tugas masing-masing yang disebut Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP). Ada 9 KMP yang dibentuk antara lain : KMP Tamban I, KMP Tamban II, KMP Tamban III, KMP Sendang Biru I, KMP Sendang Biru II, KMP Sendang Biru III, KMP Sendang Biru IV, KMP Sendang

Biru V dan KMP Sendang Biru VI. Berikut adalah nama-nama pelaksana yang ada di KMP:

Tabel 19. Susunan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) Desa Tambakrejo

No	Jabatan	Nama	Alamat	Keterangan
Kelompok Masyarakat Pesisir Tambakrejo 1				
1	Ketua	Suhardi	Dusun Tamban	Bertugas dalam pembangunan Pos Pantau dan pembangunan plengsengan di sekitar Pantai Tamban
2	Sekretaris	Sih Widi Handoyo	Dusun Tamban	
3	Bendahara	Agus Kristoni	Dusun Tamban	
	Anggota	1. Firmanto	Dusun Tamban	
		2. Sukowono	Dusun Tamban	
		3. Derman Andaretno	Dusun Tamban	
		4. Sih Budiari	Dusun Tamban	
		5. Hari Tantoko	Dusun Tamban	
		6. Suharianto	Dusun Tamban	
		7. Bambang E.S	Dusun Tamban	
Kelompok Masyarakat Pesisir Tambakrejo 2				
1	Ketua	Sisadi	Dusun Tamban	Bertugas merenovasi Jembatan 1 Dusun Tamban
2	Sekretaris	Nanot Eka Adi S	Dusun Tamban	
3	Bendahara	Sumarno	Dusun Tamban	
	Anggota	1. Tukijan	Dusun Tamban	
		2. Suharmadi	Dusun Tamban	
		3. Sih Suhamiprangako	Dusun Tamban	
		4. Sih Purwijanto	Dusun Tamban	
Kelompok Masyarakat Pesisir Tambakrejo 3				
1	Ketua	Sih Sukoreno	Dusun Tamban	Bertugas merenovasi jembatan II di Dusun Tamban
2	Sekretaris	Supratiknyo Adi	Dusun Tamban	
3	Bendahara	Wismanyono	Dusun Tamban	
	Anggota	1. Iswanto	Dusun Tamban	
		2. Wasis	Dusun Tamban	
		3. Heri Wiyono	Dusun Tamban	
Kelompok Masyarakat Pesisir Sendang Biru 1				
1	Ketua	Dwi Adi Yulianto	Dusun Sendang Biru	Bertugas reboisasi dan vegetasi pantai serta penanaman pohon pala di Dusun Sendang Biru
2	Sekretaris	Iswichayo K	Dusun Sendang Biru	
3	Bendahara	Heri Suprianto	Dusun Sendang Biru	
	Anggota	1. Toimin	Dusun Sendang Biru	
		2. Hermanto	Dusun Sendang Biru	
		3. Yadi	Dusun Sendang Biru	
		4. Wagino	Dusun Sendang Biru	
		5. Siswanto	Dusun Sendang Biru	
		6. Supratikno	Dusun Sendang Biru	
		7. Ananda Fitrah G.F	Dusun Sendang Biru	
Kelompok Masyarakat Pesisir Sendang Biru 2				
1	Ketua	Gatot Supriono	Dusun Sendang Biru	Pembuatan MCK di Dusun Sendang Biru
2	Sekretaris	Suyoko	Dusun Sendang Biru	
3	Bendahara	Wahyudi	Dusun Sendang Biru	
	Anggota	1. Subandi	Dusun Sendang Biru	
		2. Suhajar	Dusun Sendang Biru	
		3. Hanata Wahyu W	Dusun Sendang Biru	
		4. Asani	Dusun Sendang Biru	
		5. Sagi	Dusun Sendang Biru	

Tabel 19. Susunan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) Desa Tambakrejo (lanjutan)

Kelompok Masyarakat Pesisir Sendang Biru 3				
1	Ketua	Tukinun	Dusun Sendang Biru	Bertugas paving jalan sebagai jalur evakuasi di Dusun Sendang Biru
2	Sekretaris	Sumadi	Dusun Sendang Biru	
3	Bendahara	Suhartono	Dusun Sendang Biru	
	Anggota	1. Sigit Sutrisno	Dusun Sendang Biru	
		2. Gunawan	Dusun Sendang Biru	
		3. Mat Sa'i	Dusun Sendang Biru	
		4. Mukhori	Dusun Sendang Biru	
		5. Waskito Adi	Dusun Sendang Biru	
		6. Prawoto	Dusun Sendang Biru	
Kelompok Masyarakat Pesisir Sendang Biru 4				
1	Ketua	Eriyo	Dusun Sendang Biru	Bertugas pembuatan drainase untuk siaga banjir di Dusun Sendang Biru
2	Sekretaris	Mujiono	Dusun Sendang Biru	
3	Bendahara	Candra	Dusun Sendang Biru	
	Anggota	1. Sidik	Dusun Sendang Biru	
		2. Sugeng Harianto	Dusun Sendang Biru	
		3. Wari	Dusun Sendang Biru	
		4. Kasiadi	Dusun Sendang Biru	
		5. Sumardi	Dusun Sendang Biru	
		6. Driadmojo	Dusun Sendang Biru	
Kelompok Masyarakat Pesisir Sendang Biru 5				
1	Ketua	Sutrisno	Dusun Sendang Biru	Bertugas pembuatan jembatan Mangrove di Dusun Sendang Biru
2	Sekretaris	Budi Witanto	Dusun Sendang Biru	
3	Bendahara	Eko Muji	Dusun Sendang Biru	
	Anggota	1. Supi'i	Dusun Sendang Biru	
		2. Agus Wiji. W	Dusun Sendang Biru	
		3. Yohanes Anggit P	Dusun Sendang Biru	
		4. Tukiman	Dusun Sendang Biru	
		5. Sumarto	Dusun Sendang Biru	
		6. Slamet	Dusun Sendang Biru	
		7. Misrianto	Dusun Sendang Biru	
Kelompok Masyarakat Pesisir Sendang Biru 6				
1	Ketua	Tanyono	Dusun Sendang Biru	Bertugas merenovasi TPA di Dusun sendang Biru
2	Sekretaris	Tanoyo	Dusun Sendang Biru	
3	Bendahara	Pramujo, HS	Dusun Sendang Biru	
	Anggota	1. Sukrisno Adi	Dusun Sendang Biru	
		2. Sih Edi Purwoko	Dusun Sendang Biru	
		3. Budiono	Dusun Sendang Biru	
		4. Edi Suwarno	Dusun Sendang Biru	

Sumber: Laporan akhir PDPT, 2014

KMP-KMP tersebut nantinya akan bekerja sesuai dengan tugas yang sudah tercantum di Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) secara gotong royong. RPDP merupakan pedoman-pedoman dalam melakukan PDPT dengan berdasarkan pada permasalahan dan kebutuhan desa dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) serta disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des). RPDP merupakan kumpulan-kumpulan rencana pembangunan desa yang telah disusun atas kesepakatan bersama.

Setelah pembagian kelompok-kelompok kerja (KMP) beserta tugas, maka pembangunan dilaksanakan setelah turunnya dana PDPT yang ditransfer pada rekening masing-masing KMP.

B. Pemanfaatan Dana Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Desa Tambakrejo Tahun 2013 dan Tahun 2014

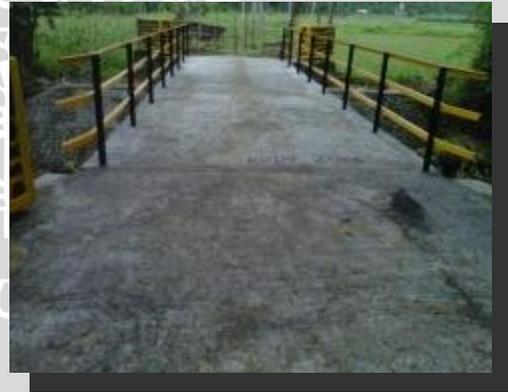
Pemanfaatan dana PDPT pada tahun 2013 (tahun pertama) dan tahun 2014 (tahun kedua) Desa Tambakrejo digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sarana sekunder desa yang dilakukan secara gotong-royong. Pembangunan-pembangunan tersebut antara lain:

1. Renovasi Jembatan I

Kegiatan ini merupakan perbaikan jembatan yang sudah ada tetapi dalam kondisi kurang bagus untuk dilewati truk pengangkut tebu. Total dana untuk kegiatan ini mencapai RP 49.292.500 yang bersumber dari dana dari BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh sebesar Rp 39.500.000 dan dana swadaya masyarakat sebesar Rp 9.792.500.



Gambar 55. Kondisi awal jembatan I sebelum direnovasi



Gambar 56. Kondisi jembatan I setelah direnovasi

Pembangunan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengantisipasi kejadian buruk yang akan terjadi saat di lewati oleh truk pengangkut tebu milik warga sekitar.

2. Renovasi Jembatan II

Kegiatan ini merupakan perbaikan jembatan yang sudah ada tetapi dalam kondisi kurang bagus untuk dilewati truk pengangkut tebu. Total dana untuk kegiatan ini mencapai RP 46.915.000 yang bersumber dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh sebesar Rp 39.500.000 dan dana swadaya masyarakat sebesar Rp 7.415.000.



Gambar 57. Kondisi jembatan II sebelum direnovasi



Gambar 58. Kondisi jembatan II setelah direnovasi

Pembangunan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengantisipasi kejadian buruk yang akan terjadi saat di lewati oleh truk pengangkut tebu milik warga sekitar.

3. Renovasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Perbaikan tempat pembuangan akhir yang sudah ada tetapi dalam kondisi kurang memadai. Total dana untuk kegiatan ini mencapai Rp 63.000.000 yang bersumber dari dana dari BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh sebesar Rp 55.000.000 dan dana swadaya masyarakat sebesar Rp 8.000.000.



Gambar 59. Kondisi TPA sebelum direnovasi



Gambar 60. Kondisi TPA setelah direnovasi

Pembangunan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat tempat pembuangan akhir lebih bersih. Bila sampah dibiarkan terus seperti itu akan berakibat pada lahan milik warga yang ikut terkena sampah yang dibiarkan.

4. Pembuatan Sarana Kebersihan MCK I

Kegiatan ini merupakan pembuatan sarana kebersihan MCK di daerah yang kumuh. Total dana untuk kegiatan ini mencapai Rp 36.000.000 yang bersumber dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh sebesar Rp 30.000.000 dan dana swadaya masyarakat sebesar Rp 6.000.000.



Gambar 61. Kondisi sebelum MCK direnovasi



Gambar 62. Kondisi MCK setelah direnovasi

Pembangunan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat tempat yang padat penduduk mempunyai sarana kebersihan yang layak digunakan oleh setiap warga.

5. Paving Jalur Evakuasi

Kegiatan ini merupakan pembuatan paving di dusun Sendang Biru. Kegiatan ini dikerjakan dengan jangka waktu selama 4 minggu, mulai dari minggu ke tiga bulan Juli sampai minggu ke dua bulan Agustus. Total dana untuk kegiatan ini mencapai RP 70.000.000 dengan total dana dari BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh sebesar Rp 62.000.000 swadaya masyarakat sebesar Rp 8.000.000.



Gambar 63. Kondisi jalan sebelum dipaving



Gambar 64. Kondisi jalan setelah dipaving

Pembangunan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat sarana jalan yang lebih nyaman saat dilewati oleh setiap warga.

6. Drainase

Kegiatan ini merupakan pembuatan drainase untuk siaga bencana banjir di dusun Sendang Biru. Total dana untuk kegiatan ini mencapai Rp 80.510.204 yang bersumber dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh sebesar Rp 36.970.000 dan dana swadaya masyarakat sebesar Rp 43.540.204.



Gambar 65 . Kondisi awal drainase

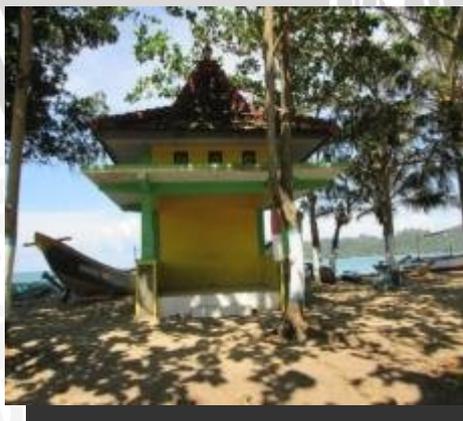


Gambar 66. Kondisi drainase setelah direnovasi

Pembangunan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat sarana jalan yang lebih nyaman saat dilewati oleh setiap warga pada musim hujan. Serta saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi air tidak sampai meluap ke jalan.

7. Pembuatan Pos Pantau

Kegiatan ini merupakan pembuatan Pos Pantau untuk pengawasan Pantai Tamban Indah yang terletak di Dusun Tamban. Total dana untuk kegiatan ini mencapai RP 54.602.330 yang bersumber dari dana dari BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh sebesar Rp 39. 000.000 dan dana swadaya masyarakat sebesar Rp 15.602.330.



Gambar 67 .Kondisi pos pantau sebelum direnovasi



Gambar 68. Kondisi pos pantau setelah direnovasi

Pembangunan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengawasi dan memantau jika ada bencana alam yang terjadi.

Pembangunan pos pantau ini sangat dibutuhkan oleh nelayan karena dari segi pengawasan akan peralatan melaut dan perahu juga sangat kurang sehingga diadakan pengadaan barang-barang untuk pos pantau.



Gambar 69. Pengadaan barang-barang untuk pos pantau

8. Pembuatan Plengsengan

Kegiatan ini merupakan pembuatan plengsengan di Dusun Tamban. Total dana untuk kegiatan ini mencapai Rp 121.070.764 yang berasal dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh sebesar Rp 43.933.000 dan dana swadaya masyarakat sebesar Rp 77.137.764.



Gambar 70. Kondisi awal sebelum dibuat plengsengan



Gambar 71. Kondisi setelah dibuat plengsengan

Pembangunan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat sarana jalan yang lebih nyaman saat dilewati oleh setiap warga pada musim

hujan. Serta saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi air tidak sampai meluap ke jalan.

9. Pembuatan Jembatan Akses Jalan Menuju Mangrove I

Kegiatan ini merupakan pembuatan jembatan sarana jalan menuju tempat penanaman mangrove. Pada saat air laut pasang, kawasan ini terendam air. Total dana untuk kegiatan ini mencapai Rp 132.000.000 yang berasal dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh sebesar Rp 60.000.000 dan dana swadaya masyarakat sebesar Rp 72.000.000.



Gambar 72. Kondisi sebelum dibangunnya jembatan mangrove



Gambar 73. Jembatan mangrove yang dibangun

Pembangunan jembatan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat sarana jalan menuju area lahan penanaman mangrove dapat dilewati pada saat air laut sedang pasang. Karena pada saat air laut sedang pasang, kelompok akan kesulitan untuk melintasi jalan.

10. Penanaman Mangrove dan Pohon Pala

Kegiatan ini merupakan penanaman mangrove & pohon pala. Dari kegiatan ini total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 76.800.000 yang bersumber dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh sebesar Rp 56.000.000 dan dana swadaya masyarakat sebesar Rp 20.800.000.



Gambar 74. a. Kondisi awal lahan; b. bibit mangrove; c. Lahan yang sudah ditanami mangrove

Tujuan utama penanaman mangrove dan pohon pala ini adalah membuat hutan-hutan di kawasan pesisir yang sudah gundul di dusun Sendang Biru kembali menjadi hijau. Dimulai dari rasa peduli sekelompok masyarakat terhadap hutan yang ada di dusun Sendang Biru

Dalam kelompok ini tidak hanya menanam mangrove & pohon pala, tetapi dari penanaman mangrove tersebut dijadikan juga sebagai edukasi untuk anak-anak sekolah dasar sampai perguruan tinggi, serta komunitas. Selain dijadikan edukasi, dari penanaman mangrove ini juga menarik lembaga ataupun perorangan dari luar negeri & dalam negeri untuk melihat penanaman mangrove yang ada di Desa Tambakrejo tepatnya Dusun Sendang Biru.

11. Pengadaan Peralatan Komunikasi HT

Kegiatan ini merupakan kegiatan siaga bencana alam dan perubahan iklim. Pengadaan alat komunikasi HT sejumlah 1 unit ini berguna untuk komunikasi antar anggota kelompok pada saat terjadi bencana dan perubahan iklim. Dari kegiatan ini total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 4.000.000 yang bersumber dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh.





Gambar 75 . Alat Komunikasi HT

12. Genset Diesel Listrik di Pantai Clungup

Kegiatan ini merupakan kegiatan siaga bencana alam dan perubahan iklim. Dari kegiatan ini total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 2.504.000 yang bersumber dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh.



Gambar 76. Genset diesel listrik

Pengadaan genset 1 unit di Pantai Clungup ini berguna sebagai sumber listrik darurat ketika terjadi bencana.

13. Genset Diesel Listrik di Pantai Sendiki

Kegiatan ini merupakan kegiatan siaga bencana alam dan perubahan iklim. Dari kegiatan ini total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 5.000.000 yang bersumber dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh.



Gambar 77 . Genset diesel listrik

Pengadaan genset 1 unit di Pantai Sendiki ini berguna sebagai sumber listrik darurat ketika terjadi bencana.

14. Pengadaan Rambu Evakuasi 5 buah KMP Sendiki Pantau Pesisir PDPT 650.000 di Tambakrejo

Kegiatan ini merupakan kegiatan siaga bencana alam dan perubahan iklim. Pengadaan 5 buah rambu evakuasi ini mengeluarkan dana sebesar Rp 5.000.000 yang bersumber dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh..



Gambar 78. Rambu evakuasi di Desa Tambakrejo

Pengadaan rambu evakuasi ini berguna untuk membantu mempermudah kegiatan pengevakuasian penduduk ketika terjadi bencana. Pengadaan rambu evakuasi ini berada di Tambakrejo

15. Pembuatan Tandon Air

Kegiatan ini merupakan masuk dalam bina lingkungan dan infrastruktur. Tandon dan pipa air yang dibuat berukuran 2x2x1,5 m² yang berada di Pantai Sendiki. Total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 21.000.000 yang berasal dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh sebesar Rp 10.275.000 dan dana swadaya masyarakat Rp. 11.000.000.



Gambar 79. Lahan sebelum dibangunnya tandon air



Gambar 80. Tandon air yang sudah jadi

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menampung sumber air dan menunjang dalam kegiatan pengadaan air bersih.

16. Pembuatan MCK II di Pantai Sendiki

Kegiatan ini merupakan masuk dalam bina lingkungan dan infrastruktur. MCK dibuat berukuran 5x3x2,6 m² yang berada di Pantai Sendiki. Total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 47.255.000 yang berasal dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh sebesar Rp 23.630.000 dan dana swadaya masyarakat Rp. 23.625.000.



Gambar 81. MCK yang masih dalam pengerjaan

17. Septic Tank

Kegiatan ini merupakan masuk dalam bina lingkungan dan infrastruktur. Septic tank dibuat berukuran 3x3 m² yang berada di Pantai Sendiki untuk fasilitas MCK. Total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 3.320.000 yang berasal dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh.



Gambar 82. Septic tank dari dana PDPT

18. Pembuatan Dermaga Perahu Kecil

Kegiatan ini merupakan masuk dalam bina lingkungan dan infrastruktur. Dermaga yang dibuat berukuran 14x1,5x0,3 m² yang berada di Kundang Buntung Dusun Sendang Biru. Total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 6.386.000 yang berasal dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh.



Gambar 83. Dermaga perahu kecil

Pembuatan dermaga perahu kecil ini berguna sebagai tempat sandar labuh perahu kecil neyan.

19. Pembuatan Pembuatan MCK III

Kegiatan ini merupakan masuk dalam bina lingkungan dan infrastruktur. MCK yang dibuat berukuran 5x3x2,6 m² yang berada di Pantai Gatra Dusun Sendang Biru. Total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 34.515.000 yang berasal dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh sebesar Rp 23.640.000 dan dana swadaya masyarakat sebesar Rp 10.876.000.



Gambar 84. Pengadaan MCK

Pengadaan MCK ini selain sebagai fasilitas mandi, cuci, dan kakus juga sebagai fasilitas dari wisata Pantai Clungup.

20. Pengadaan Instalansi Pipa Air

Kegiatan ini merupakan masuk dalam bina lingkungan dan infrastruktur. Pengadaan instalansi pipa air dibuat berukuran 2750 m² yang berada di Clungup Dusun Sendang Biru. Total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 57.720.000 yang berasal dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh sebesar Rp 47.720.000 dan dana swadaya masyarakat sebesar Rp 10.000.000.



Gambar 85. Tandon air yang ada di Pantai Clungup

21. Septic Tank II

Kegiatan ini merupakan masuk dalam bina lingkungan dan infrastruktur. Septic tank dibuat berukuran 3x3 m² yang berada di Pantai Gatra Dusun Sendang Biru. Total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 2.070.000 yang berasal dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh

22. Pembuatan Jembatan Mangrove II

Kegiatan ini merupakan masuk dalam bina lingkungan dan infrastruktur. Jembatan mangrove dibuat berukuran 130x1,5x0,3 m² yang berada di Kundang Buntung Dusun Sendang Biru. Total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 109.486.600 yang berasal dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh sebesar Rp 47.986.600 dan dana swadaya masyarakat sebesar Rp 61.500.000.



Gambar 86. Kondisi sebelum dibangunnya mangrove



Gambar 87. Jembatan mangrove

Tujuan pembuatan jembatan mangrove ini adalah untuk menghubungkan tempat satu ke tempat lainnya dan menghalau kapal sekoci yang bersandar yang menyebabkan polusi solar di wilayah konservasi mangrove.

23. Bibit Sawo dan Sirsak

Kegiatan ini merupakan masuk dalam bina sumberdaya. Bibit sawo dan sirsak yang ditanam sebanyak 250 pohon di Pantai Clungup Dusun Sendang Biru. Total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 1.230.000 yang berasal dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh

24. Pengadaan Solar Cell

Kegiatan ini merupakan masuk dalam bina sumberdaya. Pengadaan solar cell sebanyak 2 unit di Pantai Gatra Dusun Sendang Biru. Total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 11.000.000 yang berasal dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh. Solar cell ini berguna sebagai sumber penerangan.



Gambar 88. Pengadaan solar cell di Pantai Gatra



Gambar 89. Pengadaan solar cell di Pantai Clungup

Sedangkan pengadaan solar cell sebanyak 1 unit di Pantai Clungup Dusun Sendang Biru. Total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 7.100.000 yang berasal dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh

25. Pengadaan Perahu Wisata

Kegiatan ini merupakan masuk dalam bina usaha. Pengadaan perahu kenting sebanyak 2 unit di Kundang Buntung Dusun Sendang Biru. Total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 4.000.000 yang berasal dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh. Perahu kenting ini sebagai salah satu wahana wisata susur mangrove yang sudah ada.



Gambar 90. Perahu kenting

26. Gazebo

Kegiatan ini merupakan masuk dalam bina usaha. Gazebo yang dibangun berukuran 3x3 m² di Pantai Sendiki Dusun Tamban. Total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 4.198.000 yang berasal dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh.

27. Pengadaan Life Jacket

Kegiatan ini merupakan masuk dalam bina usaha. Pengadaan life jacket sebanyak 17 buah di Pantai Sendiki Dusun Tamban. Total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 3.400.000 yang berasal dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh.



Gambar 91 . Life jacket

Life jacket merupakan peralatan safety yang berguna ketika terjadi musibah saat berenang di pantai.

28. Pengadaan Peralatan Snorkling

Kegiatan ini merupakan masuk dalam bina usaha. Pengadaan peralatan snorkling sebanyak 3 paket di Kundang Buntung Dusun Sendang Biru. Total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 7.500.000 yang berasal dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh.



Gambar 92. Peralatan snorkling

29. Pengadaan Pelatan Selam

Kegiatan ini merupakan masuk dalam bina usaha. Pengadaan peralatan selam 1 paket di Kundang Buntung Dusun Sendang Biru. Total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 14.000.000 yang berasal dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh.



Gambar 93. Peralatan selam

30. Pengadaan Mesin Daur Ulang Limbah

Kegiatan ini merupakan masuk dalam bina usaha. Pengadaan 1 unit mesin limbah di Pantai Clungup Dusun Sendang Biru. Total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 5.600.000 yang berasal dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh.



Gambar 94. Mesin daur ulang limbah

Pengadaan mesin daur ulang ini berfungsi untuk pengolahan limbah yang ada di Desa Tambakrejo

31. Pengadaan Peralatan Camping

Kegiatan ini merupakan masuk dalam bina usaha. Pengadaan 1 paket peralatan camping di Pantai Sendiki Dusun Tamban. Total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 16.200.000 yang berasal dari dana BLM Pengembangan Desa Pesisir Tangguh.



Gambar 95. Peralatan camping

Pengadaan peralatan camping ini berguna untuk usaha persewaan peralatan camping.

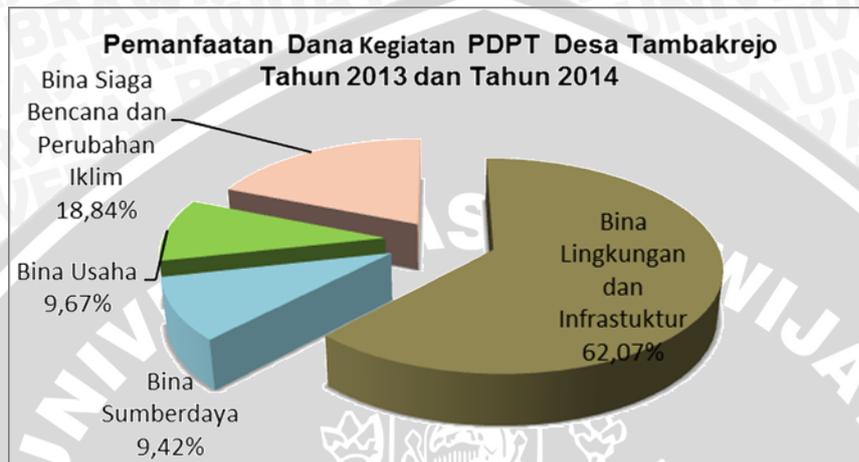


Tabel 20. Rincian Penggunaan Dana PDPT Tahun 2013 dan Tahun 2014 di Desa Tambakrejo

No	Jenis Bangunan/Barang	Jumlah unit	Anggaran (Rp)		Anggaran masing-masing kegiatan (PDPT+swadaya)
			PDPT	Swadaya	
Bina Lingkungan dan Infrastruktur					
1	Renovasi Jembatan I		39.487.500	9.792.500	Rp 677.647.000
2	Renovasi Jembatan II		39.165.000	7.415.000	
3	Renovasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)		55.000.000	8.000.000	
4	Pembuatan MCK I		30.000.000	6.000.000	
5	Paving jalur evakuasi		62.000.000	8.000.000	
6	Jembatan mangrove I		60.000.000	72.000.000	
7	Pembuatan tandon air	2x2x1,5m	10.275.000	11.000.000	
8	Pembuatan MCK II	5x3x2,6m	23.640.000	23.625.000	
9	Pembuatan septic tank I	3x2x2m	2.070.000		
10	Pembuatan dermaga perahu kecil	1,5x15x0,3m	6.386.000		
11	Pembuatan MCK III	5x3x2,6	23.640.000	10.875.000	
12	Instalasi pipa air		47.720.000	10.000.000	
13	Septik tank II		2.070.000		
14	Jembatan mangrove II		47.986.000	61.500.000	
	Sub total		449.439.500	228.207.500	
Bina Sumberdaya					
15	Reboisasi mangrove dan vegetasi pantai serta penanaman bibit pohon pala		56.000.000	20.800.000	Rp 89.030.000
16	Penanaman bibit sawo dan sirsak	205 bibit	1.230.000		
17	Solar cell	2 unit	11.000.000		
	Sub total		68.230.000	20.800.000	
Bina Usaha					
18	Perahu khanting	2 unit	4.000.000		Rp 69.978.000
19	Gazebo	3x3x2 m ²	4.198.000		
20	Life jacket	17 unit	3.400.000		
21	Peralatan snorkling	1 paket	7.500.000		
22	Peralatan selam	1 paket	14.080.000		
23	Mesin daur ulang	1 unit	5.600.000		
24	Peralatan kamping	1 paket	16.200.000		
25	Alat dokumentasi		15.000.000		
	Sub total		69.978.000	0	
BinaSiaga Bencana dan Perubahan Iklim					
26	Pos pantau dan peralatan SWAT		39.000.000	15.602.330	Rp 272.657.298
27	Pembuatan plengsengan		43.933.000	77.137.764	
28	Pembuatan drainase		36.940.000	43.540.204	
29	Pengadaan peralatan komunikasi HT	1 unit	4.000.000		
30	Pengadaan peralatan genset diesel	2 unit	7.504.000		
31	Pengadaan rambu evakuasi	5 unit	5.000.000		
	Sub total		136.377.000	136.280.298	
	Total		710.562.000	385.287.798	Rp 1.109.312.298

4.3.2 PDPT Desa Tambakrejo dalam Mendukung MEA 2015

Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh memiliki beberapa fokus kegiatan dalam menciptakan desa pesisir yang tangguh yang kegiatannya meliputi:



Gambar 96. Pemanfaatan Dana Kegiatan PDPT tahun 2013 dan tahun 2014 Desa Tambakrejo

Diagram di atas merupakan diagram yang menggambarkan persentase penggunaan dana PDPT tahun 2013 (tahap 1) dan tahun 2014 (tahap 2) pada kegiatan-kegiatan yang mengacu pada empat bina yaitu bina siaga bencana dan perubahan iklim, bina usaha, bina sumberdaya, dan bina lingkungan dan infrastruktur. Penggunaan dana PDPT tahun 2013 dan tahun 2014 yaitu sebesar 18,84% dari dana PDPT digunakan dalam kegiatan bina siaga bencana, 62,07% dana PDPT digunakan untuk pelaksanaan kegiatan bina lingkungan dan infrastruktur, sedangkan sebesar 9,42% dana PDPT digunakan dalam kegiatan bina sumberdaya, dan sebesar 9,67% digunakan untuk kegiatan bina usaha.

Dalam mendukung Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 kualitas Desa Tambakrejo baik dari segi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan infrastruktur setidaknya memenuhi standarisasi-standarisasi indikator yang telah ada. Penentuan standar yang dipakai untuk mengukur kualitas minimal yang digunakan dalam mendukung MEA berasal dari berbagai sumber seperti

Keputusan Menteri, BKKBN, Peraturan Menteri dan berbagai sumber lainnya. Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh secara tidak langsung telah menyiapkan Desa Tambakrejo dalam mendukung Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dari segi lingkungan dan infrastruktur, sumberdaya manusia, usaha, siaga bencana dan perubahan iklim, dan sumberdaya.

A. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia adalah aset utama yang penting bagi Desa Tambakrejo dalam mendukung MEA karena sumberdaya manusia menentukan kemajuan suatu wilayah. Sumberdaya manusia yang dimiliki Desa Tambakrejo masih rendah. Kondisi sumberdaya manusia yang ada di Desa Tambakrejo antara lain:

1. Sebanyak 38,4% penduduk Desa Tambakrejo berpendidikan SD sedangkan penduduk yang berpendidikan pada jenjang perguruan masih sebesar 0,9% (Desa Tambakrejo, 2013)
2. Ketersediaan tenaga kerja sebesar 48,7% (Desa Tambakrejo, 2013)
3. Pendapatan minimal masyarakat yang sebagian besar adalah nelayan Rp 0- Rp 1000.000/bulan
4. Jika musim angin barat pedagang kecil menengah mengalami penurunan pendapatan karena nelayan tidak mencari ikan yang disebabkan oleh cuaca buruk
5. Masyarakat tidak mengalami kendala dalam melaksanakan ibadah
6. Mayoritas masyarakat disana sudah menggunakan sarana transportasi dalam berkegiatan
7. Mayoritas masyarakat disana menggunakan sarana kesehatan pemerintah ketika sakit, hanya sebagian kecil yang masih pergi ke dukun ketika sakit. Hal tersebut didasarkan pada hasil dari wawancara dan observasi.

8. TV, radio, hp, dan koran bukan lagi menjadi barang inferior tetapi merupakan barang sekunder dalam kehidupan masyarakat
9. Jumlah penduduk yang bermata pencaharian petani sebesar 24,87%, buruh tani 5,85%, PNS 0,27%, PIRT 0,36%, pedagang keliling 0,36%, peternak 7,57%, nelayan 48,59%, montir 0,22%, bidan swasta 0,04%, perawat swasta 0,09%, PRT 0,34%, TNI 0,11%, POLRI 0,09%, pensiunan 0,27%, pengusaha kecil dan menengah 2,62%, dukun kampung terlatih 0,18%, jasa pengobatan alternatif 0,07%, pengusaha besar 0,4%, arsitek 0,02%, seniman 2,03% dan karyawan perusahaan swasta 1,47%.
10. Dari hasil kuisioner kepala keluarga tidak ada yang terkena PHK dan beberapa anggota keluarga yang putus sekolah
11. Sebagian kecil dari masyarakat yang memiliki rumah dengan lantai tanah

Data di atas adalah gambaran kesejahteraan masyarakat Desa Tambakrejo. BKKBN dalam menentukan kondisi kemiskinan suatu wilayah dengan menstratifikasinya ke dalam beberapa golongan antara lain keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III, dan keluarga sejahtera III plus. Pada tiap-tiap golongan tersebut memiliki beberapa indikator ekonomi dan indikator non-ekonomi. Berikut adalah tabel indikator-indikator kemiskinan berdasarkan BKKBN (2010) sebagai berikut:

Tabel 21. Indikator Kemiskinan Berdasarkan BKKBN

Indikator Kategori	Indikator-Indikator		Keterangan
	Ekonomi	Non-ekonomi	
Keluarga Pra Sejahtera (Sangat Miskin)	a. Makan dua kali atau lebih b. Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas c. Bagian terluas lantai bukan dari tanah	a. Melaksanakan ibadah b. Bila sakit ke sarana kesehatan	Tidak terpenuhinya satu atau lebih indikator
Keluarga Sejahtera I (Miskin)	a. Makan daging/ ikan/telur sekali dalam seminggu b. Memiliki satu stel pakaian dalam setahun	a. Ibadah teratur b. Tidak sakit-sakitan dalam tiga bulan terakhir c. Berpenghasilan tetap d. Usia 10-60 tahun dapat membaca dan menulis huruf latin e. Usia 6-15 tahun bersekolah f. Anak lebih dari dua dan berKB	Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih indikator karena alasan ekonomi
Keluarga Sejahtera II	a. Memiliki tabungan keluarga b. Rekreasi bersama 6 bulan sekali c. Menggunakan sarana transportasi d. Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah	a. Makan bersama sambil berkomunikasi b. Mengikuti kegiatan masyarakat	Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih indikator karena alasan ekonomi
Keluarga Sejahtera III	Terpenuhinya indikator :	Belum terpenuhinya indikator:	
	a. Memiliki tabungan keluarga b. Rekreasi bersama 6 bulan sekali c. Menggunakan sarana transportasi d. Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah	a. Aktif memberikan sumbangan material secara teratur b. Aktif sebagai pengurus organisasi	
Keluarga Sejahtera III Plus	Sudah terpenuhinya indikator: a. Aktif memberikan sumbangan material secara teratur b. Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan		

Sumber: BKKBN, 2010

Selain BKKBN yang memiliki indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga, Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat sejahtera apabila:

1. Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan
2. Semakin tinggi tingkat status pekerjaan maka semakin tinggi pula kesejahteraanya
3. Jenis lantai yang berasal dari bukan tanah menandakan tingginya tingkat kesejahteraan

Departemen kesehatan menambahkan beberapa indikator mengenai pengukuran kesejahteraan masyarakat antara lain;

1. Tingginya tingkat akses pelayanan kesehatan
2. Tidak adanya masyarakat yang putus sekolah
3. Frekuensi makanan pokok minimal 2 kali sehari
4. Tidak adanya pemutusan hubungan kerja yang dialami kepala keluarga

Bappenas mengukur kesejahteraan suatu masyarakat dengan beberapa indikator-indikator di bawah ini:

1. Tingginya akses dan layanan pendidikan
2. Tingginya kesempatan bekerja dan berusaha
3. Kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam mendukung
4. Terciptanya rasa aman dan nyaman
5. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang ada sehingga mempermudah dalam perolehan informasi-informasi
6. Tingginya fasilitas sanitasi

Berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan masyarakat yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kondisi kesejahteraan masyarakat Desa Tambakrejo menurut:

1. BKKBN (2010), rata-rata masyarakat Desa Tambakrejo berada pada kesejahteraan kategori keluarga Sejahtera I dan keluarga Sejahtera II.
2. Badan Pusat Statistik, tingkat kesejahteraan masyarakat di sana cukup sejahtera karena masih rendah didukung dengan rendahnya kualitas SDM yang dilihat dari jenjang pendidikan, status pekerjaan yang tidak terlalu tinggi dan mayoritas rumah penduduk berlantai bukan tanah
3. Departemen kesehatan, masyarakat Desa Tambakrejo cukup sejahtera karena tingkat pengaksesan sarana kesehatan tinggi jarang sekali yang pergi ke dukun untuk berobat, masih ada beberapa masyarakat yang putus sekolah, terpenuhinya makan dengan frekuensi minimal 2 kali dalam sehari dan tidak ada kepala keluarga yang di-PHK.
4. Bappenas, masyarakat Desa Tambakrejo masuk dalam kategori sejahtera karena tingkat akses pelayanan pendidikan tinggi, sumberdaya alam yang masih mencukupi kehidupan masyarakat Desa Tambakrejo, masih aman dan nyaman, tercukupinya fasilitas sanitasi tetapi masih rendahnya tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan sangat penting, karena pendidikan sangat berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih baik akan mempunyai peluang yang lebih rendah menjadi miskin (BKKBN, 2010). Pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan memainkan peran penting dalam pekerjaan, di mana tingkat pengangguran tertinggi berada di kalangan mereka yang memiliki latar belakang pendidikan SMP atau SMA (ILO, 2014).

B. Sumberdaya Alam

Sumberdaya alam-sumberdaya alam yang dimiliki Desa Tambakrejo berdasarkan RPJM-Desa tahun 2014-2019 yaitu:

- a. Memiliki lahan dengan total luas 2.950,7 Ha/m² yang terdiri dari lahan persawahan, sawah taddah hujan, sawah irigasi, ladang dan hutan produksi pada tahun 2013
- b. Komoditas pertanian yang mencapai 1.051 ton yang berasal dari komoditas jagung, padi, ubi kayu, kelapa, kopi dan komoditas kayu yang mencapai 300 M2/tahun pada tahun 2013
- c. Hasil komoditas perikanan tangkap yang mencapai 2.382,907 ton/tahun pada tahun 2013, dan
- d. Komoditas peternakan yang menghasilkan 3.652 ekor pada tahun 2013 yang berasal dari berbagai jenis ternak (sapi, kerbau, babi, ayam kampung, kambing, burung wallet, anjing, dan kucing).

Maka dari itu, para pelaku PDPT memanfaatkan dana PDPT sebesar 9,42% untuk melakukan kegiatan-kegiatan bina sumberdaya yang meliputi (reboisasi mangrove dan penanaman bibit pohon pala, penanaman bibit sawo dan sirsak, dan solar cell). Sumberdaya alam yang dimiliki dijaga kelestariannya agar bisa diekspor dalam jumlah banyak ke pasar ASEAN dan internasional.

Desa Tambakrejo terkenal dengan sentra hasil tangkapan ikan segarnya. Namun produk ikan segarnya ini belum mendapat perhatian untuk dijadikan produk olahan yang bisa menambah nilai jual. Hal tersebut terlihat dari hanya sebagian kecil pedagang yang ada disana menjual produk ikan yang sudah diolah seperti abon, ikan asin, dan olahan lainnya. Faktor yang menyebabkan masih sedikitnya pengusaha yang mengolah ikan-ikan tersebut antara lain:

1. masyarakat berpikir bahwa membuat produk olahan itu tidak praktis

2. adanya pemikiran bahwa menjual bahan mentah saja sudah memiliki keuntungan yang cukup
3. kurang adanya keseriusan dari DKP dalam mengawasi konsistensi kelompok pengolah dan pemasar produk perikanan dalam memproduksi hasil olahan

Pemanfaatan sumberdaya alam di Desa Tambakrejo kurang bijaksana dan tidak berkelanjutan. Banyaknya penebangan pohon secara liar dan perubahan status hutan yang tadinya adalah hutan lindung menjadi hutan produksi mengakibatkan bencana alam salah satunya adalah tanah longsor. Jika pengeksploitasian sumberdaya alam yang berlebihan diteruskan maka akan banyak terjadi bencana yang bisa berdampak pada kerusakan infrastruktur, perekonomian, dan sosial. Dampak-dampak tersebut bisa mempengaruhi Desa Tambakrejo menjadi tidak bisa mendukung MEA 2015.

PDPT berusaha menjadikan Desa Tambakrejo menjadi desa yang tangguh terhadap bencana melalui bina siaga bencana dan perubahan iklim dengan dana sebesar Rp 272.657.298,- atau 18,84% dari total dana PDPT. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah perenovasian pos pantau dan pengadaan peralatan pos pantau, pembuatan plengsengan, drainase, pengadaan HT, genset diesel, dan rambu evakuasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak bencana alam yang sewaktu-waktu terjadi sehingga kerugian yang terjadi dapat diminimalisir. Namun, abrasi yang terjadi di Pantai Tamban belum terkena sentuhan PDPT dimana jika dilihat dari kondisinya mendapat sentuhan yang serius.

C. Infrastruktur

Infrastuktur merupakan salah satu faktor penting yang menunjang kualitas kehidupan masyarakat Desa Tambakrejo. Kualitas infrastruktur ini menentukan Desa Tambakrejo dalam mendukung MEA 2015. Dengan infrastruktur yang memadai dan standar sesuai yang ditentukan maka akan menunjang Desa Tambakrejo dalam mendukung MEA 2015. Pemanfaatan dana PDPT tahun 2013 dan tahun 2014 untuk bina lingkungan dan infrastruktur mencapai Rp 677.647.000,- atau 62,07% dari total dana PDPT dimana angka tersebut melebihi dari separuh dana PDPT digunakan dalam perbaikan lingkungan dan infrastruktur yang ada di Desa Tambakrejo. Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya kerusakan lingkungan dan infrastruktur yang lebih banyak sehingga para pelaku PDPT yang ada di Desa Tambakrejo ini memutuskan lebih menaruh perhatian terhadap perbaikan lingkungan dan infrastruktur. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berupa perbaikan jembatan, MCK, jalan, instalasi pipa air, TPA, dan pembuatan dermaga kecil.

Tabel 22. Analisis Kesiapan Infrastruktur Desa Tambakrejo Dalam Mendukung MEA 2015

Infrastruktur	Standar	Kondisi di Lapang	Peran PDPT
Jalan	Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal jalan meliputi: 1. Aksesibilitas: jalan menghubungkan pusat kegiatan-kegiatan 2. Mobilitas: jalan memberikan kemudahan untuk pemakainya dalam berkegiatan sehari-hari 3. Keselamatan: jalan yang menjamin keselamatan para pengguna 4. Kecepatan: jalan dapat digunakan pada kecepatan yang telah direncanakan	Kondisi jalan di Desa Tambakrejo kurang baik dan kurang memenuhi standar yang ditentukan. Banyak jalan rusak dan berlubang yang bisa membahayakan keselamatan para pengguna jalan seperti pada ruas-ruas jalan dan jalan utama menuju wisata Pantai Tamban Indah.	Belum ada sentuhan PDPT karena keterbatasan wewenang sehingga diperlukan kerjasama antara dinas pekerjaan umum, dinas pariwisata, dinas pertanian, dan dinas perikanan dan kelautan.
Jembatan		Jembatan-jembatan yang ada di Desa Tambakrejo rata-rata dalam kondisi baik sesuai dengan standar yang ada.	Sudah adanya perbaikan-perbaikan jembatan dengan sentuhan PDPT
Listrik	Rendahnya gangguan dalam penggunaan listrik Kemudahan dalam mendapatkan sumberdaya listrik Tingginya ketersediaan sumberdaya listrik	Keadaan listrik di Desa Tambakrejo kurang baik karena selalu adanya pemadaman setiap hari yang berlangsung \pm 3 jam.	PDPT tidak ada wewenang dalam hal permasalahan listrik.
MCK	Memiliki dinding yang terbuat dari batu bata dan semen Lantai beralaskan keramik Beratapkan genteng Memiliki pintu Ketersediaan sumberdaya air bersih yang cukup Terpeliharanya kebersihan MCK dan lingkungan sekitar	MCK yang ada di Desa Tambakrejo dalam kondisi baik dan layak guna baik dari segi bangunan dan ketersediaan air bersih yang melimpah.	Adanya program PDPT, mampu memberikan fasilitas sanitasi yang baik dengan merenovasi MCK yang ada dan membangun MCK baru.
Komunikasi dan teknologi	Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi pasal 13c menyatakan bahwa pelaksana penyedia telekomunikasi wajib sekurang-kurangnya memenuhi layanan telekomunikasi dengan kemampuan dipanggil dan memanggil Tingginya kemampuan masyarakat dalam penggunaan teknologi seperti handphone, computer, penggunaan internet. Konektivitas dan kapasitas.dengan tingginya tingkat kemudahan dalam mendapatkan jaringan dalam	Masyarakat Desa Tambakrejo dalam keseharian berkomunikasi menggunakan <i>handphone</i> tapi sayangnya penggunaan <i>handphone</i> ini tidak disertai dengan kondisi jaringan signal telephon yang kurang baik. Rata-rata masyarakat Desa Tambakrejo mampu dalam penguasaan teknologi salah satunya adalah komputer dan internet dasar.	Belum adanya sentuhan PDPT pada hal ini yang juga termasuk dalam bina manusia yang merupakan salah satu fokus kegiatan PDPT.

Tabel 22. Analisis Kesiapan Infrastruktur Desa Tambakrejo Dalam Mendukung MEA 2015 (lanjutan)

	berkomunikasi dan kemudahan dalam pengaksesan informasi melalui internet yang dapat meningkatkan pengetahuan menunjukkan bahwa masyarakat dalam kondisi sejahtera.		
Pariwisata	Menurut UNESCO (2009), komponen-komponen pendukung wisata antara lain: a. Transportasi dan infrastruktur b. Daya tarik wisata c. Akomodasi (penginapan) d. Tempat makan e. Jasa pendukung (pemandu, penjualan cendra mata, ketersediaan informasi) Peraturan Pemerintah RI No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025, pariwisata memiliki komponen-komponen yang disebut saptapesona yaitu: 1. Aman 2. Tertib 3. Bersih 4. Indah 5. Ramah, dan 6. Kenangan	Banyak ekopariwisata yang ada di Desa Tambakrejo seperti Pantai Tamban, Pantai Sendiki, Pantai Clungup, Wana Wisata Sendangbiru dan lainnya. Dilihat dari kelengkapan komponen pendukung wisata, Desa Tambakrejo mampu memenuhi kelengkapan pendukung wisata tersebut mulai dari penginapan, pariwisata yang menarik, tempat makan, pemandu, mesin ATM BRI dan cendra mata. Namun dalam penyediaan informasi perlu ditingkatkan lagi. Sedangkan jika dilihat dari kriteria Saptapesona, pariwisata-pariwisata Desa Tambakrejo ini sudah sesuai dengan kriteria Saptapesona. Hanya saja perlu ditingkat dalam sikap pelayanan dan kebersihannya.	Dana PDPT yang digunakan untuk mendukung pariwisata di Desa Tambakrejo ini mencapai Rp 69.978.000 atau sebesar 9,67% dari total dana yang meliputi pengadaan perahu wisata, life jacket, gazebo, peralatan senam dan snorkling, alat dokumentasi, mesin daur ulang dan peralatan camping. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan fokus kegiatan bina usaha.
Pelabuhan perikanan	Berdasarkan KEP 294/ DJ-PSDKP/2010 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Pengawasan Sumberdaya Perikanan, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan seperti	Pelabuhan perikanan yang ada di Desa Tambakrejo sudah memenuh standard an ketentuan berdasarkan KEP 294/DJ-PSDKP/2010 yang meliputi adanya tempat bongkar muatan ikan, gudang sebagai tempat penyimpanan, kran-kran, dan rambu-rambu keselamatan salah satunya adalah larangan truk untuk memasuki dermaga.	Belum adanya sentuhan PDPT karena kondisi pelabuhan sudah sesuai dengan standar.

Tabel 22. Analisis Kesiapan Infrastruktur Desa Tambakrejo Dalam Mendukung MEA 2015 (lanjutan)

	<p>meliputi dermaga di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, kran-kran untuk bongkar muat barang, gudang laut (transito) dan tempat-tempat penyimpanan di mana kapal membongkar muatannya dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan.</p>		
Tempat pemasaran dan pelelangan Ikan	<p>Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi, tempat pemasaran ikan harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> terlindung dan mempunyai dinding yang mudah untuk dibersihkan; mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan dan disanitasi, dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem pembuangan limbah cair yang hygiene; dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan dan toilet dalam jumlah yang mencukupi. Tempat cuci tangan harus dilengkapi dengan bahan pencuci tangan dan pengering sekali pakai mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil perikanan; kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan berada dalam tempat pemasaran 	<p>Tempat pemasaran dan pelelangan ikan yang ada di Desa Tambakrejo sudah sesuai standar yang diatur dalam KEPMEN no 52A tahun 2013 hanya beberapa indikator saja yang belum sesuai. Indikator-indikator yang belum terlaksana berdasarkan kondisi di lapang antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> belum tersedianya tempat cuci tangan dengan bahan pencuci tangan dan pengering sekali pakai tempat yang terbuka sehingga memungkinkan adanya kontaminasi dengan udara luar seperti asap kendaraan, asap rokok, bakteri dan virus. belum adanya tanda peringatan untuk tidak merokok dan meludah air limbah hasil dari kegiatan pencucian ikan dan kegiatan pecucian fasilitas dibuang langsung ke laut tanpa ada tempat penampungan untuk diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke laut. 	<p>Belum mendapatkan sentuhan kegiatan program PDPT</p>

Tabel 22. Analisis Kesiapan Infrastruktur Desa Tambakrejo Dalam Mendukung MEA 2015 (lanjutan)

	<p>ikan/pasar grosir; g. dibersihkan secara teratur minimal setiap selesai penjualan h. dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok, meludah, makan dan minum, dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas i. mempunyai fasilitas pasokan air bersih dan atau air laut bersih yang cukup j. mempunyai wadah penampungan produk yang bersih, tahan karat, kedap air dan mudah dibersihkan dan k. mempunyai penampungan pengolahan limbah</p>		
--	---	--	--

4.4 Implikasi

PDPT tahun 2013 dan tahun 2014 berperan banyak dalam menjadikan Desa Tambakrejo menjadi lebih baik melalui kegiatan dibina siaga bencana dan perubahan iklim, bina usaha yang difokuskan untuk usaha jenis ekowisata, bina infrastruktur dan lingkungan dengan perenovasian pada beberapa infrastruktur seperti jembatan, plengsengan, drainase, MCK, dan lainnya, dan bina sumberdaya penanaman bibit mangrove, sawo dan pala. Salah satu infrastruktur berkondisi buruk yaitu jalan. Beberapa jalan berkondisi buruk yang bisa menyebabkan terhambatnya kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pengangkutan tebu, kayu, ikan dengan truk dan pickup untuk dijual keluar Desa Tambakrejo. Perbaikan jalan membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga perlu adanya kerjasama antara pihak-pihak luar dengan pihak desa seperti kerjasama dengan dinas pariwisata, dinas pekerjaan umum, dinas pertanian, LSM, dan pihak lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut juga bisa dijadikan solusi menangani abrasi pantai Tamban. Disamping itu belum ada kegiatan-kegiatan dibina manusia PDPT pada tahun tersebut, Jika dilihat

dari profil Desa Tambakrejo dari segi demografi, maka perlu diadakan kegiatan bina manusia untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan yang bersifat aplikatif seperti pelatihan-pelatihan mengenai pengolahan ikan dijadikan berbagai macam produk olahan seperti abon, krupuk ikan, sosis ikan, bakso ikan, dan nugget ikan, pelatihan dan studi banding mengenai cara pengemasan menarik dan sesuai dengan sifat produk, tersedianya kemudahan dalam akses informasi tentang pasar. Untuk menjaga kekonsistenan pengaplikasian pelatihan-pelatihan tersebut sebaiknya dibentuk kelompok-kelompok pengolah dan pemasar yang terdiri 1-10 anggota yang difasilitasi oleh penyuluh perikanan dan kelautan. Satu penyuluh membawahi 1-5 kelompok.

Penyuluh berfungsi sebagai fasilitator dalam pengadaan informasi-informasi mengenai pengolahan ikan, informasi mengenai adanya peminjaman modal dari lembaga keuangan, informasi pasar, informasi dalam pengadaan event-event seperti PENAS yang bisa dijadikan sebagai acara untuk studi banding dengan hasil-hasil produk dari kelompok pengolah dan pemasar lainnya diharapkan dapat menumbuhkan rasa bersaing yang tinggi dalam berwirausaha. Disisi lain, kegiatan tersebut bisa membantu perekonomian keluarga para nelayan disaat musim paceklik (musim tidak ada ikan) atau bisa disebut juga pekerjaan alternatif dimusim paceklik sehingga dampak ekonomi yang terjadi pada musim paceklik dapat berkurang. Melakukan pengolahan ikan bisa menjadikan ikan lebih awet sehingga ikan bisa distok dalam freezer dan mempunyai nilai tambah dari segi ekonomi. Jika memang kondisi tidak mungkin dibentuknya kelompok baru maka bisa dilakukan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada dan juga disesuaikan dengan karakter kelompok-kelompok tersebut. Berdasarkan penelitian di atas bahwa ada beberapa

kelompok yang dekat dengan masyarakat yaitu kelompok nelayan, komunitas gereja, koperasi, POKMASWAS, dan kelompok pengajian.

Desa Tambakrejo memiliki potensi dibidang pariwisata khususnya pantai namun wisatawan dalam mencari informasi-informasi tentang rute pariwisata, penginapan dan tempat makan masih mengalami kesulitan sehingga perlu didirikannya kantor pusat informasi wisata Desa Tambakrejo. Kantor tersebut bertujuan sebagai tempat tujuan awal yang dituju para wisatawan domestik dan non-domestik untuk mencari informasi-informasi mengenai pariwisata apa saja yang ada di Desa Tambakrejo beserta fasilitas-fasilitas penunjangnya (tempat penginapan, ATM, restaurant, supermarket, pom bensin, dan lain sebagainya) yang bisa divisualisasikan dengan mencetak brosur yang berisikan peta wisata Desa Tambakrejo seperti yang dilakukan negara luar yang selalu memberikan buku panduan yang berisikan semua informasi mengenai wilayah-wilayah mereka beserta fasilitas-fasilitas penunjangnya yang diberikan di bandara-bandara. Peta tersebut sebagai jalan penunjuk wisatawan untuk mengelilingi Desa Tambakrejo. Kantor tersebut juga bisa menyediakan jasa guide dan biro perjalanan agar informasi-informasi tersebut bisa diakses melalui apa saja dan kapan saja serta dimana saja, kantor tersebut bisa membuat web. Web tersebut berguna menyediakan informasi tentang pariwisata dan fasilitas pendukungnya bahkan wisatawan bisa menyewa kamar penginapan, guide, biro perjalanan yang ditawarkan secara online. Untuk menemukan kantor tersebut para wisatawan dimudahkan dengan plakat-plakat penunjuk arah menuju kantor pusat informasi wisatawan Desa Tambakrejo. Dengan sistim tersebut, Desa Tambakrejo bisa mendukung MEA 2015.

Berdasarkan penelitian ini mengenai diagram vens kedekatan lembaga dengan masyarakat, ada banyak lembaga yang jauh dari masyarakat. Lembaga yang jauh dari masyarakat menandakan bahwa lembaga tersebut tidak

memenuhi indikator lembaga yang ada sehingga perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan dari indikator-indikator tersebut seperti indikator tanggung jawab. Lembaga yang tanggung jawabnya masih kurang maka perlu ditingkatkan lagi dari segi tanggung jawabnya lagi sehingga lebih dekat dengan masyarakat bukan berarti lembaga yang sudah dekat tidak perlu adanya perbaikan tetapi lebih mengarah untuk mempertahankannya. Untuk mengetahui perubahan kedekatan tersebut maka diperlukan survey yang bisa dilakukan setiap 1 tahun sekali.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

- a. dilihat dari profil Desa Tambakrejo bahwa Desa Tambakrejo memiliki sumberdaya alam yang melimpah tetapi hal ini tidak diimbangi dengan kualitas sumberdaya manusinya yang masih rendah sehingga dalam mendukung MEA masih dibutuhkan persiapan lagi di bagian infrastruktur, SDM, dan transportasi.
- b. lembaga-lembaga yang dekat dengan masyarakat berdasarkan hasil FGD yaitu kelompok nelayan, komunitas gereja, POKMASWAS, kelompok pengajian, dan koperasi.
- c. kegiatan program PDPT tahun 2013 dan tahun 2014 dalam mempersiapkan Desa Tambakrejo dalam mendukung MEA 2015 sangat berperan dalam pembangunan desa hanya saja kegiatan kurang tepat sasaran jika dilihat dari skala prioritas karena ada kerusakan alam yang parah dan butuh segera diselesaikan. Desa Tambakrejo kurang siap bila dalam mendukung MEA 2015 dan perdagangan bebas internasional

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran-saran antara lain:

- a. perlu adanya koordinasi antara pihak-pihak yang berkaitan dalam hal membenahan infrastruktur seperti Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Perum Perhutani, dan Dinas Pekerjaan Umum
- b. perlu adanya peningkatan kapasitas lembaga-lembaga yang ada di Desa Tambakrejo
- c. Dalam pemanfaatan anggaran program pemerintah hendaknya berdasarkan skala prioritas masalah yang harus diselesaikan
- d. Peningkatan kreatifitas dalam diversifikasi produk perikanan dan kekonsistenan dalam mendirikan usaha
- e. Perlu dibentuknya kelompok-kelompok pengolah dan pemasar produk perikanan dalam bimbingan dinas perikanan dan kelautan seperti yang terjadi di Desa Patuguran Kecamatan Rejoso Pasuruan Jawa Timur untuk merangsang jiwa kewirausahaan
- f. Meningkatkan fungsi manajemen perkantoran di Desa Tambakrejo agar lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito, Wiku. 2008. **Analisis Kemiskinan, MDGs dan Kebijakan Kesehatan Nasional**. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia. Jakarta
- Anantanyu, Sapja. 2011. **Kelembagaan Petani: Peran Dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya**. Fakultas Pertanian UNS. SEPA: Vol.7 No.2 ISSN: 1829-9946
- Arifin, Samsul dkk. 2008. **Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global**. Elex Media Komputindo Kompas Gamedia. Jakarta
- Association of Southeast Asian Nations. 2008. **ASEAN Economic Community Blueprint**. www.asean.org diakses pada tanggal 5 Februari 2015
- Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional. 2015. **Indikator Kesejahteraan Keluarga**. www.bkkbn-jatim.go.id diakses pada tanggal 4 April 2015
- Badan Pusat Statistik. 2008. **Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2008**. Jakarta. ISBN: 978-979-724-966-3
- Bintarto, R. 1983. **Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya**. Ghalia Indonesia. Jakarta Timur
- Black, J.A. dan Dean, J.C. 1994. **Metode dan Masalah Penelitian Sosial**. Refika Aditama. Bandung
- Burmansyah, Edy. 2014. **Rezim Baru ASEAN Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN**. Grup INSISTPress. Yogyakarta
- Cimb ASEAN Research Institute. 2013. **The ASEAN Economic Community: The Status of Implementation, Challenges and Bottlenecks**. Monash University
- Departemen Perdagangan RI. 2004. **Menuju ASEAN Economic Community 2015**. Jakarta
- Desa Tambakrejo. 2013. **Profil Desa Tambakrejo**. Malang
- Desa Tambakrejo. 2014. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa**. Malang
- Dinas Kelautan dan Perikanan. 2013. **Laporan Akhir Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Tahun 2013**. Kabupaten Malang
- Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 2014. **Laporan Akhir Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Desa Sitarjo, Desa Sidoasri, dan Desa Tambakrejo Tahun 2014**. Kabupaten Malang
- Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP 294/DJ-PSDKP/2010. **Prosedur Operasional Standar (POS) Pengawasan Sumberdaya Perikanan**. Jakarta
- Direktur Jendral Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, t.t **Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan No: KEP 294/ DJ-PSDKP/2010 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Pengawasan Sumberdaya Perikanan**. Jakarta
- Hendayana, Dandan. 2011. **Melembagakan Kelembagaan Petani Pedesaan**. <https://dhkangmas.wordpress.com/2011/02/01/melembagakan-kelembagaan-petani-pedesaan/> diakses pada tanggal 5 Juli 2015

- International Labour Organization. 2014. **Indonesia: Tren Sosial dan Ketenagakerjaan**. Jakarta
- Kartasasmita, Ginandjar. 2003. **Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat**. Institut Teknologi Bogor. Jakarta
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. **Desa**. PN Balai Pustaka. Jakarta
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014. **Kenaikan Ekspor Produk Perikanan**.
<http://www.indonesia.go.id/in/kementerian/kementerian/kementerian-kelautan-dan-perikanan/823-perikanan/12071-ekspor-produk-perikanan-naik-signifikan> diakses pada tanggal 3 Maret 2015
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014. **Perlindungan Produk Perikanan Lokal**. http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/10921/KKP-konsisten-lindungi-produk-perikanan-lokal/?category_id=26/09/2014 diakses pada tanggal 3 Maret 2015
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014. **Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT)**. <http://pdpt-kekp.org/tangguh/index.php/sekilas-pdpt> diakses pada tanggal 10 April 2015
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang **Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi**. Jakarta
- Malang Post. 2014. **Percepatan Pembangunan Desa Mewujudkan Pesisir Tangguh**. <http://malang-post.com/metro-rama/74813-percepatan-pembangunan-desa-mewujudkan-pesisir-tangguh> diakses pada tanggal 20 Februari 2015
- Menteri Dalam Negeri RI, t.t. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan**. Jakarta
- Menteri Dalam Negeri RI, t.t. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan**. Jakarta
- Menteri Kelautan dan Perikanan RI, t.t. **Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan**. Jakarta
- Menteri Kelautan dan Perikanan, t.t. **Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi**. Jakarta
- Menteri Komunikasi dan Informatika, t.t. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No 11/PER/M. KOMINFO/04/2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi**. Jakarta
- Menteri Pekerjaan Umum, t.t. **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan**. Jakarta
- Paramita, Astrid dan Lusi Kristiana. 2013. **Focus Group Discussion Dalam Penelitian Kualitatif**. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. Vol 16;117-127

- Patton, Michael Quinn. 2009. **Metode Evaluasi Kualitatif**. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Pemerintah Republik Indonesia, t.t **Peraturan Pemerintah RI No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025**. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2007 tentang **Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana**. Jakarta
- Riniwati, Harsuko, dkk. 2014. **Blue Economy in Motion: Profil dan Rencana Masyarakat Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di Kabupaten Malang Dengan Pendekatan ENACT (Enabling Community Action) Model**. Universitas Brawijaya. Malang
- SCTV. 2014. **Produsen Ikan Terbesar**. <http://bisnis.liputan6.com/read/2069570/ironi-ri-jadi-produsen-ikan-terbesar-tapi-kalah-ekspor-dari-cina> diakses pada tanggal 7 Februari 2015
- Singarimbun, Masri dan Efendi Sofian. 1989. **Metode Penelitian Survei Edisi Revisi**. LP3ES. Jakarta
- Sugiyono. 2012. **Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D**. Alfabeta. Bandung
- Suhaimi, Uzair. 1999. **Focus Group Discussion: Panduan Bagi Peneliti Studi Kualitatif Studi Dampak Sosial Krisis Moneter**. BPS bekerjasama ADB
- Tim Penyusun Pengembangan Desa Pesisir Tangguh. 2013. **Rencana Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Desa Tambakrejo Tahun 2013-2017**. Malang
- Undang-Undang Republik Indonesia No: 34 Tahun 2004 tentang **Jalan**. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang **Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**. Jakarta
- UNESCO. 2009. **Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata**. Jakarta UHJAK/2009/PI/H/9
- Wordpress. 2015. **Kemampuan Lahan**. <https://bebasbanjir2025.wordpress.com/04-konsep-konsep-dasar/klasifikasi-kemampuan-lahan/> diakses pada tanggal 22 Juni 2015